



PRABOWO GIBRAN MENANG TELAK



Rp75.000,-

**SALING SILANG
PRESIDEN
(BOLEH)
BERKAMPANYE**

**PELUANG
BESAR RIDWAN
KAMIL MENANG
DI JABAR**

**ERICK THOHIR
PALING PANTAS
GUBERNUR DKI
JAKARTA**

**GAJI ASN
NAIK, BANSOS
TERUS
DIGENJOT**

**KAMPANYE
MERIAH
DI TANGGAL
MERAH**

info indonesia inovasi untuk negeri



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

TABLOID REFERENSI PEMILU 2024



TERBIT
TIAP
HARI
SENIN

EDISI
BULAN
FEBRUARI
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Banyak hal dikemukakan Capres Prabowo Subianto setelah hasil hitung cepat (quick count) mengunggulkannya sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029. Apa sajakah?



24

INFO SUMSEL

Menyambut pemilihan umum (Pemilu) 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengajak 17 ribu lebih pemilih pemula, khususnya siswa-siswi kelas XII SLTA se-Sumsel untuk menggunakan hak suaranya.



32

INFO KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan kesiapannya mendukung Pemilu Damai 2024. Akmal memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu di wilayah yang dipimpinnya berjalan dengan lancar.



36

INFO PARTAI

Demokrasi Indonesia kini dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan, berdasarkan sejumlah indikator. Seperti kualitas proses pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.



50

INFO NASIONAL

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bisa menjadi data pendukung dalam pemeriksaan keuangan. Berbagai data yang dimiliki Pemda bisa diakses dengan adanya SIPD.



64

INFO MUBA

Langkah nyata Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud untuk melakukan pemerataan pembangunan di Bumi Serasan Sekate tahun 2024 patut diacungi jempol. Bahkan untuk mendengarkan semua keluhan masyarakatnya Apriyadi bahkan menginap di rumah warga agar komunikasi yang disampaikan dapat mengena sasaran.



87

INFO KHUSUS

Tampil dengan setelan jas resmi pada debat terakhir Capres, kandidat nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan berusaha menunjukkan kesan sebagai figur pemimpin yang melindungi rakyatnya. Bukan menyerang lawan debatya.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

36 INFO PARTAI

64 INFO PALEMBANG

66 INFO BANYUASIN

68 INFO OGAN ILIR

70 INFO PALI

74 INFO JATENG

76 INFO ISTANA

80 INFO CALEG

86 KAJI

82

INFO CALEG

Keprihatinan terhadap minimnya kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palembang mengetuk hati nurani Etty Yuniarti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palembang, Dapil Palembang 1.

SAATNYA

Hasil Pemilu 2024 baru diketahui setelah hari pemungutan suara 14 Februari. Saat itulah begitu banyak pertanyaan akan terjawab.

Katakan misalnya prediksi para pollster (lembaga jajak pendapat) yang menggunakan metode survei dan ragam variasinya. Tentu saja quick count (hitung cepat) adalah salah satu yang paling diketahui segera.

Kelak akan terlihat hitung cepat lembaga mana yang paling mendekati perhitungan nyata (real count). Selain itu, dinamika elektabilitas yang disurvei secara teratur dalam rentang waktu tertentu (time series) akan pula terlihat tingkat akurasi. Pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum yang berwenang mengumumkannya. Sekaligus akan diketahui apakah Pilpres 2024 berlangsung satu atau dua putaran?

Jangan lupa pula Pemilu 2024 berlangsung serentak sehingga akan menentukan siapa saja yang terpilih menjadi anggota legislatif. Baik anggota DPRD kabupaten dan kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI. Tentu saja hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah termasuk juga.

Sekadar sisipan namun penting juga untuk diperhatikan adalah efektivitas peran media sosial dalam dinamika elektabilitas. Terlebih lagi, sebagian besar pemilih pada Pemilu 2024 adalah mereka yang berkategori Generasi Y (kelahiran 1981-1996) dan Generasi Z (kelahiran 1997-2012). Dua generasi ini juga lebih aktif menggunakan media sosial di jaringan internet dengan gejala manipulasi terhadap kebenaran faktual yang dikenal sebagai wacana post truth.

Aneka manipulasi juga perlu tindak lanjut pembuktian. Katakanlah, misalnya, jika ada yang meragukan hasil perhitungan nyata oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU, tersedia jalan untuk menguji atau membuktikannya. Namun, tetap perlu alat bukti yang memadai, misalnya dokumentasi dan saksi. Bawaslu dapat menjadi tempat mengadu, Mahkamah Konstitusi menjadi muara untuk mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penghitungan suara.

Terlepas dari keraguan terhadap lembaga itu, prosesnya dapat disaksikan bersama-sama oleh segenap yang berperkara. Dengan rujukan yang juga sudah disusun berdasarkan Undang-Undang Pemilu beserta aturan-aturan turunannya. Itu semua merupakan prosedur baku yang sudah diterapkan dalam Pemilu sebelumnya. Untuk mengingatkan saja, Pemilu 2024 adalah yang kelima kali berlangsung setelah Reformasi 1998. Idealnya, Pemilu kelima ini akan berlangsung lebih baik dari empat yang sebelumnya. Lebih baik dalam arti prosedural, prosesnya sesuai dengan aturan yang sudah disusun bersama-sama segenap komponen pemangku kepentingan.

Akhirnya demokrasi prosedural itu hendaknya dapat menunjang upaya mewujudkan demokrasi substansial yakni liberte (kebebasan), egalite (kesetaraan), dan fraternite (persaudaraan) sesama manusia dan semesta. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

• TELP 021-791 96781
• FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Rusdiyono

REDAKTUR : Melati Tagore, Irma Yani, Nina Erlina, Ega Tri Gustina **REPORTER:** Budi Prasetya, Nefri, Indra

Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M Iqbal, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fiqri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah

DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



NIAT MERANGKUL SETELAH MENANG TELAK

Banyak hal dikemukakan Capres Prabowo Subianto setelah hasil hitung cepat (quick count) mengunggulkannya sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029. Apa sajakah?



Menanggapi hitung cepat oleh lembaga-lembaga survei yang menunjukkan tanda-tanda memenangkan Pemilihan Presiden 2024, pasangan Capres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhimpun dengan para pendukungnya di Istana Olah Raga (Istora), Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Pada Rabu malam, 14 Februari 2024 itu, Prabowo-Gibran tampil dengan setelan kemeja bermotif kotak-kotak dengan kombinasi warna biru-putih. Keduanya tampak berwajah cerah dan

bersemangat di acara bertajuk Mengawal Suara Rakyat itu.

Sambutan riuh-rendah datang dari hadirin di Istora yang berkapasitas 7.200 tempat duduk itu. "Prabowo-Gibran menang satu putaran!" demikian antara lain seruan para pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini.

Tampak pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di antara para hadirin. Antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan sekaligus

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (Zulhas), serta Wakil Menteri Tenaga Kerja sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor.

Hadir pula Menkominfo sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi. Selain itu, di acara Mengawal Suara Rakyat itu tampak pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadiala..



Pasangan Prabowo-Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 19.30 WIB. Di puncak acara, Capres Prabowo menyampaikan pernyataan politik sebagai berikut:

Pada hari ini kita bersyukur seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air. Saudara-saudara hari ini seluruh rakyat Indonesia, di seluruh wilayah tanah air kita dan saudara kita di luar negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan tugas konstitusi kita, tugas sebagai warga negara, yaitu kita menjalankan kedaulatan rakyat, kita memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, kita memilih

presiden dan wakil presiden dan kita memilih wakil kita di DPR, provinsi, kabupaten/kota dan juga dewan perwakilan daerah.

Kita bersyukur yang diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia, kita laksanakan dengan aman, dengan tertib, dengan sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruhan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai ini.

Untuk itu, atas nama Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya ingin menyampaikan terima yang sebesar-besarnya kepada KPU dan seluruh jaja-

rannya dan seluruh tingkatan termasuk Bawaslu, DKPP yang telah menyelenggarakan Pemilihan Umum yang terbesar di dunia dengan keadaan lancar dan sukses.

Kita melihat rakyat di seluruh pelosok tanah air, datang berbondong-bondong ke TPS melaksanakan pemilihan umum dengan riang, dengan tenang, suasana kekeluargaan dan dengan penuh kedamaian.

Saudara sekalian, atas nama tim Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada.

Semua penghitungan, semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo-Gibran menang satu putaran.

Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan walaupun kita bersyukur kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jemawa, kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati.

Kemenangan ini harus jadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, Prabowo-Gibran dan seluruh Koalisi



Tak pelak quick count menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran menang telak atas dua pasangan pesaingnya.

Indonesia Maju kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan.

Kami akan jadi presiden dan wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia, berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia.

Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk



menjaga kepentingannya.

Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri bangsa Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU, kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik.

Saudara-saudara, rakyat yang menentukan, rakyat memutuskan rakyat berhak mendapatkan pemimpin yang dikehendaki rakyat Indonesia.

Dalam beberapa minggu ini, Mas Gibran dan saya dengan tokoh yang dukung kita, kita telah jelajahi seluruh Indonesia. Kami bagi tugas ada tempat yang tidak kami sampai, Mas Gibran sampai, ada juga yang dikerjakan oleh Mas Agus Gumiwang, ada Pak Zulkifli Hasan, ada juga oleh Mas Agus Ha-

rimurti.

Bahkan presiden SBY turun. Saya kaget waktu di GBK, Presiden Indonesia ke-6 jalan kaki 7 kilometer, jalan kaki luar biasa penghormatan.

Saudara sekalian dengan dukungan rakyat, dengan suara rakyat yang sudah diberikan, mari kita menghadap ke depan, lihat ke depan, bangsa yang hebat selalu melihat ke depan, menyongsong masa depan.

Kita laksanakan kampanye memang dengan semangat, memang kadang dengan kata-kata keras, itu namanya kampanye, sekarang kampanye sudah selesai, kita harus bersatu kembali.

Saya mengajak mari kita, mari kita lupakan kata-kata yang kasar, di antara saudara, bertengkar itu biasa tapi

bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama.

Di seluruh tempat yang kami datang, rakyat selalu mengatakan ingin kerukunan, ingin kesejukan, bangsa Indonesia adat kami, tradisi kami, ajaran orang tua kami adalah tidak mencari permusuhan, tapi kita mencari kekeluargaan, persaudaraan.

Ini adat, budaya kita, rakyat Indonesia tidak suka saling menjelekan-jelekan, ajaran orang tua kami, nenek moyang kami adalah mikul dhuwur mendhem jero, artinya mengangkat yang baik dan meninggalkan yang kurang baik.

Berkali-kali saya mengajak sebagai bangsa yang bermartabat, sebagai bangsa yang dewasa, sekarang bangsa yang jadi panutan bangsa lain, mari kita bersyukur, mari berterima kasih kepada pendiri bangsa kita, mari berterima kasih pada presiden-presiden yang kita miliki selama ini.

Presiden Soekarno, presiden pertama, berjasa besar. Presiden Soeharto, presiden kedua berjasa besar. Presiden ketiga, Presiden Habibie berjasa juga, presiden Abdurrahman Wahid semua berjasa, Presiden Megawati berjasa pada bangsa, Presiden SBY berjasa bagi kita, Presiden Jokowi berjasa bagi Indonesia.

Kebetulan dari sekian presiden saya hampir semua presiden saya kenal, Bung Karno saya tidak kenal, karena



saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat sama Bung Karno.

Presiden kedua saya lumayan kenal juga, kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya?

Presiden kedua saya sering makan siang sama beliau, presiden ketiga saya juga kenal, Pak Habibie, presiden keempat saya juga kenal beliau, saya dulu tukang pijitnya Gus Dur. Kalau enggak percaya tanya yang kenal Gus Dur.

Presiden SBY saya kenal baik, dulu saya sempat jadi kawan, jadi temen, masuk Akabri sama-sama tapi karena akademi militer sangat sayang sama saya, saya ditahan dikasih tambah beasiswa satu tahun lagi.

Presiden Jokowi saya sangat kenal. Saya sangat kenal beliau saya katakan pekerja yang sangat sangat sangat keras.

Tidak ada capeknya. Menteri-menteri kewalahan ikut beliau. Saya dengan Mas Gibran kami hanya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pendukung kami, kami berterima kasih semuanya.

Kami berterima kasih dan kami hanya pesan mari dengan tenang menunggu suara resmi KPU, kita jaga ketenangan.

Saling ingatkan, kita waspada negara seperti kita, negara sebesar kita, negara sekaya kita selalu diiri oleh kekuatan-kekuatan lain.

Karena itu kita harus kompak, kita harus bersatu, rukun, dan saya, Mas Gibran, dan Koalisi Indonesia Maju kami akan bekerja sekuat tenaga untuk merajut, untuk mengajak, menjalin kerukunan, persatuan, kekompakan, kolaborasi untuk rakyat Indonesia.

Saya kira itu dan sekali lagi kami tidak ragu-ragu, kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan di pihak manapun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Niat kami hanya untuk mengabdikan, berbakti kepada rakyat Indonesia. Saya kira cukup dari saya.

Pidato berisi pernyataan politik itu disampaikan usai sejumlah lembaga jajak pendapat menunjukkan keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 menurut hasil hitung cepat (quick count). Metode quick count adalah hasil perhitungan suara pada sekitar seribu dari 820 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia.

Hasilnya, pasangan nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar memperoleh sekitar 24-26 persen suara pemilih. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka beroleh 57-59 persen suara pemilih. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD meraih 16-17 persen suara.

Tak pelak quick count menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran menang telak atas dua pasangan pesaingnya. Namun, pengumuman resmi rekapitulasi penghitungan suara secara menyeluruh (real count) akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara. KPU menyebutkan paling lambat 20 Maret 2024. ●





KAMPANYE MERIAH DI TANGGAL MERAH

Di tanggal merah, kampanye rapat umum tampak lebih meriah. Kian jelas pula upaya mendongkrak elektabilitas di lumbung suara para pesaing.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tampak memanfaatkan hari libur untuk mengoptimalkan kampanye rapat umum. Kemeriahan berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat untuk pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Di Semarang, Jawa Tengah, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran memeriahkannya dengan kirab atau pawai politik. Sedangkan pasangan nomor urut 2 memeriahkan Kota Medan, Sumatera Utara dan Yogyakarta.

Kemeriahan itu memang terbagi sesuai dengan zonasi (pembagian wilayah) kampanye yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pasangan Capres-Cawapres dan partai pen-

gusungnya berupaya mengefektifkan kampanye di tanggal merah, Minggu, 28 Januari 2024 itu.

Capres 01, Anies Rasyid Baswedan, yang berkampanye di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, menyerukan kepada para pendukungnya agar mengajak orang lain memilih pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) pada hari H pemungutan suara. Menurut dia, kemenangan di Jawa Barat adalah kunci utama memenangkan Pilpres 2024.

"Kemenangan di Jawa Barat akan mengantarkan kita pada Kemangan di Indonesia. Jawa Barat ini adalah kunci," ujar Anies di hadapan ribuan pendukungnya di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 28 Januari 2024.

Anies pun berpesan kepada para pendukungnya untuk terus berjuang dan bekerja keras menyebarkan paham perubahan hingga hari pencoblosan nanti. "Jangan tidak ada hari kita tidak bekerja, setiap hari harus menjangkau semua dan sebanyak banyaknya," kata dia.

Tak lupa Anies mengajak para pendukungnya mencoblos calon legislatif dari partai pengusung pasangan nomor urut 01 ini. Alasannya, tanpa dukungan suara partai pengusung, seluruh kebijakan Anies-Imin bisa dijegal oleh pihak koalisi di parlemen. "Kalau kita tidak menangkan legislatif, nanti kebijakan-kebijakan kita akan diblok di DPR. Kita harus menang dua-duanya, tidak cukup menang Pilpres saja dan itu adalah 14 Februari," ujarnya.

Anies mengemukakan pula, perubahan tidak bisa terjadi secara tiba-tiba tetapi harus diperjuangkan. "Insya Allah tiga minggu ke depan kerja keras kemanangan diantarkan kepada kita," ucap Anies dalam kampanye yang dihadiri pula oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Dharma Paloh juga Wakil Presiden ke 10 dan 12 HM Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya Surya Paloh mengatakan Partai NasDem saat ini sedang memperjuangkan idealisme perubahan bangsa yang lebih baik. Sedangkan Anies Baswedan dinilai merupakan sosok yang terbaik untuk memimpin bangsa ini.

"Anies adalah yang terbaik dari yang baik-baik. maka, untuk itulah saudaraku semuanya 17 hari mendatang kita harus menjaga perjalanan demokrasi ini agar pemilu berlangsung secara baik, dan sikap kita saling menjaga, bukan berarti kita menyerah terhadap tantangan apapun juga," kata Surya Paloh.

Paloh pun mengemukakan saat ini masyarakat pendukung Capres dan Cawapres AMIN tengah berjuang untuk perubahan dengan semangat demokrasi. Ia berharap hak sebagai warga negara tidak dicampuradukkan dengan kepentingan pribadi dan keluarga demi bangsa Indonesia.

"Demokrasi mengatur, republik juga mengatur hak hak pribadi. Hak-hak warga dan tentu hak publik. Kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, keluarga dengan hak-hak publik. Ini misi

besar kita di negeri ini, ini misi besar kita di negeri ini," ujarnya.

Menurut dia, Partai NasDem bersyukur memiliki kader-kader militan dan memiliki semangat untuk perubahan bangsa Indonesia. "Saudara-saudara yang berada di sini adalah aset yang paling hebat dari partai NasDem. Tanpa saudara-saudara NasDem tidak berarti apa-apa di Jabar ini. NasDem akan bisa

biru muda, pasangan nomor urut 01 ini menggelar kampanye berslogan "Kirab Kebangsaan Prabowo-Gibran" dengan pawai menyusuri rute mulai dari Taman Indonesia Kaya menuju Lapangan Sim-pang Lima Semarang.

Di atas mobil parade, Prabowo merangkul Gibran. Dia juga berjoget gemoy seraya menyapa para warga di lokasi. Para pendukung dan simpatisan riuh



lebih hebat membawa misi perjuangan gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Kita di sini untuk mengekspresikan kepada amanat konstitusi pada tanggal 14 Februari," sambung-nya.

Di zona lain, Jawa Tengah, pasangan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir bersama dalam acara kampanye di Kota Semarang. Dengan kostum kemeja

menyambut kedatangan mereka.

Kirab kebangsaan ini diramalkan dengan marching band, parade kebudayaan, tari-tarian hingga penampilan barongsai. Di tempat kampanye juga dipenuhi oleh berbagai alat peraga kampanye paslon maupun koalisi pengusung.

Sejumlah influencer juga tampak dalam rombongan pawai itu. Antara lain Raffi Ahmad, Tarra Budiman, Chand Kel-

vin, Baim Wong, Paula Verhoeven dan Ria Ricis.

Dalam mobil parade yang berbeda terlihat Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani serta para ketua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Tampak antara lain Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketum Partai PSI Kaesang Pangarep, dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, mereka juga menyapa massa yang ada di sepanjang perjalanan.

Melihat antusiasme masyarakat di kampanye terbuka, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis paslon nomor urut 2 bisa menang satu putaran di Pemilu 2024. Men-

di beberapa daerah lain pun dukungan untuk Prabowo-Gibran terbilang besar. Khususnya di Nusa Tenggara Barat yang sebelumnya ia kunjungi.

"Sambutannya di NTT tuh ya gegap gempita, Lombok juga. Saya kira akan menang mutlak itu di NTB dan NTT, juga kemarin sebelumnya saya juga di Indramayu luar biasa. Kalau Jawa Barat memang saya kira basis utama. Akan menang tebal di Jawa Barat juga daerah-daerah lain," ujarnya.

Zulhas pun optimis Prabowo-Gibran akan meraih kemenangan dengan mudah dalam Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari mendatang. "Nah saya kira lihat perkembangan terakhir ini sekali putaran ini 14 Februari itu hampir semua mengatakan sekali putaran Insya Allah,"



urut Zulhas, ada tanda-tanda Prabowo Gibran akan menang besar. "Kalau berhasil menang besar (di Jawa Tengah), maka sekali putaran itu Insyaallah 14 Februari 2024 nanti tercapai," kata Zulhas di Semarang sebelum pawai kirab berlangsung

Dukungan partai-partai pengusung, sambungnya, menambah optimisme itu. "Sore ini kita kampanye akbar di Semarang yang akan dihadiri Pak Prabowo dan Gibran juga ketua-ketua umum partai. Alhamdulillah di sini saya dengar juga Pak Airlangga akan hadir, Kaesang dan lain-lain," tambahnya.

Tak hanya di daerah-daerah di Jawa Tengah, Zulhas menyebutkan bahwa

ujarnya.

Tiba di Lapangan Simpang Lima, pawai politik berlanjut dengan kegiatan pidato kampanye. "Saudara memberi kekuatan kepada saya hari ini. Saudara membuat saya hari ini tambah muda 15 tahun. Rasanya ingin joget aja, tapi saya nanti dimarahi lagi," kata Capres Prabowo.

Ia juga menyinggung nilai yang pernah diberikan Anies Baswedan saat debat calon presiden lalu. "Nanti aku dikasih nilai sebelas lagi. Aku sedih, lho. Sorry ye," ucap Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Prabowo mengaku sedih diberi nilai 11 dari skala 100. Menurut dia, di bang-

ku sekolahan nilai 5 tergolong rendah dan ditulis merah apalagi 1,1. "Saya sebenarnya ingin jawab di situ, emang lo siapa, emangnya gue pikirin, sorry ye," sebutnya.

Calon presiden yang pernah tiga kali maju Pilpres ini lantas menyebutkan sejumlah negara yang pernah dia singgahi untuk sekolah. "Saya sudah sekolah ke Amerika, Jerman, Inggris, Swiss, belum pernah ada guru sejahat itu. Edan," ujar Prabowo.

Selain itu, ia meminta masyarakat dan pendukungnya mengawal surat suara agar tak dirusak. "Saudara-saudara sekalian, kami mendapat laporan, mendapat informasi ada rencana mau merusak surat-surat suara. Jadi sesudah nyoblos dijaga dan dilihat. Jangan sampai surat suara dirusak. Jelas? Jelas?," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu pun mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Dia juga meminta pendukungnya menunggu penghitungan surat suara agar tak ada kecurangan. "Jadi sudah jelas tanggal 14 datang ke TPS, nyoblos? Sesudah nyoblos jangan pulang. Tunggu sampai hitungan selesai," ujarnya.

Prabowo pun meminta dukungan masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 01 dalam Pilpres 2024. Dia berkomitmen menghilangkan kemiskinan dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

"Kami tidak mau lihat putra-putri Indonesia sulit mendapat pekerjaan. Itu tugas kami, itu tugas suci saya sebelum saya menghadap Allah SWT. Itu yang mau saya kerjakan untuk membela rakyat saya," ucap Prabowo.

Sedangkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo memilih Medan, Sumatera Utara. Di provinsi dengan pemilih terpadat di luar Jawa itu Ganjar berjanji akan menghapus kredit macet para nelayan di perbankan yang timbul akibat Pandemi Covid-19.

"Kita sadar betul bahwa banyak nelayan yang saat ini mengalami kredit macet karena pandemi Covid-19 kemarin. Ke depan, kredit macet ini akan kita hapus," kata Ganjar yang kemudian disambut sorak-sorai massa kampanye di Kampung Nelayan Kurnia, Kelurahan

Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 28 Januari 2024 pagi.

Ganjar didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN), Arsjad Rasjid, Deputi Politik TPN, Andi Widjajanto, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Paul Baja Siahaan serta sejumlah ketua partai pendukung, para juru kampanye.

Capres nomor urut 3 ini menyadari pada masa Pandemi Covid-19 lalu, banyak nelayan yang tidak bisa melaut. Selain itu pendapatan nelayan untuk membayar kredit ke perbankan turun drastis akibat daya beli masyarakat yang menurun.

"Kita sadar betul bahwa banyak nelayan yang saat ini mengalami kredit macet karena pandemi Covid-19 kemarin. Ke depan, kredit macet ini akan kita hapus," kata Ganjar yang kemudian disambut sorak-sorai massa kampanye.

Selepas dari Kampung Nelayan, Ganjar hadir di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang. Di acara kampanye terbuka yang dirangkai dalam tema Hajatan Rakyat itu, ikut memeriahkan antara lain kelompok musik SLANK dan musisi asal Sumut seperti Novita Dewi Marpaung, Trio Nabasa, Duo Niur Mata, dan Ratu Ell.

Di Lapangan Astaka, Capres nomor urut 3 ini mengisahkan kunjungannya di Kampung Nelayan Kurnia. "Saya tadi mendarat langsung datang ke Kampung nelayan bertemu para nelayan dan mereka bercerita kondisinya. Ada yang disampaikan kepada saya, satu terkait bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan nasib yang lebih baik karena yang lain agak mundur," ujar Ganjar pada acara tersebut, di Lapangan Astaka Kota Medan, Minggu.

Dalam dialog tersebut, kata dia, ada sejumlah nelayan yang menginginkan komoditas di Sumut seperti ikan teri medan dapat diekspor ke berbagai negara.

"Bahwa mereka butuh bantuan bahwa ada produk yang luar biasa, yaitu teri medan. Itu makanan paling enak, kesukaan saya. Mereka berharap ini akan bisa dikembangkan tidak hanya skala nasional, tapi sampai ekspor, sesuatu yang menjadi harapan, artinya pendampingan terhadap mereka penting," kata Ganjar.

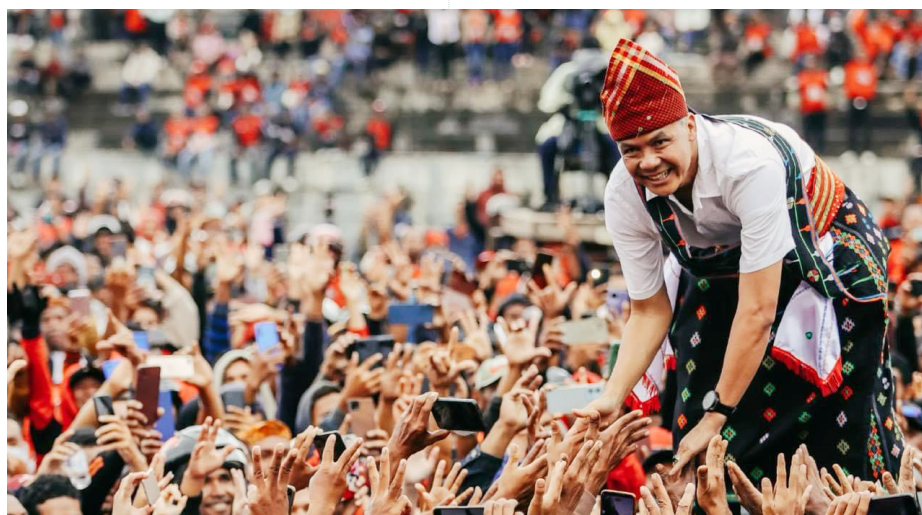
Selain itu, dalam kampanye di Med-

an, Ganjar Pranowo juga melakukan dialog bersama para petani sawit, sama hal seperti pertemuan dengan para nelayan, para petani sawit juga meminta untuk diperhatikan.

"Ya, saya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para petani sa-

Presiden 2024 sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Indonesia.

"Ganjar dan Mahfud meminta doa restu dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara, bersama-sama kita menjalankan pemerintahan



wit. Mereka berharap setidaknya ada tiga hal. Pertama mereka minta bantuan agar proses penanganan persoalan lahannya bisa diselesaikan. Yang kedua bagaimana memproteksi dari sisi harga khususnya dengan buahnya tandan yang sampai hari ini terkena goncangan. Yang ketiga tentu terkait dengan governance atau pengelolaannya tanpa kelola sawit agar kita bisa menjadi juara dunia," ujar Ganjar.

Oleh karena itu, Ganjar meminta masyarakat untuk berjuang bersama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil

yang baik," ujar Capres yang selepas dari Medan terbang ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Hajatan Rakyat di Wates Kulonprogo menjadi agenda berikutnya.

Dari kampanye di tanggal merah para Capres itu, terlihat strategi memanfaatkan kampanye di hari libur secara lebih intens dengan cakupan kampanye terbuka seluas mungkin sesuai dengan pembagian zonasi KPU. Tentu saja dengan target memikat suara lebih banyak dari pesaingnya masing-masing di wilayah terpadat pemilih pada Pemilu 2024. ●



SALING SILANG PRESIDEN (BOLEH) BERKAMPANYE

Beda pendapat soal Presiden boleh berkampanye memang tak terhindarkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jadi tempat mengadu.

Silang pendapat mengenai pernyataan Presiden dan menteri boleh kampanye asalkan memenuhi ketentuan ternyata sudah diantisipasi Bawaslu RI. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengemukakan, jika nantinya Presiden ikut kampanye, Bawaslu akan mengawasi Jokowi.

Bawaslu akan mengawasi apakah Jokowi melakukan hal-hal yang dilarang atau tidak. "Kami akan mengawasi jika Pak Presiden (Berkampanye) melakukan hal-hal yang dilarang," kata Bagja, Jumat, 26 Januari 2024.

Sebelumnya, ia mengemukakan hal senada. "Kami akan mengawasi jika Pak Presiden melakukan hal-hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Menggunakan fasilitas pemerintah," ujar Bagja di depan wartawan, Sabtu, 27 Januari 2024.

Ia menambahkan pernyataan Jokowi juga tidak bisa ditafsirkan akan mengajukan cuti. "Kita cek dulu ya (aturannya), apakah boleh kampanye atau tidak. Tapi

tentu ada penelusuran dulu. Sampai sekarang kan tidak ada. Pak Presiden sampai sekarang kan tidak mengajukan cuti,"

Bagja pun mengemukakan pernyataan Presiden secara menyeluruh beserta implikasinya. "Nanti kita juga lihat hubungan dengan kandidat yang lain. Presiden kan ngomongnya enggak clear itu, menurut saya sih tidak bisa diterjemahkan secara hukum bahwa yang bersangkutan mau mengajukan cuti ya. Bukan cuti. Mau berkampanye," ujarnya.

Terkait dengan itu, Bagja mengatakan Bawaslu perlu mengecek kembali Peraturan KPU mengenai kampanye. Bagja menyebut dalam tahapan kampanye ada beberapa larangan sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Kami sudah ngirim surat ke Pak Presiden untuk kemudian dalam melakukan hal apapun juga yang berkaitan dengan sekarang masa tahapan kampanye, maka

ada beberapa larangan dalam Undang-Undang 7 (2017)," ujarnya.

Menurut Bagja, Bawaslu mengingatkan dan memberikan imbauan kepada Pak Presiden. "Untuk menteri-menterinya yang ada pada kewenangan beliau, juga tindakan-tindakan ke depan dalam kampanye," imbuh dia.

Malah Bagja menjelaskan, Bawaslu sudah menyampaikan imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya. "(Imbauan tertulis) untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah (dikirim)," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. "Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, selain berperan sebagai pejabat publik, Presiden dan Menteri juga berperan sebagai politisi. "Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ungkapnya.

Selanjutnya, sambil membawa kertas berukuran besar, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2024, Jokowi menjelaskan bahwa pernyataannya di Pangkalan TNI AU Halim itu adalah untuk menjawab pernyataan dari awak media.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya

sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukkan, UU no 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU



Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana.

Pemilu. Jangan ditarik ke mana-mana," ungkap Jokowi.

Selain itu, bekas gubernur DKI Jakarta ini juga menjelaskan di dalam pasal 281 tercantum bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali yang menyangkut masalah pengamanan.

"Sudah jelas semuanya kok. Jadi sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya," tandasnya.

Sedangkan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpendapat dapat terjadi kesalahan menafsirkan Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu. Pasal ini memuat norma mengenai presiden atau wakil presiden boleh berkampanye.

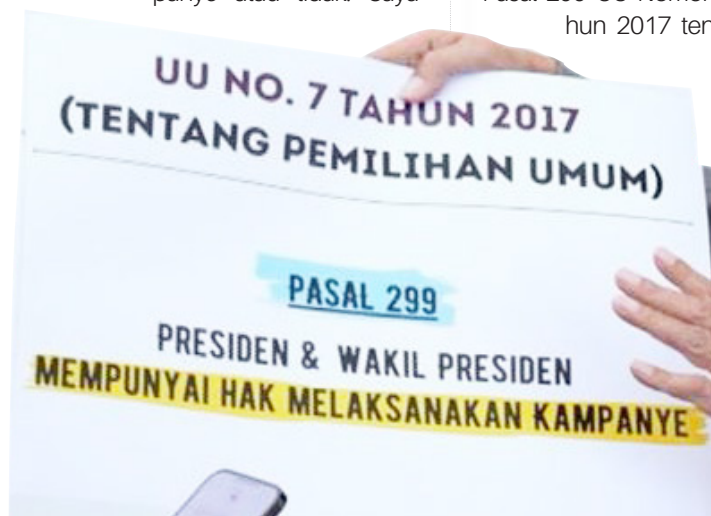
Namun, menurut Todung, maksud kampanye untuk presiden itu adalah dia yang kembali maju dalam pilpres untuk periode keduanya. "Dalam konteks ini saya memahami pasal itu kalau presiden itu sebagai incumbent maju lagi untuk pemilihan berikutnya, running for the second term," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.

"Nah dalam konteks ini Presiden Jokowi tidak bisa lagi ikut dalam kontestasi politik, dia tidak running dalam for the second term ya, jadi tidak ada periode ketiga," sambungnya.

Dalam Pasal 299 Ayat 1 UU Pemilu dijelaskan, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Selanjutnya dalam Ayat 2, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Kemudian dalam Ayat 3, pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye. Apabila yang bersangkutan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden; anggota tim kampanye; atau pelaksana kampanye yang

s u -



dah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dia (Jokowi) seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, potensi conflict of interest, potensi benturan kepentingan akan sangat telanjang dan kasat mata," ujar Todung.

Di samping itu, ia juga mengingatkan UUD 1945 kepada Jokowi. Di dalamnya menjelaskan, presiden sebagai kepala negara harus berada di atas semua kelompok, golongan, suku, agama, dan partai politik. "Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya

pok, golongan, suku, agama, dan partai politik.

"Ketika seseorang dipilih sebagai presiden, maka kesetiaannya menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membedakan mereka. Ini saya kasih satu hal yang sangat prinsipil yang harus dimiliki, karena itu melekat pada diri presiden dan kepala negara," ungkap Todung.

Nah, pernyataan Presiden itu sempat memicu gagasan untuk menjadi bahan pengaduan ke Bawaslu. Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Ari Yusuf Amir menyatakan bakal melaporkan Jokowi ke Bawaslu buntut pernyataan presiden

tentunya akan membuat dampak yang tidak baik bagi stabilitas politik kita," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 25 Januari 2024.

Namun, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan telah memberi perintah kepada Tim Nasional Anies-Muhammad Iskandar (Timnas AMIN) untuk mencabut laporan terhadap Presiden ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Enggak-enggak, dicabut itu. Saya sudah perintahkan, tidak ada [pelaporan], tidak ada," katanya usai berkampanye di Ternate, Maluku Utara, Jumat, 26 Januari 2024.

Ketika ditanya perihal alasan perintah pencabutan laporan itu, Anies hanya mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengimbau agar pihaknya berfokus pada kemenangan di Pilpres 2024, ketimbang mempermasalahkan pernyataan Jokowi.

Mengenai alasan membatalkan pelaporan, Anies menyatakan pengaduan itu tidak diperlukan. "Tidak perlu, buat apa? Biarlah, kami akan konsentrasi kepada menyampaikan gagasan perubahan, dan saya sudah sampaikan kemarin bahwa tidak ada laporan apa pun ke pihak lain," tandasnya.

"Ya sudah, kita konsentrasi pada kemenangan, kita konsentrasi pada pesan perubahan," kata dia.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan akan melaporkan pihak yang mengganggu keamanan pribadi. Pelaporan, kata dia, akan dilihat kasus per kasus.

"Tentu ada kasus per kasus. Ini kan (pernyataan Jokowi presiden boleh kampanye) enggak ada urusannya sama saya, ini urusan bernegara," ujarnya.

Nah, apakah Presiden Jokowi memang berniat kampanye? Ia menyatakan, sudah pernah diminta salah satu putranya, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menjadi salah satu partai nonparlemen, belum memiliki kursi di DPR.

"Oh iya, saya sudah diajak bolak-balik (oleh Kaesang). Tapi sekali lagi, saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, Undang-Undang Pemilu saja, (kok) sudah ramai ya," kata Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. ●



menjadi kesetiaan terhadap negara, terhadap rakyat, tanpa membedakan mereka. Ini saya kasih satu hal yang sangat prinsipil yang harus dimiliki, karena itu melekat pada diri presiden dan kepala negara," ujar Todung.

Tambahan pula, Todung juga mengingatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kepada Jokowi. Di dalamnya menjelaskan, presiden sebagai kepala negara harus berada di atas semua kelom-

boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon dalam pemilu.

Ari menyesalkan pernyataan Jokowi sebagai figur presiden yang seharusnya menjaga stabilitas politik hingga akar rumput, terutama di tengah tensi Pemilu 2024 yang kian memanas. Dia mengatakan telah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi itu ke Bawaslu agar kemudian ditindaklanjuti. "Dengan pernyataan terang-terangan seperti itu



BAGAIMANA BAWASLU (JABAR) BEKERJA

Apa yang dapat diharapkan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan kampanye? Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat menjadi contoh kasusnya.

Awalnya, salah satu pemantau Pemilu yang terakreditasi nasional di Bawaslu RI, Deep Indonesia, menerima laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang oleh Ketua Tim Kampanye Daerah pasangan nomor urut 2 yang dijabat oleh Ridwan Kamil, politisi Partai Golkar yang juga bekas Gubernur Jawa Barat.

Deep Indonesia menerima sebuah bukti video berdurasi 1 menit 37 detik, serta 11 menit full. Dalam video tersebut, terlihat indikasi Ridwan Kamil menyawer (menebar) uang di atas panggung saat mengisi acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada 20 Januari 2024.

Selanjutnya Deep Indonesia mengkaji video tersebut serta meneruskan laporan ini ke Bawaslu Jabar. Kelanjutannya, Bawaslu memanggil Ridwan Kamil untuk diminta penjelasan atau klarifikasi.

Kang Emil, nama ringkas Ridwan Kamil, pun memenuhi panggilan Bawaslu Jawa Barat untuk diminta klarifikasi terkait laporan dugaan politik uang yang diajukan DEEP Indonesia.

Klarifikasi Kang Emil berlangsung di Kantor Bawaslu Jabar, Senin, 29 Januari 2024.

Tiba sekitar pukul 15.00 WIB, Ridwan Kamil dimintai klarifikasi selama hampir dua jam lebih. Usai klarifikasi, Emil malah memberi apresiasi kepada Bawaslu.

"Saya apresiasi tugas Bawaslu Jabar. Sesuai tupoksinya memastikan penyelenggaraan Pemilu ini berjalan dengan baik, sehingga laporan-laporan jangan sepihak, makanya saya senang ke sini karena bisa mengklarifikasi," ucap Ridwan Kamil kepada wartawan.

Menurut dia, apa yang dilakukannya dapat menjadi contoh dalam menghadapi persoalan terkait Pemilu dan Pilpres 2024. "Saya ke sini juga memberi contoh pada semua warga negara harus taat pada hukum aturan main," ujarnya.

Kang Emil menjelaskan, tak banyak yang dia klarifikasi di Kantor Bawaslu Jabar. Toh ia mengakui, klarifikasinya terkait dengan kehadirannya di acara Jambore BPD Kabupaten Tasikmalaya dan juga potongan video yang jadi alat bukti pelaporan yang dilakukan DEEP Indonesia.

"Saya teh (itu) undangan (di acara itu), semua disangkakan kalau kita penyelenggara. Kalau kitanya penyelenggara, mengundang elemen yang dilarang itu jadi masalah, kalo kita

kan tamu," ungkap Kang Emil.

Menurut dia, status sebagai tamu berbeda dengan penyelenggara. "Makanya saya senang mudah-mudahan clear tidak usah dipersepsi macam-macam. Apresiasi ke Bawaslu, saya taat sebagai warga negara yang taat hukum, tidak ada substansi pelanggaran," pungkasnya.

Sedangkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri mengungkapkan, lembaga mengajukan 30 pertanyaan kepada Ridwan Kamil dalam proses klarifikasi itu.

"Tadi dari Bawaslu menyampaikan kurang lebih 30 pertanyaan yang berkaitan dengan substansi klarifikasi dimana kita menanyakan berkaitan dengan fakta dan kegiatan yang ada di lokasi, dan beliau menyampaikan klarifikasi itu dan sudah menuangkan di berita acara," ucap Syaiful.

Menurut dia, Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor dan lima orang saksi. Kemudian, Bawaslu bakal memutuskan perihal perkara ini secepatnya.

"Setelah ini akan evaluasi apakah sudah cukup pemeriksaan atau masih membutuhkan keterangan yang lain, karena kita memiliki waktu 7+7 (hari) dan di minggu ini kita akan selesaikan perkara ini," ujarnya.

Jadi, simpulan akhir Bawaslu masih perlu waktu. Ya harus menunggu. ●

KEMISKINAN, KORUPSI, DAN BANTUAN SOSIAL

Oleh: Hardius Usman
Guru Besar Politeknik Statistika STIS

Pada setiap pemilu, kemiskinan selalu menjadi isu primadona. Janji-janji heroik para kontestan berku-mandang dengan lantang.

Dalam pemilu kali ini, semua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) juga tidak ketinggalan menjadikan upaya mengatasi kemiskinan sebagai program prioritas.

Pasangan nomor urut 01 menargetkan akan menurunkan tingkat kemiskinan hingga menjadi 4-5 persen tahun 2029 dan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen tahun 2026. Pasangan nomor urut 02 menetapkan target 6 persen tahun 2029 dan kemiskinan ekstrem hilang dari Bumi Pertiwi tahun 2026.

Pasangan nomor urut 03 paling berani dengan target tingkat kemiskinan 2,5 persen dan target kemiskinan ekstrem sama dengan pasangan yang lain.

Khusus tingkat kemiskinan ekstrem, menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada Maret 2023 telah mencapai 1,12 persen, menurun sebesar 0,62 persen poin dibandingkan dengan September 2022. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem memang sangat cepat, setidaknya sejak tahun 2021, ketika Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada akhir tahun 2024. Dengan tren penurunan yang sangat cepat, seharusnya target tersebut dapat tercapai.

Sayangnya pada akhir tahun 2023, pemerintah justru menyatakan bahwa kemiskinan ekstrem nol persen sulit tercapai. Cukup mengherankan pesimisme pemerintah ini karena tingkat kemiskinan ekstrem yang sebesar 1,12 persen adalah posisi bulan Maret 2023, sehingga masih ada waktu 1,5 tahun sampai pemerintahan ini berakhir untuk mencapai target tersebut.

Tambah mengherankan ketika Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa diperkirakan kemiskinan ekstrem hanya turun hingga 0,5-0,7 persen pada akhir 2024.

Keheranan semakin meningkat ketika semua capres-cawapres sepakat untuk menargetkan terhapusnya kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2026.

Kok jadi melambat? Padahal, tantangan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem saat ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan saat pandemi Covid-19.

Berbeda dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang sangat tajam, tingkat kemiskinan bergerak sangat lambat. Setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023), penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahun.

Kalau tren penurunan kemiskinan masih seperti ini, tentu tidak satu pun capres dan cawapres yang akan mampu mencapai targetnya. Dengan kata lain, kalau yang dilakukan pemerintahan berikutnya masih sama, maka tak akan terjadi percepatan penurunan kemiskinan, yang berarti kaum miskin masih harus bersabar menunggu uluran tangan pemerintah memenuhi tanggung jawabnya.

Indonesia telah mempunyai sejarah panjang dalam upaya penghapusan kemiskinan. Sangat logis jika program kerja pemerintah, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, dari waktu ke waktu makin baik. Dalam pelaksanaannya, dengan makin membaiknya perekonomian negara, dukungan anggaran pun sangat besar setiap tahun, mencapai Rp500 triliun. Namun, mengapa penurunan kemiskinan relatif lambat?

Kalau kita menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, seharusnya tahun 2029 kemiskinan Indonesia telah tuntas. Garis kemiskinan negara maju sekitar tiga kali lipat dibandingkan dengan standar yang digunakan Indonesia sekarang.

Jika garis kemiskinan tersebut digunakan, menurut Bank Dunia, kemiskinan Indonesia mencapai 61,7 persen. Jika tahun 2029 kemiskinan tidak terentaskan, apakah mungkin dalam 15 tahun berikutnya kita patut menjadi negara maju? Sungguh sebuah ironi jika kita mendapat predikat sebagai negara maju, tetapi juga menyandang predikat sebagai negara miskin.

Korupsi

"Corruption, by itself, does not produce poverty" (Chetwynd, et al, 2003). Menurut Economic Model, korupsi baru dapat meningkatkan kemiskinan jika menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan pendapatan, dan menurut Governance Model jika kapasitas tata kelola (pemerintah) tereduksi.

Jadi tidak mengherankan, ketika



uang negara dikorupsi timbal-balik, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, kemiskinan masih dapat diturunkan. Betapa tangguh dan kuatnya Ibu Pertiwi menanggung kejahatan korupsi.

Pemerintahan terdahulu yang didukung oleh pakar di berbagai bidang tentu telah mendeteksi akar permasalahan kemiskinan secara holistik. Sayangnya, konsep dan program kerja yang dibuat belum mampu menghapuskan kemiskinan sampai saat ini. Penurunan memang terjadi, tetapi relatif lambat. Oleh karena itu, tidak salah jika diduga bahwa permasalahan mendasar terletak pada pelaksanaan program.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan praktik oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu (Kompas.com, 10 Mei 2023).

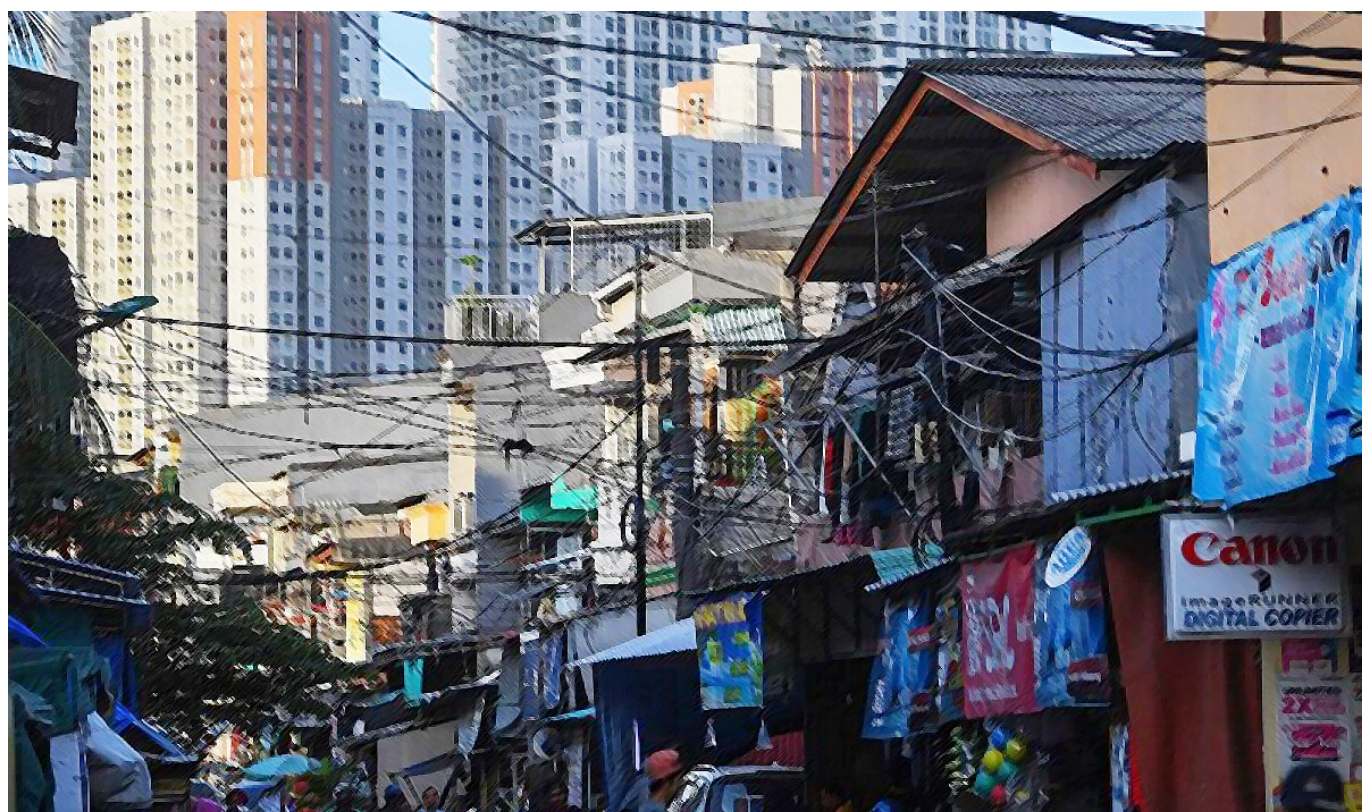
Manipulasi data itu dilakukan oknum dengan memasukkan nama-nama pendukung atau bahkan tim suksesnya ke dalam data penerima bansos. Bagaimana angka kemiskinan akan

panjang. Kondisi ini tentu berdampak pada semakin kecilnya peluang orang miskin untuk keluar dari kemiskinan walau telah berganti generasi.

Dalam hitungan rupiah, korupsi ini mungkin bernilai “sangat kecil” dibandingkan megakorupsi yang pernah dilakukan para pejabat, tetapi berdampak langsung terhadap pencapaian program kemiskinan itu sendiri. Patut diduga inilah yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan relatif lambat.

Pemda adalah PNS yang seharusnya bersikap netral berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Jangankan menjadi pendukung kontestan pemilu, “salah gaya” dalam berfoto saja bisa mendapat masalah. Akan tetapi, mengapa aturan tersebut dilanggar? Semua bersumber pada sistem politik yang kita pilih.

Manipulasi data penerima bansos tentu tidak dapat dilakukan oleh PNS “biasa”. Harus ada kekuatan dan kekuasaan un-



turun cepat jika penerima bansos adalah bukan mereka yang benar-benar miskin?

Praktik koruptif tersebut memang tidak memenuhi Economic Model atau Governance Model, sehingga tidak menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan, tetapi mencegah orang miskin untuk menerima bansos sedikit banyaknya memengaruhi penurunan kemiskinan.

Alasannya, bansos yang diterima penduduk miskin menyebabkan meningkatnya konsumsi, sehingga sangat mungkin bansos mendorong nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga melewati garis kemiskinan.

Lebih lanjut, perilaku buruk ini juga mungkin dilakukan pada program-program kemiskinan jangka menengah dan jangka

tuk melakukannya. Di level provinsi atau kabupaten khususnya, pejabat karier (PNS) mempunyai risiko kehilangan jabatan jika tidak mendukung pihak yang menang.

Sikap netral dapat dipandang tidak mempunyai kontribusi dalam kemenangan, bahkan dapat dicurigai berpihak kepada “lawan”. Karier mereka tentu terancam sebab “sang pemenang” mempunyai hak untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat tersebut.

Sistem politik mungkin dapat dijadikan pembenaran, tetapi perbuatan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Jika capres-cawapres memang ingin mempercepat terjadinya penurunan kemiskinan, maka berjanjilah untuk menghapuskan perilaku koruptif tersebut. ●



REAKSI CEPAT UNTUK KORBAN BANJIR

Curah hujan yang tinggi membuat sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami banjir. Luasnya wilayah terdampak bencana alam membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bereaksi cepat dengan meninjau sejumlah titik lokasi banjir sekaligus menyalurkan bantuan langsung ke warga.

Agus Fatoni ingin melihat dari dekat kondisi masyarakat terdampak banjir di Desa Danau Rata, Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim.

Di hadapan masyarakat, Fatoni menyampaikan rasa simpatinya atas bencana banjir yang merendam pemukiman warga. Selain itu, dia mengecek dan memastikan kelengkapan posko banjir serta menyerahkan sejumlah bantuan, di antaranya logistik dan obat-obatan guna meringankan beban masyarakat.

"Maka kami datang untuk bisa bersilaturahmi, hari ini kami membagikan bantuan hampir 8 ton beras, kemudian sembako 570 paket, matras ada 50 lembar, makanan siap saji 70 paket, biskuit dan bahan medis, selimut serta makanan siap saji yang lainnya ada 500 paket," ucap Fatoni.

Fatoni menyebut bantuan yang diserahkan sebagian sudah disalurkan sebelumnya merupakan bentuk

kepedulian nyata dari Pemerintah. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan ditengah bencana banjir.

Untuk wilayah Kabupaten Muara Enim terdapat 10 kecamatan terdampak banjir yakni Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Empat Petulai Danguku, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak Enam, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida.

Dari 10 kecamatan tersebut terdiri dari 73 desa, dengan total 15.270 KK yang terdampak. Kemudian terdapat 2 kecamatan yang mengalami tanah longsor, yaitu Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Semende Darat Tengah dengan 4 titik longsor.

Dampak banjir tersebut mengakibatkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan, di antaranya tiga unit jem-



batan rusak, yaitu jembatan gantung putus di Kecamatan Belimbing dan di Kecamatan Empat Petulai Dangku sedangkan satu unit jembatan beton rusak parah di Kecamatan Benakat termasuk satu unit rumah roboh di Desa Pagar Dewa Kecamatan Benakat.

Usai meninjau banjir di Kabupaten Muara Enim, Agus Fatoni kemudian meninjau lokasi banjir yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Fatoni juga secara langsung menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat terdampak banjir. Di antaranya, 7.750 kilogram beras, 570 paket sembako, 50 lembar matras, 70 paket makanan siap saji, 500 paket biskuit, peralatan medis dan obat-obatan.

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kami hadir di sini untuk melihat lebih dekat keadaan yang ada di sini. Apa yang terjadi di Muratara ini ikut kami rasakan," ucap Fatoni.

Sejak awal Fatoni juga bergerak cepat dalam penanganan banjir dengan menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan untuk segera mengirimkan bantuan ke Muratara.

"Kita harus siap kapan saja, ketika bencana datang kita perlu antisipasi sejak awal dan harus siap menghadapi ketika sudah terjadi bencana. Ini akan kita lakukan terus secara gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota," terangnya.

Sebagai informasi terdapat enam Kecamatan di Muratara yang terdampak banjir, yaitu Kecamatan Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karang Jaya, Karang Dapo, Rawas Ilir dan Rupit. Sebanyak 57 desa terdampak banjir tersebut yang mengakibatkan 6 jembatan terputus. Namun, Devi menegaskan saat ini kondisi banjir di Kabupaten Muratara kian hari semakin surut.

Agus Fatoni juga meninjau sekaligus memberikan bantuan ke lokasi banjir di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), tepatnya Desa Teluk Kijing 1 dan Tanjung Agung Barat. Bahkan mengantarkan langsung bantuan tersebut ke

rumah warga menggunakan perahu karet.

Bantuan ini terdiri dari 2.750 kilogram beras, 670 paket sembako, 50 lembar matras, 520 paket makanan siap saji, 200 lembar selimut, 100 tenda gulung, 100 paket baju bayi, 180 paket baju anak, 100 kotak biskuit dan peralatan medis juga obat-obatan.

Selain itu, bantuan lainnya berupa

Apriyadi menyebut terdapat 9 dari 15 Kecamatan di Muba terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi hingga 2 meter lebih.

"Jumlah yang terdampak banjir 20.262 rumah/KK dan sepekan ini lebih dari 500 KK tidak bisa beraktivitas. Untuk itu kami buka posko," jelasnya.

Terima Bantuan dari Deputi BNPB



50 dus mie instan, 500 paket lauk pauk siap saji, 100 liter minyak goreng, 250 paket pembalut wanita dan kebutuhan lain untuk ibu hamil dan balita.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa diberikan secara terus-menerus untuk bersama-sama mengatasi dan menangani serta meringankan beban masyarakat terdampak banjir," jelas Fatoni.

Pj Bupati Muba Apriyadi mewakili masyarakat Muba menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni kepada masyarakat.

Dapat banjir di Sumsel menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan menyalurkan bantuan ke Pemprov Sumsel yang diterima langsung Pj Gubernur Agus Fatoni.

Bantuan tersebut meliputi bantuan operasional senilai Rp 1,85 miliar, 5.500 pcs makanan siap saji, 5.500 lembar matras, 5.500 lembar selimut, 5.500 paket hygiene kit, 5.500 botol sabun cair, 11 unit tenda pengungsi dan 2.750 paket sembako. Bantuan ini akan diberikan pada Provinsi serta 10 Kabupaten/Kota di Sumsel. ●

AJAK PEMUDA MEMILIH CERDAS DAN SESUAI HATI

Menyambut pemilihan umum (Pemilu) 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengajak 17 ribu lebih pemilih pemula, khususnya siswa-siswi kelas XII SLTA se-Sumsel untuk menggunakan hak suaranya. Di Pemilu 2024 ini peran pemilih pemula sangat besar sehingga diminta untuk menggunakan hak suaranya secara cerdas dan sesuai hati nurani karena akan menentukan masa depan bangsa.

"Pesan saya gunakan hak pilih sebaik-baiknya karena kesan pertama kita memilih itulah yang tidak akan kita lupakan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya," kata Agus Fatoni.

Fatoni menegaskan, peran generasi muda sangat penting dalam memilih pemimpin untuk masa depan bangsa, negara dan daerah. Mengingat siswa-siswi kelas XII di Sumsel memiliki jumlah yang cukup besar yaitu 18,84% dari total pemilih di Sumsel.

"Pemilih di Sumsel ini 18,84 persen atau sebanyak 1.192.024 merupakan generasi Z atau pemilih pemula. Oleh karena itu adik-adik kalian sangat berperan dalam menentukan keberlangsungan bangsa kita satu suara dari kalian sangat berarti," ujarnya.

Fatoni juga mengingatkan para pemilih agar tidak golput dan terprovokasi terhadap berita bohong (hoax) yang akan menimbulkan konflik di masyarakat.

"Pada pemilihan pertama ini nanti kalian akan memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan di akhir tahun nanti ada pemilihan kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Untuk itu saya berharap adik-adik kalian tidak memilih golput, hindari

politik uang, jangan terpengaruh pada berita hoax dan ikut menyebarkan," jelas Fatoni.

Ia menegaskan untuk menjaga kondusifitas daerah selama tahun politik berlangsung. Dia juga berharap agar siswa-siswa SLTA dapat menjaga status zero konflik di Sumsel.

"Kita harus bisa menjadi contoh daerah yang sukseskan Pemilu, Pilkada dengan damai dan sukses komitmen ini kita harus jaga bersama jaga kondusifitas di Sumsel ini kita pertahankan zero konflik," ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala B a d a n

Kesbangpol Provinsi Sumsel H Alfajri Zabidi menyebut kegiatan ini menjadi salah satu upaya menyukseskan Pemilu dan Pilkada di Sumsel.

"Kegiatan kita hari ini kita laksanakan dengan menindaklanjuti program prioritas Penjabat Gubernur Sumsel yang ingin pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumsel berlangsung sukses dan damai," kata Alfajri.

Hati Kita Bicara

Agus Fatoni mengimbau pemilih pemula memilih pemimpin yang berkualitas pada Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Bagaimana cara memilih? Hati kita bicara, memilih pilihlah pemimpin yang berkualitas yang yakin akan membawa masa depan bangsa kita," ucap Fatoni.

Fatoni juga mengingatkan kepada



da pemilih pemula bahwa mereka tidak hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Melainkan, akan ada lima surat suara yang akan diberikan pada 14 Februari mendatang.

"Yang akan kita pilih banyak loh ya, ada Presiden dan Wapres, jangan lupa itu. Kedua, ada Anggota DPR RI, jadi nanti lembarannya banyak. Ketiga ada DPD RI, lembarannya juga banyak. Keempat ada DPR Provinsi dan terakhir lembar kelima ada DPR kabupaten/kota masing-masing daerah," jelas Fatoni.

"Jadi pada saat nanti masuk ke TPS kita akan dapat banyak kartu (surat suara), ya kita seperti main dengan santai tapi kita milihnya harus dengan serius. Kita buka kertas suaranya baru kita tusuk di situ. Jadi ada lima kertas," lanjutnya.

Fatoni mengimbau agar pemilih pemula sudah menentukan pilihannya sebelum datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Mulai dari sekarang dilihat-lihat ini siapa yang bakal kita pilih. Jangan nanti pada saat datang kita baru mikir nanti bingung karena banyak yang nggak kenal. Karena ada sebagian juga yang tidak pakai foto. Maka dari sekarang sudah mulai diputuskan, mulai dipikirkan sampai tanggal 14 Februari nanti," ucap Fatoni.

Fatoni mengajak pemilih pemula berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Tunjukkan cintamu pada negeri, datanglah pada TPS 14 Februari. Gunakan hak pilihmu cobos pemimpin masa depan kita," kata Fatoni dalam kegiatan 'Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Palembang' di The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, Fatoni juga mengingatkan agar pemilih pemula menggunakan momen pertama ini sebaik-baiknya. Dikarenakan kesan pertama ini tidak akan pernah terlupakan.

"Adek-adek ini lah kesan pertama memilih ini, ukir dalam sejarah, catat dalam sejarah bahwa adek-adek ini ikut dalam sejarah dan menentukan masa

depan bangsa kita," jelas Fatoni.

Sementara Pemimpin Redaksi detikcom sekaligus moderator acara Alfito Deanova menilai acara #DemiIndonesia di Kota Palembang menjadi yang terbesar dan teramai selama roadshow berlangsung di sejumlah kota. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme 2.000 lebih pemilih pemula se-Sumatera Selatan hadir langsung kegiatan tersebut.

Senada dengan Alfito, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi juga menilai antu-

dada saya. Kalian bernyanyi Indonesia raya sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Kita jaga Indonesia dan kita sama-sama dorong Indonesia dengan sinergi gotong royong untuk menuju Indonesia Maju," ucap Budi Arie.

Kemudian, Budi Arie juga menilai para pemilih pemula yang hadir langsung sangat cerdas juga kritis. Hal ini membuatnya optimis bahwa Indonesia akan dengan mudah mewujudkan cita-citanya menjadi negara maju mendatang.



siasme pemilih pemula yang hadir sangat luar biasa. Bahkan semangat dari mereka juga dapat dirasakan langsung olehnya.

"Palembang luar biasa, saya melihat antusiasme dari kalian. Tadi seperti yang diingatkan moderator Alfito kalian begitu bersemangat dan itu terasa di

"Kami kebetulan ke Pemprov Sumsel Kotamadya Palembang, kami lihat antusiasme para anak muda, pemilih pemula mereka sangat cerdas dan sangat kritis. Inilah yang membuat saya optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045," kata Budi Arie. ●



MASIFKAN GERAKAN PASAR MURAH SERENTAK HINGGA KE DAERAH

Guna menjaga laju inflasi di Sumatera Selatan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menegaskan pihaknya akan terus berupaya dalam pengendalian inflasi daerah. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait.

Tanpa penanganan yang serius inflasi tidak bisa dikendalikan sehingga butuh keseriusan semua pihak untuk melakukan pengendalian. Salah satu langkah efektif adalah dengan melakukan gerakan pasar murah dan melakukan penanaman kebutuhan bahan pokok di lingkungan masing-masing.

"Ini betul-betul serius dan ditangani, ini tanggung jawab bersama. Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat. Maka kita perlu penanganan yang sangat serius," kata Agus Fatoni.

Upaya-upaya tersebut di antara lain memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yaitu mengajak masyarakat untuk aktif dalam menanam sejumlah kebutuhan pokok seperti

cabai dan bawang merah di pekarangan rumah masing-masing. Selain itu, kegiatan Operasi Pasar Murah, Pangan Murah dan Toko Kebutuhan Pokok (KePo) juga terus dimasifkan.

"Saya kira, kita sepakat gerakan ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret, semoga upaya yang kita niatkan ini diridhoi Allah SWT," ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan dengan adanya Operasi Pasar Murah dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging dan lain-lain. Sebagai informasi, kegiatan Operasi Pasar Murah ini serentak diadakan pada hari Senin, Selasa dan Kamis setiap minggu di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Lebih jauh Fatoni mengatakan selanjutnya survey akan dilakukan di dua Kota se-Sumsel, yaitu Kota Palembang dan Lubuk Linggau serta dua kabupaten se-Sumsel, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.

"Jadi empat yang disurvei dan andilnya dari daerah lain. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan terus menerus kemudian saling melengkapi. Kita semua sudah melakukan, koordinasinya sudah sangat baik, mumpung ini masih tahun baru, kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan," ujar Fatoni.

Menurutnya, upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi masih sangat banyak. Oleh karena itu Fatoni meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja. Selanjutnya pro-

gram tersebut disinkronkan dengan program Stakeholder lainnya mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan vertikal lainnya agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel S.A Supriono menyebut, pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Ini dikarenakan inflasi dari 17 Kabupaten/ Kota secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan.

"Penanganan inflasi tidak hanya bersama-sama tapi secara parsial dan terkoordinasi," ujar dia.

Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak

Sebagai langkah cepat mengendalikan laju inflasi, Pemprov Sumsel menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) secara serentak di 17 kabupaten/kota se-Sumsel melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan (GPISS). Nantinya GPISS diluncurkan pada tanggal 29 Januari 2024.

Dalam gerakan ini Pemprov Sumsel bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD dan perbankan yang dikoordinir Bank Indonesia dalam merealisasikan GPISS. Nantinya, melalui Operasi Pasar Murah akan dijual berbagai bahan pangan dan pokok dengan harga jauh lebih murah dari pasaran mulai dari Rp 3 ribu hingga Rp 10 ribu/kg.

Sejumlah bahan pokok yang dijual dengan harga subsidi, di antaranya cabai merah dijual dengan harga Rp 24 ribu/kg, bawang merah Rp 10 ribu/kg, bawang putih Rp 20 ribu/kg, gula pasir Rp 13 ribu/kg, beras Rp 10 ribu/kg dan telur Rp 24 ribu/kg.

GPISS merupakan langkah konkret dari Pemprov Sumsel yang diinisiasi langsung oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni guna menekan laju inflasi, terutama di Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Diharapkan agar Kabupaten dan Kota diharapkannya segera berkolaborasi dengan BUMN dan BUMD yang ada di daerah masing-masing.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel Basyaruddin Akhmad menjelaskan, GPISS ini akan mendapat sokongan dari BUMN dan BUMD di Sumsel.

"Untuk PT Bukit Asam itu bisa membantu Tanjung Enim dan Muara Enim kemarin sudah kita sampaikan. Se-

men Baturaja itu bisa membantu OKU. Kemudian yang paling banyak di Kota Palembang ada Pusri ada Pertamina dan lain sebagainya dan kemarin kita sudah sampaikan juga Bank Sumsel Babel yang memiliki cabang di 17 kabupaten/ kota juga akan menggelar pasar murah," ucap Basyaruddin. •

SERENTAK
OPERASI PASAR MURAH
SE-SUMSEL

Setiap Hari:
Senin, Selasa & Kamis
Pukul: 08:00 s/d Selesai

- Samping Kantor Korem Gapo KM5 Palembang
- Kantor Camat Ilir Timur II Palembang
- Kabupaten dan Kota Se-Sumsel

Cabai Merah	Rp. 24.000,- /Kg
Bawang Merah	Rp. 10.000,- /Kg
Bawang Putih	Rp. 20.000,- /Kg
Gula	Rp. 13.000,- /Kg
Beras	Rp. 10.000,- /Kg
Telur	Rp. 24.000,- /Kg

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si **Ny. TYAS A. FATONI, S.Sos., M.Si**
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN Pj. KETUA TP.PKK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Logos: PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, BULOG, #bangga melayani bangsa, BerAKHLAK, BANK SUMSEL BABEL, BANK BPR SUMSEL, tsm, SUMSEL ENERGI, TPID.



GELAR BEDAH RUMAH SERENTAK

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan terus dilakukan Penjabat Gubernur, Agus Fatoni. Salah satunya dengan melaksanakan program bedah rumah tak layak huni secara serentak se-Sumsel.

Hal ini merupakan upaya nyata dari pemerintah daerah dalam mempercepat kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Kita akan mencanangkan bedah rumah serentak seluruh Sumatera Selatan. Nanti Pak Walikota boleh bersama-sama Kepala OPD Kota Palembang, Kepala OPD di Sumatera Selatan, Kepala OPD di Kabupaten dan kota Se-Sumsel melakukan bedah rumah, satu Kepala OPD satu rumah yang dibedah," ucap Fatoni pada pemberian bantuan sosial bagi anak stunting se-Kota Palembang yang dilaksanakan di halaman Rumah Dinas Walikota Palembang, Sumatera Selatan.

Fatoni mengatakan rumah-rumah masyarakat yang akan dibedah meru-

pakan rumah dalam kondisi tidak layak. Untuk itu ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mendata masyarakat yang dinilai berhak menerima untuk segera dilakukan bedah rumah.

"Bapak, ibu mulailah memilih rumah-rumah yang akan dibedah, rumah-rumah yang kurang sehat dipersiapkan untuk dibedah sehingga penanganan kemiskinan ekstrem dan sekaligus stunting ini tetap kita lakukan," imbuhnya.

Dia menjelaskan, bagian rumah masyarakat penerima yang akan dibedah meliputi bagian atap, lantai dan dinding.

"Bagian rumah yang dilakukan perbaikan adalah atap, lantai dan dinding. Atap, lantai dan dinding harus kita per-



baik, sehingga rumah-rumah menjadi sehat dan layak huni,” ujar Fatoni.

Dia menegaskan dalam penanganan masalah sosial, seperti stunting dan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi dan terorganisir dengan baik melibatkan seluruh pihak, termasuk BUMD, BUMN dengan tepat sasaran by name by address.

“Sehingga target yang hendak dicapai angka stunting turun 14 persen di tahun 2024 tercapai sesuai dengan target pemerintah pusat,” tandasnya.

Sinergikan Penanganan Program Prioritas

Sejumlah capaian telah dicapai oleh Pemprov Sumsel selama tahun 2023. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,08 persen (yoy), angka tersebut lebih besar jika dibandingkan nasional sebesar 4,94 persen.

“Kekompakan dan kerja keras telah kita tunjukkan bersama, kita patut bersyukur capaian Sumsel cukup baik di tahun-tahun belakangan, kita harus jaga dan pertahankan capaian ini bahkan harus kita tingkatkan,” ucap Agus Fatoni saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumsel.

Selain itu, angka inflasi di Sumsel juga cukup terkendali bahkan pada bulan Desember 2023 hanya sebesar, 3,17 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan di Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 11,78 persen.

“Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Sumsel pada Maret 2023 menurun menjadi 1,29 persen dari September 2022 sebesar 3,9 persen atau menurun atau turun 1,89 persen,” tambahnya.

Selanjutnya, terkait dengan prevalensi stunting menurut Sumsel tahun 2023 menurun menjadi 18,6 persen dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 24,80 persen. Prestasi tersebut merupakan penurunan stunting tercepat di pulau Sumatera.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,18 poin masuk dalam kategori tinggi dan telah mencapai target yaitu sebesar 3,09 poin. Semua capaian dan

raihan yang diperoleh ini semua berkat kerjasama kita, kerja kekompakan dan juga dukungan dari semua pihak,” jelasnya.

Fatoni juga mengimbau Forkopimda untuk bekerjasama menyukseskan program prioritas yang telah diren-

tan ekonomi sektor unggulan, percepatan realisasi proyek strategis di Sumsel termasuk penanganan bencana tahunan yang kerap terjadi di wilayah Sumsel.

“Untuk itu, kita perlu tangani bersama yang pertama adalah penanganan



canakan pada tahun 2024. Di antaranya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, penanganan stunting, penanganan inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrem.

Kemudian, Fatoni juga meminta agar reformasi birokrasi dan ketentraman serta ketertiban umum perlu ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kualitas UMKM berbasis digital serta peningka-

bencana-bencana setiap tahun selalu terjadi di Provinsi kita, di akhir tahun pada saat musim panas akan ada kebakaran hutan namun disisi lain pada saat hujan ada longsor dan banjir ini perlu kita tangani bersama. Pengendalian inflasi juga masih menjadi PR bersama-sama, kita penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” tandasnya. ●



RAIH PREDIKAT ZONA HIJAU KATEGORI A PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil meraih penghargaan dari Ombudsman RI sebagai predikat zona hijau kategori A dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam acara kegiatan penyerahan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, kepada provinsi dan 17 kabupaten/kota Se-Sumsel di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan.

Predikat yang diterima Pemprov Sumsel ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih Nomor 418 Tahun 2023 yang mencantumkan Pemerintah Provinsi Sumsel mampu meraih

zona hijau dengan nilai 85,25 poin kualitas tinggi.

Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengatakan penghargaan yang diberikan Ombudsman RI merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Fatoni juga mengucapkan syukur atas penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman RI.

budsman RI.

"Tidak hanya berupa penghargaan saja, bagi Pemerintah Daerah yang kurang dalam hal pelayanan publik juga dapat diberikan punishment, sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik."



lik,” ucap Fatoni.

“Hari ini kita bersyukur semuanya mendapatkan penghargaan dan penilaian yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa memperbaiki kualitas pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat,” sambungnya.

Melalui penghargaan ini diharapkan dapat menjadi spirit untuk perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu dia meminta agar Ombudsman terus memberikan pendampingan supaya kualitas layanan publik di Sumsel terus mengalami perbaikan dan kemajuan dari berbagai sisi pelayanan.

“Kami mohon juga kepada Ombudsman untuk terus memberikan pendampingan. Mohon kami terus diarahkan apa yang harus kami lakukan, sehingga pelayanan publik kita semakin baik, kita semua punya tekad yang sama, kita ingin bertugas dengan sukses, kita ingin bertugas dengan sebaik-baiknya dan kita ingin apapun yang kita lakukan membawa manfaat bagi masyarakat membawa kemajuan bagi daerah,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan setidaknya ada empat dimensi yang menjadi indikator penilaian yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan pengaduan.

Khusus untuk pelayanan publik di Provinsi Sumsel menurutnya, hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian masing-masing zonasi hijau dengan kategori kualitas tertinggi dan tinggi

Kemudian zonasi kuning dengan kategori kualitas sedang dan zonasi merah dengan kategori kualitas rendah dan terendah.

Sebagian besar di Provinsi Sumsel sudah di zona hijau, sementara bagi yang zona kuning, itu merupakan dorongan untuk di tahun depan lebih meningkatkan pelayanan. Memenuhi standar-standar yang sudah diatur di dalamnya.

“Mudah-mudahan nantinya semua kabupaten/kota nanti untuk bisa

menjadi zona hijau apalagi untuk Pemprov Sumsel sekarang sudah di zona hijau ya, jadi mudah-mudahan semuanya akan menjadi hijau,” ucapnya.

Sebagai informasi, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 kepada Pemprov Sumsel dan 17 kabupaten/ kota se-Sumsel yang masuk zona hijau, antara lain Pemkab Musi Rawas dengan nilai 94,95 mendapat kategori A dengan opini kualitas tertinggi.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nilai 94,39 mendapat kategori A dengan opini kualitas tertinggi.

Pemkot Palembang 93,75 meraih kategori A dengan opini kualitas tertinggi, Pemkab Musi Banyuasin dengan nilai 91,72 mendapat kategori A

dengan opini kualitas tertinggi.

Pemkab Ogan Ilir 90,29 mendapat kategori A dengan opini kualitas tertinggi, Pemkab Musi Rawas Utara 88,62 meraih kategori A dengan opini kualitas tertinggi. Pemkab Muara Enim 88,51 mendapat kategori A dengan opini kualitas tertinggi.

Kemudian Pemkot Lubuklinggau 86,2 meraih kategori B zona hijau kualitas tinggi, Pemkab Ogan Komering Ilir (OKI) 85,81 mendapat kategori B zona hijau kualitas tinggi. Pemkab Banyuasin 85,40 mendapat kategori B zona hijau kualitas tinggi.

Pemkab Ogan Komering Ulu 84,85 meraih kategori B zona hijau kualitas tinggi. Pemkot Prabumulih 83,54 kategori B zona hijau kualitas tinggi. Pemkab Lahat 80,58 kategori B zona hijau kualitas tinggi. ●





KALTIM SIAP DUKUNG PEMILU DAMAI

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan kesiapannya mendukung Pemilu Damai 2024. Akmal memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu di wilayah yang dipimpinnya berjalan dengan lancar.

"Kami di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentunya berterima kasih sekali langkah-langkah sosialisasi. Ini adalah tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 434 mengatakan bahwasanya pemerintah wajib melakukan fasilitasi penganggaran pemilu," kata Akmal dalam talkshow #DemIndonesia Cerdas Memilih yang digelar di Hotel Novotel, Balikpapan, Senin, 29 Januari 2024.

Akmal menjelaskan sejumlah kegiatan sudah dilakukan Pemprov Kaltim. Kegiatan yang dikerjasamakan dengan unsur Forkopimda Kaltim itu untuk memastikan kelancaran Pemilu 2024.

"Nah apa yang sudah kami dilakukan? Pastinya dukungan terkait dengan data

sudah kami lakukan, dana NPHD sudah selesai, terkait juga dengan partisipasi pemilih," ujarnya.

Menurut Akmal, pihaknya intens turun ke lapangan bersama unsur Forkopimda melakukan pengecekan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mendorong angka partisipasi pemilih di Kaltim.

"Kaltim itu ada 3,9 juta penduduk dan 2.778.664 DPT pemilih. Mereka tersebar di 11.451 TPS. Kemarin kita sudah ke lapangan bersama forkopimda memastikan logistik sudah terdistribusi ke daerah," tutur Akmal.

Akmal mengaku sempat ada beberapa kendala logistik Pemilu 2024, seperti surat suara yang rusak. Namun, KPU sudah melakukan penggantian dan distribusi logistik dilakukan secara bertahap.

"Secara umum semua sudah berjalan

dengan baik dan sekali lagi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 434 pemerintah wajib memberikan dukungan bagi penyelenggara pemilu," tegasnya.

Akmal juga berharap partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 bisa mencapai 79 persen atau lebih tinggi dari pencapaian Pemilu 2019 sebesar 75 persen.

Saat meninjau kesiapan logistik Pemilu 2024 di gudang logistik KPU Kutai Timur, Rabu, 31 Januari 2024, Akmal mengajak semua pihak untuk membantu menyelesaikan pelaksanaan Pemilu 2024 dan meningkatkan partisipasi pemilih.

"Mudahnya partisipasi kita bisa lebih dari 79,5 persen," seru Akmal.

Menurut Akmal, sukses Pemilu bukan hanya kewajiban KPU, tapi semua komponen bangsa ini.

"Tentu sukses Pemilu bukan hanya tugas KPU. Tapi tugas kita semua. Mari kita bantu dan mudahkan masyarakat untuk datang memilih," tegas Akmal.

Akmal mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan di kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar.

"Saya sudah meninjau beberapa daerah. Saya lihat Kutai Timur paling siap. Memang Pak Bupati hebat," puji Akmal saat melakukan peninjauan.

Dia juga minta agar Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman terus memberi dukungan kepada KPU Kutim.

Akmal juga berterima kasih atas dukungan semua jajaran Forkopimda Kutim yang telah membantu proses pemilu di daerah ini. Secara umum logistik pemilu sudah terdistribusi dengan baik dan secara jumlah juga sudah cukup.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini menambahkan, pada Pesta Demokrasi 2024, masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

"Mendekati Pemilu tolong jaga ketertiban dan keamanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!" pesan Akmal saat meninjau Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Mahulu, Jumat, 26 Januari 2023.

Akmal juga menyampaikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk member-samai kondisi politik dengan bijaksana dan mengawal gelaran Pemilu serentak secara damai. Tensi politik yang meninggi jelang hari pemilihan maupun perbedaan pilihan setiap orang, tidak boleh memecah rasa persatuan sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Akmal juga berpesan agar KPU dan pemerintah kabupaten

paten/kota menjalin koordinasi yang intensif jelang hari pelaksanaan Pemilu agar dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Pemilu.

"KPU dan Pemkab harus diintegrasikan. Pemerintah harus membantu memastikan dukungan logistik untuk pemilu tersedia dengan baik," tambahnya.

Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah, menambahkan, di Kalimantan Timur yang menjadi atensi adalah kerawanan akan logistik pemilu. Sebab di Kaltim yang memiliki luas provinsi 127.347 kilometer persegi terdapat sejumlah kawasan yang sulit di akses.

"Maka, itu menjadi atensi juga dari TNI maupun Polri," tuturnya.

Sejumlah daerah yang sulit di jang-

lasnya.

Dalam hal ini, logistik akan terlebih dahulu digerakkan mengingat berdasarkan target yang dimiliki adalah satu hari menjelang pemilihan logistik harus sudah sampai di Tempat Pemilihan Sementara (TPS).

"Jika terjadi keterlambatan, seperti di tahun 2019 lalu di Mahakam Ulu terjadi pemungutan suara susulan, itu karena surat suara datang di H-1 dan itu pun sampai-nya di Kota Balikpapan bukan di Mahakam Ulu," tuturnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kaltim, Kombes Polisi Yusuf Sutejo, menyebutkan, pihaknya menyiapkan lebih dari 5.000 personel baik dari Polda maupun Polres dan Polsek di Kalimantan Timur dalam agenda Pemilu 2024.



kau itu seperti di Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, dan Berau yang memiliki sejumlah kawasan di pesisir. "Maka, dalam pergerakan logistik nanti dari gudang, kami akan menghitung kebutuhan waktu dan jarak yang

ditempuh,"

"Kami harus mengamankan sebanyak 11.000 TPS," kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, yang menjadi kerawanan potensial di Kaltim adalah di sisi geografis. Dalam hal ini, di Kaltim terdapat wilayah yang hanya bisa dilalui menggunakan jalur perairan.

Oleh karena itu, langkah antisipasi yang dilakukan adalah melakukan Bawah Kendali Operasi (BKO) sesuai dengan kebutuhan distribusi logistik, seperti perahu karet dan sebagainya.

"Selain itu, Polda Kaltim juga akan menyediakan dua unit helikopter yang merupakan BKO dari Mabes Polri. Yang jelas tujuan kami, surat suara itu mulai dari pengantaran hingga kembali itu berjalan dengan lancar," ujarnya. •

WUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN DI BENUA ETAM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minta kepada bupati dan wali kota untuk mengoptimalkan lahan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok di daerah. Hal ini dilakukan agar komoditi pangan tidak selalu bergantung pasok dari luar Kaltim.

Menurut Akmal, Kaltim memiliki sepuluh kabupaten dan kota yang memiliki potensi lahan pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan perkebunan yang luar biasa.

"Kita minta kepada bupati dan wali kota dapat mengoptimalkan lahan-lahan yang ada, termasuk lahan-lahan eks tambang," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik ketika meninjau kawasan greenhouse SKOI Kaltim, 31 Januari 2024.

Apabila kawasan itu dikelola dengan maksimal, kata Akmal, lambat laun Kaltim mampu memproduksi dan mewujudkan kemandirian pangan.

"Tidak akan ketergantungan lagi dengan daerah luar Kaltim untuk memenuhi kebutuhan pokok," ujarnya.

Saat ini, Akmal mengakui masih memasuki kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dari Sulawesi Selatan maupun dari Pulau Jawa. Padahal, kondisi ini tidak baik karena ketika cuaca tidak baik, maka suplai (pengiriman) akan terhambat dan memicu terjadinya inflasi di daerah.

Karena itu, Akmal meminta para kepala daerah bisa berkoordinasi dengan pihak

terkait terlebih perusahaan untuk mengoptimalkan lahan-lahan pertanian.

"Termasuk lahan-lahan eks tambang bisa dibangun green house," tegasnya.

Akmal menyebut lahan-lahan eks tambang di Kaltim sangat banyak dan lahannya potensial, sehingga sangat layak untuk dikelola menjadi kawasan pengembangan pertanian. Bagi Akmal, isu yang paling krusial di Kaltim adalah transformasi ekonomi sektor ketahanan pangan, terutama memanfaatkan teknologi pertanian modern.

"Penanaman dan panen bisa direncanakan dengan pengembangan green house, serta tidak tergantung musim seperti pertanian tradisional," ungkapnya.

Sebelumnya, Akmal menyebut Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara dan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) bersepakat mengembangkan sistem pertanian modern. Hal ini dalam rangka membangun ketahanan pangan di wilayah Kaltim.

"Kami yakin kontribusi teman-teman swasta, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, kita akan bisa membangun ketahanan di Kaltim," sebutnya, Jumat, 26 Januari 2024.

Tentu adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Bumi Etam menjadi tantangan bagi Kaltim dalam mempersiapkan adanya migrasi penduduk besar-besaran serta dalam pemenuhan pangan. Sehingga, transformasi ketahanan pangan menjadi prioritas bagi Akmal.

la mengajak untuk memanfaatkan lahan yang tersedia guna memastikan ketersediaan bahan pokok di wilayah ini, sehingga tidak perlu mengandalkan pasokan dari luar Kaltim.

"Penanaman dan panen bisa direncanakan dengan pengembangan greenhouse, serta tidak dipengaruhi musim seperti pertanian tradisional," paparnya.

Sebelumnya, pada 16 Januari

2024, Akmal Malik bersama Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan sekitar 40 pemilik IUP mengunjungi beberapa greenhouse dan peternakan domba di wilayah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk melihat contoh nyata dari sistem pertanian modern.

"Tadi kami sudah ajak jalan ke beberapa greenhouse dan juga peternakan domba di wilayah ini. Mudah-mudahan itu bisa kita kembangkan di Kaltim dan insya Allah Pak Bupati sudah menyiapkan lahan sekitar 50 hektare di wilayah Kutai Kartanegara," jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan ini merupakan langkah awal untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan swasta dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Kaltim.

"Kami yakin dengan kontribusi teman-teman swasta, pemerintah ka-

2024 dan mencapai 5,128 juta pada 2030," jelas Budi.

Budi menambahkan, hal ini akan mempengaruhi permintaan pangan di Kaltim, yang sebagian besar masih mengandalkan pasokan dari luar daerah atau impor.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan Bank Indonesia, dari 10 komoditas pangan strategis, hanya 4 yang dapat diproduksi secara mandiri oleh Kaltim, yakni daging ayam, cabai merah, ikan layang, dan daging sapi. Sisanya seperti beras, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih, masih mengandalkan diimpor dari provinsi lain di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara. Bahkan dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Budi menjelaskan, kondisi ini menimbulkan risiko ketidakstabilan ekonomi, terutama inflasi, jika terjadi gangguan

besar dari inflasi di Kalimantan Timur," ungkapnya.

Oleh karena itu, kebijakan penyediaan bahan pangan menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi di daerah ini.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota negara juga membuka peluang bagi Kaltim guna mengembangkan sektor pertanian dan perikanan, sebagai salah satu sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, diharapkan para petani dan nelayan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produknya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, mengatakan, Pemprov Kaltim mulai konsen terhadap ketahanan pangan sebagai persiapan menatap adanya IKN. Hamas, sapaannya, menyampaikan dukungannya terhadap komitmen Akmal Malik atas program ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan di Kaltim.

"Kami tentunya sangat mendukung tentang program ketahanan pangan yang menjadi komitmen Pj Gubernur Kaltim di masa jabatannya yang ada," ucap Hamas.

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, sejauh ini pangan di Kaltim masih belum bisa mandiri. Artinya sebagian bahan pokok pangan masih membutuhkan pasokan dari luar daerah.

Di sisi lain, IKN dengan potensi perpindahan penduduk yang besar-besaran menambah jumlah kebutuhan pangan. Sehingga, menurutnya, kemandirian pangan perlu diwujudkan agar tak lagi berharap topangan pasokan pangan dari luar daerah.

Sebagai lembaga legislative, pihaknya turut berkomitmen dengan program Pemprov Kaltim yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Sesuai dengan fungsinya, DPRD Kaltim memberikan dukungan melalui pembahasan anggaran serta penyusunan rencana program kerja. •



bupaten dan pemerintah provinsi, kita akan bisa membangun ketahanan di Kaltim," ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menuturkan, kebutuhan pangan di Kaltim bakal semakin besar, sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Penduduk IKN diperkirakan mencapai 488.049 jiwa pada 2024, dan akan terus bertambah hingga 1.911.988 jiwa pada 2045.

"Dengan mempertimbangkan perpindahan penduduk ke IKN tersebut di atas, penduduk Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 4,046 juta pada

pada pasokan pangan.

"Data historis menunjukkan bahwa komoditas pangan merupakan penyumbang ter-





DEMOKRASI BUTUH OPOSISI

Demokrasi Indonesia kini dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan, berdasarkan sejumlah indikator. Seperti kualitas proses pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.

Demokrasi Indonesia kini dinilai dalam kondisi mengkhawatirkan, berdasarkan sejumlah indikator. Seperti kualitas proses pemilu yang diwarnai berbagai dugaan kecurangan, dorongan pilpres satu putaran, serta pengabaian nilai-nilai etis demokrasi.

Untuk itu, dibutuhkan pelembagaan oposisi kritis untuk memulihkan demokrasi yang bermartabat.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, mengatakan, publik bisa mendorong sejumlah partai politik untuk memainkan peran itu, terutama partai-partai yang berada di luar koalisi

pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Saat situasi memanggil seperti saat ini, diharapkan ada pelembagaan oposisi yang lebih steril. Misalnya, kenapa tidak kita dorong saja PDIP dengan kekuatan yang dimiliki untuk mulai mengambil sikap jelas dalam konteks penyelamatan demokrasi Indonesia ke depan," ujar Sirojudin dalam webinar nasional yang digelar Moya Institute bertajuk "Demokrasi Indonesia Terancam?", Kamis, 18 Januari 2024.

Ditegaskan Sirojudin, oposisi terhadap praktik kekuasaan Joko Widodo yang mengabaikan nilai dan etika demokrasi harus dilakukan. Terlebih, belakangan ini berbagai pihak telah mendorong pemakzulan.

"Ini tanda problemnya sudah sangat serius. Publik masih bisa mendorong institusi politik sebesar PDIP, Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengambil jalan tegas oposisi untuk menyelamatkan demokrasi. Ini dipastikan akan mendapat dukungan dari masyarakat sipil, mahasiswa, dan dunia internasional," tegasnya.

Sirojudin juga menjelaskan soal politik dinasti sejatinya merupakan model politik eksklusif yang bisa menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Lebih jauh lagi, model politik ini bisa menurunkan kualitas demokrasi dan menguatnya praktik nepotisme oleh para penguasa.

"Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara," ujar Sirojudin.

Melihat kebijakan pemerintah saat ini, Presiden Jokowi rajin mendorong industri-



isasi hingga kebijakan impor beras besar-besaran. Hal ini menurutnya, menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian.

Sementara itu, pendiri Setara Institute, Hendardi, menilai vetokrasi mengalami penguatan di era pemerintahan Jokowi, merujuk pada veto dan pemblokiran aspirasi kolektif masyarakat oleh sekelompok orang. Vetokrasi di era Jokowi belakangan malah menjadikan proses legislasi di DPR menjadi ugal-ugalan hingga meruntuhkan independensi Mahkamah Konstitusi.

Ditambahkan ilmuwan politik yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Prof Ikrar Nusa Bhakti, demokrasi Indonesia semakin terancam sejak Jokowi tanpa malu-malu memajukan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres. Hal tersebutlah yang menjadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk di era Reformasi.

"Adanya pembajakan oleh Jokowi dan keluarganya, melalui rekayasa hukum di MK dan berlanjut rekayasa politik, menjadikan 2024 ini akan tercatat sebagai pemilihan umum terburuk dalam sejarah Indonesia atau paling tidak pemilu paling tidak demokratis," ungkapnya.

Untuk itu, Ikrar menaruh harapan kepada pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, untuk memperbaiki regresi demokrasi dan hukum saat ini.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, juga memberikan penilaian bahwa proses pemilu 2024 adalah yang paling buruk dibandingkan pemilu sebelumnya. Bukan tanpa alasan, JK menyinggung pemilu saat ini terlihat demokratis, tapi ada in-

timidasi terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.



Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya. Jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD, ya

Menurut JK, intimidasi tersebut adalah bentuk ketidakadilan dalam proses pemilu karena ada keberpihakan kepada calon tertentu.

"Saya umur segini mengalami pemilu sejak lama. Enggak ada proses pemilu seburuk ini. Paling buruk," kata JK di

sebuah tayangan YouTube, Kamis, 23 Januari 2024.

JK mengingatkan agar semua pejabat pemerintah, termasuk presiden agar netral dalam politik. Termasuk, saat masa Pilpres 2024 yang saat ini bergulir.

Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil kepada semua masyarakat, termasuk dalam pilihan politik.

"Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan), 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya'," ujar JK.

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat. Jika itu dilanggar, maka ada sanksinya yakni sumpah maupun aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya.

Jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD, ya," tutur JK.

Meski begitu, JK enggan mengomentari soal netralitas Presiden Jokowi dalam pilpres 2024. Ia lebih memilih melihat pernyataan Jokowi yang selalu mengingatk





dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.

"Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya," ucap dia.

Harus Ada Oposisi

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menegaskan pemerintahan harus berjalan dengan adanya oposisi. Ganjar justru khawatir ketiakhadiran oposisi akan membuat pemerintahannya terancam.

"Mengurus itu ada banyak kan, mengurus itu tidak harus dalam satu sistem, bisa saja partnership dengan mereka atau kemudian dengan pola check and balances model seperti oposisi. Begitu juga bisa dilakukan karena itu menyehatkan. Rasa-rasanya kalau tanpa oposisi, ikut semuanya, saya khawatir kekuatannya menjadi solid dan dominan," tuturnya.

Untuk itu, Ganjar memilih punya oposisi demi menjaga kualitas demokrasi Tanah Air. "Nanti orang akan bicara 'wah ini menjadi gemuk sekali dan oligarki', pasti rakyat enggak suka. Kita ajak terlibat untuk menyehatkan kondisi bangsa biar cepat maju," sambungnya.

Seperti diketahui Ganjar Pranowo bicara soal nasib paslon 01 dan 02, jika dia dan Mahfud MD memenangi Pemilu 2024. Ganjar berencana merangkul lawannya atau membiarkan mereka menjadi oposisi.

"Pasti beliau-beliau juga pilihan-pilihan dari masing-masing partai yang terbaik, putra terbaik, maka yang pasti akan kita ajak bicara. Gak mungkin kita tinggalkan," kata Ganjar.

Ganjar juga bercerita bagaimana partainya, PDIP, pernah 10 tahun tidak berada dalam pemerintahan. Ganjar mengatakan, itu terjadi ketika masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, PDIP dikenal menjadi oposisi pemerintah. Cerita itu disampaikan Ganjar ketika bertemu tim pemenang daerah (TPD), calon anggota legislatif (caleg) partai koalisi dan relawan Ganjar-Mahfud di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 13 Januari 2024. Awalnya, Ganjar mengungkit peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996, di

mana terjadi perebutan kantor DPP PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang sekarang PDIP.

"Masih ingat 27 Juli (1996), PDIP dihajar habis-habisan. Tapi kita melawan, kita tak pernah berhenti, kita lawan dan kita orang yang taat aturan," kata Ganjar kepada para pendukungnya.

"Waktu itu juga 1997 kita tidak ikut pemilu, suara kita serahkan pada PPP (Partai Persatuan Pembangunan), friend. Sebenarnya Perindo juga mau kita kasih tapi waktu itu belum ada," ujarnya lagi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melanjutkan ceritanya bahwa situasi demokrasi dari masa ke masa selalu naik-turun. Meski begitu, PDIP disebut tetap memiliki rekam jejak yang baik dalam sejarah demokrasi. Di situ, Ganjar mengajak para pendukungnya belajar dari Presiden Pertama RI Soekarno untuk tidak melupakan sejarah. "(Tahun) 1999 menang. Karena apa? Rakyat bersama," katanya.

Setelah itu, Ganjar menyampaikan selama 10 tahun PDIP berada dalam posisi oposisi. Ganjar mengatakan, 10 tahun itu akhirnya terbayarkan ketika Presiden Joko Widodo memenangkan Pilpres 2014.

"Partai saya dihukum kurang lebih 10 tahun kita tidak memimpin. Dan akhirnya kita bisa memenangkan pemilu kembali, bahkan mendudukkan presiden dari kader PDIP, waktu itu," ujarnya.

Ganjar lantas menegaskan bahwa semua kemenangan adalah hasil dari keringat dan tenaga rakyat. Oleh sebab itu, Ganjar mengaku masih mengingat wajah-wajah rakyat yang mendukung kemenangan PDIP di Pilpres kala itu.

"Saya tahu keringat Anda, harta Anda, tenaga Anda waktu panjenggan semua diberi kemenangan pada

saat itu. Kita semuanya tidak pernah lupa pada kondisi itu. Kita tidak pernah lupa," katanya.

Merujuk hal itu, Ganjar mengajak para pendukungnya untuk terus bergerak turun di wilayah masing-masing. Dia menyadari bahwa Surabaya menjadi salah satu wilayah

jadi parpol koalisi pemerintah sejak pemerintahan SBY maupun Jokowi.

"Kalau seandainya kalah, mau enggak jadi oposisi yang kritis, konstruktif?" kata Charles.

"Oposisi itu pekerjaan mulia, oposisi itu orang mulia yang harus ada untuk mengontrol, meluruskan jalan



untuk memperebutkan suara di Pilpres 2024. "Maka tidak heran kalau kemudian banyak yang ingin datang mengambil suara di Surabaya. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara," ujar Ganjar.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengaku siap jika harus menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang. Hal itu disampaikan Muhaimin saat menyampaikan visi-misi di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin, 4 Desember 2023.

Mulanya, seorang panelis bernama Charles bertanya apakah PKB siap menjadi oposisi jika kalah dalam Pilpres 2024. Mengingat, PKB men-

supaya tidak salah," ujar Muhaimin.

Ia menuturkan, PKB tak masalah jika akhirnya harus berada di luar pemerintahan. Justru, kata Muhaimin, PKB ingin merasakan posisi itu setelah hampir 20 tahun menjadi parpol koalisi pemerintah.

"Jadi, saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya," kata dia.

Cak Imin menceritakan, saat ini PKB kerap dianggap sebagai oposisi setelah bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, sebelumnya PKB sempat tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra.

"Jadi itulah faktanya, yang perlu kita pahami, bahwa pada dasarnya, oposisi itu pekerjaan penting," ujar Muhaimin. ●





ROMI HARIYANTO KEKEH MAJU PILGUB JAMBI

Geliat politik di Provinsi Jambi semakin menarik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, khusus dengan berkembangnya dukungan yang merata untuk Romi Hariyanto sebagai calon gubernur.

Romi Hariyanto tetap tak gentar meski Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyatakan dukungannya terhadap Al Haris pada Pilgub Jambi 2024 mendatang.

Bupati Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dua periode ini menegaskan tekadnya untuk bersaing sebagai calon Gubernur Jambi.

Meski demikian, keputusan partai tersebut tidak menggoyahkan niatnya untuk memperebutkan kursi Gubernur Jambi. Romi menyatakan akan tetap melanjutkan perjalanannya di Pilgub Jambi 2024.

Mantan aktivis mahasiswa di Jambi, Bram Aprianto mengaku Romi jujur sesuai dengan keputusan partai.

"Meski menghormati keputusan partai, namun pencalonannya di Pilgub 2024 sudah ditentukan, dan dia akan tetap maju. Jangan mundur," ujar Bram.

Bram menegaskan, mengikuti arahan partai, Romi saat ini fokus mempersiapkan pemilu 2024 (legislatif dan presiden).

Meski demikian, upaya publikasi pencalonan Romi pada Pilgub Jambi terus berlanjut.

jut.

"Romi adalah seorang pejuang. Begitu ia mendeklarasikan pencalonannya di Pilgub, tidak ada kata mundur. Jadi, ia tidak mempermasalahkan dukungan PAN terhadap Wo Haris (Al Haris). Tanpa dukungan PAN pun, ia memastikan dirinya akan melanjutkan pencalonannya," tegas Bram.

Ia menegaskan, Romi jauh-jauh hari sudah aktif melakukan sosialisasi. Berdasarkan survei, popularitas dan elektabilitasnya terus meningkat. Soal dukungan partai, Bram meyakinkan Romi sudah mempertimbangkan aspek itu dengan matang.

"Dia tentu sudah punya strategi dan sudah melakukan lobi dengan beberapa pihak," jelas Bram.

Dukungan ini tidak hanya berasal dari berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga mencakup kepala daerah berpengaruh di wilayah tersebut.

Romi Hariyanto



to baru-baru ini terlihat dalam sebuah foto bersama Bupati Bungo Mashuri, Mantan Bupati Kerinci Adi Rozal, menandakan adanya solidaritas dan dukungan yang kuat dari kalangan tersebut.

Pertemuan ini memberikan isyarat positif terkait potensi Romi Hariyanto dalam menghadapi Pilgub Jambi.

Romi Hariyanto secara aktif telah melaksanakan kunjungan ke wilayah barat Provinsi Jambi, mencakup Bungo, Merangin, Sarolangun, dan Kerinci.

Kunjungan-kunjungan ini dianggap strategis untuk berinteraksi dan mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat dasar dukungan politiknnya.

Tampaknya Romi Hariyanto berpotensi membentuk pasangan dengan salah satu kepala daerah di wilayah barat Jambi, menciptakan sinergi yang dapat menguntungkan dalam kompetisi Pilgub.

Pertemuannya dengan Mantan Bupati Kerinci, Adi Rozal, mencerminkan kemungkinan tersebut, mengingat kedekatan dan seriusnya diskusi mereka mengenai masa depan Jambi.

Romi Hariyanto juga terlibat dalam dialog aktif dengan berbagai partai politik, termasuk pertemuannya dengan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra. Hal ini menunjukkan keseriusan Romi dalam membentuk koalisi politik yang kokoh menjelang pemilihan gubernur.

Pengamat politik Nasroel Yasier memberikan penilaian positif terhadap potensi Romi Hariyanto sebagai calon gubernur.

Menurutnya, Romi memiliki kualifikasi administratif dan pengalaman yang memadai untuk memimpin Jambi. Sebagai mantan Ketua DPRD dan Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi telah membuktikan kapabilitasnya dalam kepemimpinan.

"Sangat layak jika dilihat dari pengalaman dan administrasi," ujarnya.

Selain itu, dari perspektif geografis politik, Romi memiliki basis politik yang solid, terutama di Tanjung Jabung Timur dan wilayah lainnya.

"Romi memiliki basis politik yang solid, terutama di Tanjung Jabung Timur. Keadaan ini memberikan keuntungan

strategis bagi Romi Hariyanto dalam mengumpulkan dukungan yang lebih luas di seluruh provinsi," ulasnya.

Pencalonan Romi Hariyanto dalam Pilgub Jambi 2024 mencerminkan dinamika politik yang terus meningkat di Jambi, dengan harapan membawa perubahan positif dan pembangunan yang lebih baik bagi masa depan provinsi tersebut.

Sementara itu, hasil survei Sigma Idea Indonesia mencatat bahwa elektabilitas petahana Al Haris cenderung turun menjadi 23,6 persen, meskipun popularitasnya masih mencapai 93 persen.

Sebaliknya, elektabilitas dan popularitas Romi Hariyanto tercatat pada angka yang tinggi, masing-masing 15

saat peresmian Maulida Convention Center (MCC) pada Selasa (21 November 2023). Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPP PAN H Bakri.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin (UIN STS) Jambi, Masyian M Syam menyatakan bahwa hasil survei ini mencerminkan bahwa Romi Hariyanto mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat.

Ia berpendapat bahwa adanya alternatif kandidat merupakan hal baik dan yang penting adalah bagaimana kandidat-kandidat tersebut mampu menawarkan solusi-solusi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Demokrasi akan lebih bermakna jika diisi oleh individu-individu yang baik,



persen dan 56 persen, menunjukkan posisi yang kuat dalam persaingan Pilgub Jambi 2024 mendatang.

Hasil survei dari Lembaga Kajian Politik Regional (LKPR) juga menunjukkan bahwa Al Haris memiliki elektabilitas sebesar 22,67 persen, diikuti oleh Romi Hariyanto dengan 15,50 persen, dan Syarif Fasha dengan 12,33 persen.

Seperti diberitakan, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mengumumkan dukungannya terhadap Al Haris pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Dukungan PAN terhadap Al Haris disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Yandri Susanto,

yang benar-benar mewakili keinginan masyarakat dan berkomitmen untuk melayani rakyat," bebernya.

Ditambahkan pengamat politik dari Universitas Jambi Dori Effendi bahwa berdasarkan hasil survei, ketiga tokoh tersebut dinilai layak oleh masyarakat untuk menjadi Gubernur.

Ia mengungkapkan bahwa Al Haris memiliki kekuatan dari segi pengaruhnya sebagai gubernur saat ini, serta memiliki dukungan kuat di wilayah Jambi Barat.

Romi Hariyanto memiliki kekuatan di wilayah Jambi Timur dan sebagai bupati Tanjabtim sampai 2024. •IRY

PARTAI DEMOKRAT KALSEL HARUS KERJA KERAS

Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), H Ibnu Sina sudah mengantongi restu dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan 2024.

Dukungan terhadap Ibnu Sina tersebut dilontarkan oleh AHY ketika kampanye dan konsolidasi Partai Demokrat Kalsel di Hotel Galaxy Banjarmasin, belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut, AHY mengungkapkan harapannya untuk memberikan kesempatan kepada kader Demokrat untuk ikut serta dalam Pilkada. Namun, dia menyadari bahwa langkah tersebut tidaklah mudah.

"Pentingnya peran seluruh kader, terutama para calon legislatif Partai Demokrat di Kalimantan Selatan, untuk meraih dukungan pada Pemilu Legislatif 2024," ungkapnya.

AHY menyoroti bahwa jumlah kursi yang berhasil diraih di legislatif memiliki dampak signifikan terhadap langkah selanjutnya

dalam Pilkada yang akan berlangsung pada September tahun depan.

"Perlunya fokus pada Pileg dan kerja sama yang solid, mengingat tidak bisa melangkah sendiri-sendiri," katanya.

Sementara itu, AHY tetap optimis bahwa para calon legislatif Partai Demokrat Kalimantan Selatan dapat mengamankan kursi DPR RI pada Pemilu 2024, setelah dua periode tanpa perwakilan.

Dia menekankan pentingnya pendekatan langsung ke masyarakat dan memperkuat hubungan dengan mereka, bukan hanya mengandalkan materi promosi seperti umbul-umbul dan baliho.

Dalam upayanya untuk meraih dukungan, AHY menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kerja keras dan doa warga Kalimantan Selatan, target yang diharapkan dapat tercapai.

Dia juga memberikan pesan kepada seluruh calon legislatif dan kader untuk memastikan keberadaan sak-



si di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Partai Demokrat, melalui AHY, menekankan pentingnya mengamankan jumlah saksi sebanyak 13.537 orang di seluruh TPS se-Kalimantan Selatan yang berjumlah 13.584.

"Bahwa ketiadaan saksi dapat berpotensi mengubah hasil suara. Sebagai bentuk dukungan, saya berjanji memberikan bantuan dengan menambahkan honor bagi setiap saksi sebesar Rp 100 ribu di setiap TPS," ulasnya.

Dukungan terhadap Ibnu Sina untuk maju Pilgub kalsel juga datang dari Denny Indrayana. Selain afiliasi mereka

Ibnu Sina menyambut baik dukungan Denny Indrayana. Namun, dia enggan membahas Pilgub Kalsel tahap awal. Ketua Pengurus Daerah Partai Demokrat Kalimantan Selatan itu sambil bercanda mendorong Denny untuk mempertimbangkan kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2024.

"Kalau Denny Indrayana mau maju lagi, kami sambut baik," tandasnya.

"Tetapi Denny Indrayana saat ini adalah calon legislatif. Jadi, kami berharap bisa merangkul basis suara di Pilgub yang jumlahnya sekitar 800 ribu suara. Insya Allah DPR RI bisa mendapatkan

mendatang, figur Ibnu Sina dapat menyatukan suara di Batola yang memiliki keterikatan emosional, sementara Anang Syakfiani dianggap mampu meraih dukungan pemilih di Banua Anam.

"Meskipun keduanya memiliki potensi besar untuk memengaruhi hasil Pilgub Kalsel 2024, namun keduanya masih memiliki tantangan besar untuk maju sebagai calon," tambahnya.

Ibnu Sina, sebagai contoh, meskipun saat ini memimpin Partai Demokrat Kalsel, namun belum memenuhi syarat kursi legislatif yang diperlukan untuk memperoleh posisi nomor satu.



dengan Partai Demokrat, Denny memuji Ibnu Sina, Walikota Banjarmasin saat ini, atas kualitas kepemimpinannya.

"Kita lihat Pak Ibnu punya kompetensi menjadi gubernur," kata Denny.

Meski begitu, Denny menekankan perlunya upaya maksimal untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam mengamankan jumlah kursi Partai Demokrat yang signifikan di legislatif. Tujuannya untuk meningkatkan daya tawar partai saat membentuk koalisi.

Denny pun menyatakan kesiapannya mengarahkan basis pemilih terhadap calon dari Partai Demokrat. Khususnya, Denny memperoleh 843.695 suara (49,76 persen) pada Pilgub Kalsel 2020.

"Insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendampingi calon-calon terbaik Partai Demokrat dalam mengikuti pemilihan gubernur, kabupaten, dan walikota," katanya.

satu kursi," bebernya.

Pemerhati Politik Banua, Kadarisman mengungkapkan, H Ibnu Sina dan Bupati Kabupaten Tabalong, H Anang Syakfiani, disebut sebagai tokoh kunci dalam Pilgub 2024.

Menurut Kadarisman, keduanya memiliki potensi untuk menggaet dukungan dari kelas menengah atas dan juga berpotensi meraih suara dari pemilih kalangan bawah.

"Ibnu Sina bisa menjadi perwakilan bagi pemilih di Banjarmasin dan Barito Kuala (Batola) yang mencakup 23 persen pemilih," ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, H Anang Syakfiani dianggap dapat menjadi perwakilan bagi pemilih di wilayah Banua Anam dengan kekuatan dukungan mencapai 28 persen dari pemilih Kalsel.

Kadarisman menyatakan bahwa dalam pertarungan Pilgub Kalsel 2024

Sementara itu, Anang Syakfiani, bukan merupakan kader partai politik.

Kadarisman menambahkan bahwa faktor lain yang perlu diperhatikan adalah dukungan dari pemangku kepentingan dan pemilik kekuasaan terpilih di masa mendatang.

"Dukungan dari 'gunung' atau elemen kekuasaan lainnya menjadi kunci penting untuk memperkuat posisi, meskipun bukan jaminan kemenangan," tambahnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai arti 'gunung' dan 'penghuni gunung'.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, opsi yang lebih menguntungkan bagi keduanya mungkin adalah bersaing sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub 2024 mendatang.

Dengan demikian, apapun hasil Pilgub tersebut nanti, H Ibnu Sina dan H Anang Syakfiani dapat menjadi kunci penting dalam meraih kemenangan. • IRY

HIDAYAT ARSANI MAKIN PEDE KANDIDAT TAK TERGOYAHKAN

Ada beberapa calon mulai muncul ke permukaan, meramaikan kontes-tasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung termasuk mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.

Hidayat Arsani telah mengumumkan niatnya untuk mengikuti Pilgub di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 mendatang.

"2024 kita akan maju, kita amar ma'ruf nahi munkar," kata pria yang akrab disapa Panglima Hidayat Arsani.

Saat ditanya wartawan apakah dirinya akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, Panglima Hidayat Arsani menegaskan, tidak ada riwayat dirinya maju sebagai calon wakil gubernur.

"Nomor satu tentunya! Tidak ada riwayat saya maju sebagai calon wakil gubernur," tegas Hidayat Arsani.

Panglima, panggilan akrab Hidayat Arsani, mengungkapkan bahwa ia telah memiliki enam nama kandidat calon wakilnya untuk Pilgub tersebut. Meskipun identitas enam calon tersebut masih dirahasiakan olehnya.

Selain berkomunikasi dengan calon wakilnya, Hidayat juga aktif menjalin hubungan dengan sejumlah partai politik.

"Komunikasi dan peninjauan terus dilakukan, sejauh ini sudah ada enam nama calon yang sudah dikantongi, cuma masih kita rahasiakan. Kalau komunikasi sudah ke empat Parpol," ujar Hidayat.

Hidayat menyoroti potensi keterlibatan mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Ros-

man, dalam Pilgub 2024.

Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada figur yang dapat menandingi elektabilitas Erzaldi Rosman, kecuali dirinya sendiri.

Namun, Hidayat memberikan catatan bahwa jika ada figur lain yang setara dengan Erzaldi, ia tidak akan maju sebagai kandidat, melainkan kembali fokus pada perannya sebagai pengusaha dan petani.

Sebagai informasi, Hidayat Arsani baru-baru ini meraih gelar Doctor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), sebuah perguruan tinggi internasional yang berkantor pusat di Singapura dan Malaysia.

Hidayat Arsani, yang dikenal sebagai tokoh politik dan ekonomi di Bangka

Belitung, menjadi satu-satunya wisudawan yang dianugerahi gelar tersebut pada upacara wisuda tersebut.

UIPM memberikan penghargaan ini atas kontribusinya dalam pembangunan, ekonomi, dan sosial.

Dalam tanggapannya terkait penuguhan gelar, Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukurnya dan berharap pencapaiannya selama ini dapat berkontribusi positif untuk kemajuan Bangka Belitung.

Hidayat Arsani memiliki catatan sukses dalam berbagai sektor, termasuk pertambangan, perhotelan, dan kesehatan, serta pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung.

Hidayat Arsani menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sejak 12 Mei 2014 hingga 12 Mei 2017. Ia merupakan pengusaha dengan beragam kepentingan bisnis di bawah bendera Arsani Group.

Nama Hidayat Arsani terkenal karena diakui komitmennya terhadap daerah dan masyarakatnya. Tak heran jika ia menerima penghargaan Maha Karya Pembangunan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 yang diberikan oleh Gubernur Eko Maulana Ali sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap daerah tersebut.

Hidayat Arsani berperan besar dalam membangun Bangka Belitung, berkontribusi di berbagai sektor seperti pabrik, perkebunan, hotel, plaza, dan rumah sakit.

Saat ini, Hidayat Arsani ditunjuk sebagai Ketua Ikatan Petani Tambak Nusantara Indonesia. Selain itu, beliau



juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Geliat nama Hidayat Arsani tetap tidak tergoyahkan sebagai kandidat calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang akan diusung oleh DPD Partai Golkar Bangka Belitung.

Sebagai kader murni internal partai Golkar, Hidayat Arsani menjadi satu-satunya pilihan yang dianggap siap untuk bersaing dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bangka Belitung tahun 2024 mendatang.

ng, kita akan memberikan prioritas kepada kader internal partai Golkar, yaitu Bapak Hidayat Arsani,” ujar Bambang Patijaya.

Bambang Patijaya menyatakan bahwa partainya tetap terbuka terhadap Partai Politik (Parpol) lain yang berniat untuk berkoalisi dalam Pilgub 2024 mendatang.

Terkait dengan penentuan pasangan calon, DPD Partai Golkar Bangka Belitung sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut kepada mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hi-

mati bagi partai dan menjadi fokus utama dalam persiapan kontestasi politik mendatang.

Bambang Patijaya menegaskan komitmen partainya untuk mendukung Hidayat Arsani sebagai calon Gubernur, dan bahkan membuka diri terhadap kemungkinan berkomunikasi dan menjajaki kerjasama dengan partai lain terkait wacana tersebut.

“Komitmen partai untuk mendukung Hidayat Arsani sebagai calon Gubernur, dan bahkan membuka diri terhadap kemungkinan berkomunikasi dan



Berdasarkan penilaian, Hidayat Arsani dianggap sebagai satu-satunya kader Golkar yang memiliki kesiapan untuk menghadapi kontestasi Pilgub di masa mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Bangka Belitung, Bambang Patijaya menjelaskan bahwa dalam Pilgub 2024, pihaknya memberikan prioritas pada pengusungan kader internal partai, yakni Hidayat Arsani.

“Dalam kontestasi Pilgub mendata-

dayat Arsani.

“Mengenai koalisi, kami sangat terbuka, dan kami memberikan kebebasan kepada Bapak Hidayat Arsani untuk menjajakinya,” tambah BPJ.

Dalam penggambaran DPD Partai Golkar Bangka Belitung terhadap Pilgub 2024, Hidayat Arsani telah diposisikan di kursi nomor satu.

“Hidayat Arsani akan diposisikan sebagai Calon Gubernur Bangka Belitung untuk Pilgub 2024 nanti,” sambungnya.

Posisi ini dianggap sebagai harga

menjajaki kerjasama dengan partai lain terkait wacana tersebut,” jelasnya.

Termasuk dalam hal penentuan pasangan calon yang akan mendampingi Hidayat Arsani, BPJ menyatakan keterbukaan partainya terhadap segala kemungkinan, baik dari segi warna partai maupun kolaborasi politik.

“Kami membuka segala kemungkinan untuk calon pendamping Hidayat Arsani, baik dari segi warna partai maupun kolaborasi politik,” pungkasnya • IRY

PELUANG BESAR RIDWAN KAMIL MENANG DI JABAR

Setelah menghadapi persimpangan antara Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) atau DKI Jakarta, kini Ridwan Kamil resmi ditunjuk oleh Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, belum lama ini.

Tidak hanya Ridwan Kamil, Partai Golkar juga menugaskan beberapa kader terbaiknya untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada 2024 sebagai cagub.

Antara lain, Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten, Bobby Nasution sebagai Cagub Sumatera Utara, dan Khofifah Indar Parawansa yang kembali maju sebagai Cagub Jawa Timur.

Keputusan ini telah menimbulkan antusiasme masyarakat, terutama di wilayah Jawa Barat.

Hingga saat ini, elektabilitas Ridwan Kamil masih tinggi dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Jaringan Survei Pemuda Pelajar dan Ragaplasma Research, dengan mendapatkan dukungan sebanyak 25,2 persen.

Di posisi kedua, Dedi Mulyadi mengantongi suara sebanyak 16,7 persen. Sehingga, Dedi Mulyadi semakin dianggap sebagai saingan yang serius bagi Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jabar

2024.

Ridwan Kamil telah menyatakan bahwa keputusannya maju sebagai petahana dalam Pilgub Jabar 2024 memiliki alasan yang sederhana, yakni karena lebih realistis. Menurutnya, peluang untuk terpilih lebih besar di Jabar dibandingkan di DKI Jakarta.

"Saya mendapatkan dua surat penugasan dari DPP Golkar, satu untuk Jawa Barat dan dua untuk DKI. Jadi, suratnya dua," ungkap Ridwan Kamil.

Emil menekankan bahwa kedua surat penugasan dari DPP Golkar tersebut merupakan bentuk kepercayaan dari partai, yang harus menjadi motivasi baginya untuk terus bekerja maksimal.

"Kepercayaan itu akan saya terjemahkan ke dalam kerja-kerja politik setelah menerima arahan dari partai," tambahnya.

Meskipun fokusnya tertuju pada Pilgub Jabar, Emil menyatakan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk mencoba peruntungan di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkannya sambil terus memantau perkembangan dinamika politik ke depan.

"Meskipun diberikan dua, prioritas tetap di Jawa Barat, namun diminta untuk tetap mencoba berkiprah sesuai dengan penugasan di DKI Jakarta," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, telah menunjukkan arahnya kepada Emil untuk maju dalam Pilgub Jabar. Hal ini juga diperjelas oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, MQ Iswara, dalam keterangan yang diberikannya baru-baru ini.

Selain Emil, istrinya Atalia Praratya Kamil dan Ketua DPD Golkar Kota Bandung, Edwin Sanjaya, juga diberikan tugas untuk bertarung dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung.

Sementara dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung,



Golkar menugaskan dua nama, yaitu Wakil Bupati Bandung saat ini, Syahrul Gunawan, dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto.

Selain tugas tersebut, Kang Emil juga didapuk menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan menegaskan janjinya dan menyatakan baktinya kepada Prabowo.

"Niat kuat untuk memenangkan Pak prabowo. Semua semangat dan kompak, memakai warna biru langit yang jadi simbol kemenangan kita. Kita yakin

Padjajaran (Unpad), Firman Manan menekankan bahwa peluang terbesar bagi Ridwan Kamil (Kang Emil) untuk memenangkan Pilgub Jabar jelas terdapat di Jabar.

"Peluang terpilih lebih besar tentu di Jawa Barat karena bagaimana pun dia sebagai petahana, dan hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya masih tetap tertinggi

Kang Emil sangat penting," ungkapnya.

Firman menyoroti bahwa kemenangan terakhir Golkar di Jabar terjadi pada tahun 2004, dan kehadiran Kang Emil diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan. Meski tidak mudah, Golkar berharap bisa menjadi pemenang di Jawa Barat.

"Tugas ini sebenarnya juga merupakan ujian bagi Kang Emil untuk meningkatkan dukungan Golkar.



akan menjadi pemenang di 2024," ucap Kang Emil.

Ridwan Kamil mengungkapkan, dengan kekompakan yang terjalin kuat, TKD Jabar akan membentuk sebuah super team untuk memastikan Prabowo bisa menang Pilpres 2024 satu putaran.

Bahkan TKD menargetkan perolehan suara Prabowo-Gibran bisa mencapai 60%.

"Kita harus menang satu putaran, kita harus tempur habis-habisan. Target kita minimal 60 persen insya Allah lebih, kalau ini terjadi Jabar sebagai penentu, ditambah tempat lain, insya Allah satu putaran bisa direalisasikan," tegas mantan Gubernur Jabar ini.

Pengamat politik dari Universitas

dan unggul dibandingkan dengan kandidat lain," ujar Firman Manan.

"Walaupun namanya disebut-sebut di Jakarta dan memiliki peluang, di sana persaingannya relatif lebih ketat. Sebetulnya," tambahnya.

Firman menjelaskan bahwa Golkar memberikan tugas kepada Kang Emil untuk mempertegas peran yang sebelumnya telah diemban olehnya. Tugas tersebut adalah menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jabar.

"Rekomendasi ini sekaligus pene-gasan dari partai terkait dengan upaya yang harus dilakukan Kang Emil untuk memenangkan Pilpres dan Pileg di Jawa Barat. Sebagai ketua TKD, peran

Ini menjadi ujian apakah Kang Emil berhasil sebagai ketua TKD di Jawa Barat dan mampu meningkatkan su-ara Golkar secara signifikan dalam Pileg," tegas Firman.

Lebih lanjut, Firman menyatakan bahwa Golkar juga memiliki tujuan lain dengan menugaskan Kang Emil maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Partai ini sedang menjajaki seberapa besar dukungan yang bisa mereka dapatkan di ibu kota, meskipun kondisi persaingan di Jakarta masih relatif ketat.

"Namun, situasinya agak berbeda di Jakarta karena kompetisinya masih ketat dan belum ada satu pun kandi-dat yang unggul. Jadi, menurut saya, ini masih dalam tahap eksplorasi," je-lasnya. • IRY

EDY NATAR NASUTION MULAI TEBAR GAGASAN

Meski masih ada beberapa waktu lagi, kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Pilgub Riau dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024, sebanyak 548 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, akan menggelar pemilihan tersebut.

Salah satu figur yang menarik perhatian adalah Edy Natar Nasution, yang sebelumnya lama menjalani tugas kemiliteran di luar Riau dan kemudian "pulang kampung."

Edy pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1984.

Karirnya di militer mencapai puncak ketika pria kelahiran Bengkalis, 29 Mei 1961 itu menjabat sebagai Danrem 031/Wirabima.

Lalu pada 2018, Edy mencoba peruntungan di dunia politik. Ia maju sebagai calon Wakil Gubernur Riau mendampingi Syamsuar sebagai calon Gubernur Riau pada kontestasi Pilgubri.

Pulanganya Edy Natar ke Riau telah menjadi fokus perbincangan, dengan beberapa media menyoroti kebahagiaannya dalam judul artikel seperti "Edy Natar Pulang Riau Senang."

Namun, terlihatnya bahwa narasi politik sukses ini mung-

kin tidak akan diulang. Kabarnya, kedua tokoh ini akan maju secara terpisah dalam Pilkada 2024.

Edy Natar telah secara resmi menyatakan niat politiknya untuk maju sebagai calon Gubernur Riau.

"Insya Allah, saya maju," ujarnya saat berinteraksi dengan Ikatan Keluarga Batak Riau (IKBR) belum lama ini.

Pernyataan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk tokoh Riau, mahasiswa, ulama, dan masyarakat umum.

Edy menyatakan bahwa dalam pandangannya, seorang gubernur berperan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, bertindak sebagai mata dan telinga pusat di tingkat

daerah.

"Gubernur dianggap sebagai perpanjangan tangan pusat, berfungsi sebagai mata dan telinga pusat untuk daerah-daerah. Tugas utama Gubernur Riau adalah menjalin hubungan dengan 12 kabupaten/kota di wilayahnya. Jika pemerintah kabupaten/kota atau provinsi menghadapi kendala, tugas gubernur adalah membawa permasalahan tersebut kepada pusat untuk meminta bantuan," ungkapnya.

Edy lebih lanjut menjelaskan konsep pembangunan Provinsi Riau yang diprakarsainya, dimulai dengan fokus pada sektor pertanian.

"Selanjutnya, kita perbaiki kualitas layanan kesehatan dan tanggapai keluhan masyarakat terkait masalah seperti banjir dan lainnya. Prioritasnya adalah memastikan kecukupan pangan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan mental," terangnya.

Selanjutnya, Edy menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur guna meningkatkan mobilitas antar-daerah. Infrastruktur ini juga diharapkan mampu merangsang sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industri wisata.

"Kami berkeinginan agar setiap kabupaten/kota di Riau dapat mencapai tingkat kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua daerah dapat mandiri dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal masing-masing," tandasnya.

Edy juga terbukti sebagai pemimpin berkualitas selama menjabat sebagai Wakil Gubernur, bekerja sama dengan Syamsuar untuk membangun dan mengembangkan Riau. Pencapaian mereka mencakup peningkatan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya.

Aspek keagamaan dan moralitas juga menjadi poin penting dalam penilaian seorang pemimpin. Edy Natar



Nasution dikenal sebagai sosok yang agamis dengan integritas tinggi.

Kepemimpinannya yang transparan, adil, dan bertanggung jawab tercermin dalam gerakan dakwah GSSB (Gerakan Solat Subuh Berjamaah), yang telah menjadi populer dengan lebih dari 162 kali pelaksanaan dalam tiga tahun terakhir.

Dalam konteks GSSB, Edy menekankan pentingnya kesetiaan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Gerakan ini bukan hanya sebagai kewajiban beribadah, tetapi juga sebagai upaya untuk mempersiapkan bekal di akhirat.

"Melalui kesetiaan kepada sang pencipta, GSSB dapat semakin diterima oleh masyarakat dan membawa kesadaran akan pentingnya pengabdian kepada Tuhan," sambungnya.

Edy Natar Nasution diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Riau jika terpilih sebagai Gubernur. Dengan latar belakang yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, ia dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi provinsi tersebut.

Edy Natar Nasution telah mencuri perhatian dalam arena politik Riau. Kemenangannya sebagai wakil gubernur Riau pada Pilkada 2018 telah membuktikan popularitasnya dan kemampuannya dalam memimpin. Selama masa jabatannya, Edy telah berhasil menghadirkan perubahan positif di berbagai sektor di Riau.

Salah satu daya tarik utama Edy Natar Nasution adalah kemampuannya berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial di Riau. Ia menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan selalu berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan sosial.

Edy Natar Nasution juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan dan visi untuk masa depan Riau. Ia terus berupaya untuk mendorong kemajuan daerah

ahnya serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Riau. Prestasinya yang signifikan membuatnya dihormati dan diakui sebagai tokoh penting di Riau.

Edy Natar Nasution merupakan contoh inspiratif dari seorang politisi yang berpengaruh dan berhasil dalam mengembangkan daerahnya.

Melalui dedikasi tingginya, Edy terus berkontribusi untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau. Ia layak dijadikan teladan bagi generasi muda untuk berjuang dengan semangat dan integritas di dunia politik.

Sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, DR Aidil Haris menyatakan, bahwa Edy Natar mungkin akan menghadapi kesulitan jika memutuskan un-

Edy Natar yang sebelumnya dianggap hanya sebagai 'pasangan' dari Syamsuar, akan menghadapi kesulitan jika memutuskan untuk maju dalam Pilgubri," katanya

Ia menyoroti perbedaan situasi dengan Syamsuar, yang memiliki dukungan suara yang lebih besar.

Penting juga dicatat oleh Aidil bahwa jika Syamsuar juga ikut serta dalam Pilgubri, akan terjadi pembagian suara di antara mereka.

"Situasi ini menjadi semakin rumit karena basis suara Edy Natar tidak sebesar basis suara yang dimiliki oleh Syamsuar," katanya.

Aidil Haris juga mengemukakan pertimbangan terkait fokus Edy Natar pada daerah asalnya, Rohul. Menurutnya, memusatkan perhatian hanya pada daerah asal mungkin tidak akan memberikan dorongan yang cukup



tuk maju dalam Pilgu Riau untuk periode kedua.

Menurut Aidil, peluang kemenangan Edy Natar dalam Pilgubri kedua terlihat tipis, terutama jika dihadapkan pada persaingan politik dan ditentukan oleh pasangannya.

Aidil berpendapat bahwa peluang kemenangan Edy Natar menjadi gubernur menjadi agak sulit, terutama jika dibandingkan dengan kemungkinan majunya sebagai calon anggota DPR RI.

"Dalam konstelasi politik tahun 2024,

untuk mendukung kandidasi Edy Natar dalam Pilgubri.

Sebaliknya, Aidil menyarankan agar Edy Natar lebih baik memusatkan perhatian pada pencalonan sebagai anggota DPR RI.

Dengan mengingat dukungan dari Partai Nasdem yang saat ini mendukung Anies Baswedan, Aidil melihat bahwa banyak warga Riau memberikan respon positif terhadap Anies. Oleh karena itu, Aidil berpendapat bahwa peluang terpilihnya Edy Natar akan lebih terbuka jika ia memutuskan untuk fokus pada pencalonan sebagai anggota DPR RI. •IRY



OPTIMALKAN SISTEM INFORMASI AWASI KEUANGAN DAERAH



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bisa menjadi data pendukung dalam pemeriksaan keuangan. Berbagai data yang dimiliki Pemda bisa diakses dengan adanya SIPD.

"Selain langsung dari rekan-rekan jajaran BPK dan seluruh kepala perwakilan, ini bisa sebetulnya menjadi double check dengan menggunakan memanfaatkan SIPD yang ada di Kemendagri yang memuat sistem keuangan dan data keuangan di daerah," kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada acara Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Ruang Auditorium Gedung Tower BPK RI, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024.

Mendagri menyampaikan, berbagai data yang dimiliki Pemda yang bisa diakses dengan adanya SIPD di antaranya terdiri dari data pembangunan daerah, serta informasi pendapatan maupun pengeluaran daerah secara real time. SIPD menjadi salah satu kekuatan (backbone) sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan berbagai K/L.

"Kemendagri untuk meyakinkan adanya manajemen yang efektif-efisien pengelolaan anggaran dan pemerintahan itu dengan menerapkan aplikasi. Itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang tadinya beragam di tiap daerah, ada disosialisasi memang tapi bersifat sektoral, terpisah, island-island, dan sekarang sudah terintegrasi dengan peresmian oleh Bapak Presiden dan Kemenpan-RB," ungkapnya.

Kemendagri sebagai pembina dan

pengawas Pemda, kata Mendagri, terus melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Selain melalui optimalisasi SIPD, juga dimaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui penguatan jejaring Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan inspektorat yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sesuai dengan UU 15/2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan anggaran keuangan negara, yang telah memperjelas kekuatan BPK juga kepada pemerintah daerah, dan sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri adalah pembina dan pengawas pemerintahan daerah,” jelasnya.

Mendagri menambahkan, BPK mem-

Tito mengungkapkan pula prestasi Kemendagri dan BNPP dalam realisasi pemeriksaan anggaran di pemerintahan. Kemendagri dan BNPP telah Sembilan kali berturut-turut dari 2014-2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, berdasarkan data BPK, opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022, dari 542 pemda, terdapat 400 pemda atau lebih kurang 91 persen telah mendapatkan opini WTP.

“Ini ada terjadi kenaikan dalam jumlah yang mendapatkan opini WTP di tahun 2021 sendiri, tapi perlu menjadi catatan bagi kita, di tahun 2022 turun sedikit yang mendapatkan ada tambahan yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Ini mungkin yang perlu dialami daerah-daerah yang dari

entitas di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, yaitu Kemendagri dan BNPP, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), serta 16 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Jawa dan Sumatera.

Menurutnya, entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa, yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh BPK setiap tahun dan merupakan pemeriksaan mandatori untuk memenuhi amanat UU 17/2003.

“Publik memiliki harapan besar bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Kami yakin bahwa seluruh menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah yang dikelola,” jelas Ahmadi Noor Supit.

Ahmadi Noor Supit juga memberikan apresiasi kepada para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah beserta jajarannya atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dia juga menjelaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini meliputi antara lain permasalahan dalam pengelolaan kas, persediaan, aset tetap dan aset lainnya, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Penerapan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peningkatan Manajemen Kas Daerah, serta Pengakuan Utang Piutang Dana Bagi Hasil. ●



berikan paradigma baru, tidak hanya ‘foresight’ dalam kegiatan mengawasi dan memeriksa, tetapi juga ‘insight’ untuk mendalami akar masalah. Pemeriksaannya sendiri tidak saja berbicara terkait kuantitas, tetapi juga kualitas. Mewakili Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pihaknya terbuka dalam menerima masukan untuk perbaikan kualitas di masa mendatang dari BPK.

“Foresight yaitu melihat ke depan agar kekurangan yang lama tidak terulang lagi. Bahkan bisa memberikan masukan alternatif dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, dan paradigma baru BPK RI dengan foresight-nya. Ini merupakan terobosan luar biasa bangsa Indonesia,” ujarnya.

tadinya WTP menjadi WDP,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan apresiasinya kepada BPK atas kerja keras dan dedikasinya selama ini untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas. BPK selaku lembaga negara yang independen dalam memeriksa keuangan negara memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, pemborosan, hingga kesalahan manajemen.

“Intinya adalah untuk adanya tata kelola anggaran pemerintahan yang efektif dan efisien,” ujar mantan Kapolri itu.

Sementara itu, Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit, menambahkan, BPK akan melakukan pemeriksaan pada

Survei Penilaian Integritas KPK INDIKATOR BUDAYA BIROKRASI BERAKHLAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja meluncurkan hasil survei penilaian integritas (SPI) 2023. Survei yang merupakan salah satu upaya perbaikan dari KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu, menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK.

"SPI termasuk dalam salah satu indikator dalam sasaran terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Diharapkan hasil SPI mampu memotret kualitas budaya birokrasi yang bersih sesuai dengan tujuan RB," ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam Peluncuran Hasil SPI 2023 di Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Kementerian PANRB dan KPK bekerja sama dalam memantau pengelolaan konflik kepentingan dan mensinergikan hasil pemantauannya dengan hasil SPI Internal pada setiap instansi pemerintah. Adapun, urgensi melakukan pengelolaan konflik kepentingan di antaranya mewujudkan good governance, perlunya aturan yang lebih berdampak, serta merespons tuntutan

masyarakat.

Sebagai upaya dan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, SPI akan menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi. SPI KPK memiliki bobot 10 poin dan merupakan indikator penilaian indeks RB terbesar dibandingkan dengan indikator penilaian lain.

"Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani dengan fokus perubahan mindset, perbaikan tata kelola kelembagaan, transformasi digital, peningkatan profesionalitas, dan efektivitas pengawasan," ungkap Anas.

Selain itu, indeks RB juga menilai integritas dan kualitas layanan birokrasi melalui survei SPI oleh KPK, penilaian kepatuhan layanan oleh Ombudsman, serta survei persepsi masyarakat terhadap praktik pelayanan publik yang prima dan bebas pungli/calok/KKN oleh Kementerian PANRB. Man-

tan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menyampaikan bahwa dalam pencegahan korupsi, berbagai upaya pengawasan telah dilakukan di berbagai aspek. Diantaranya aspek pengawasan manajerial, masyarakat, fungsional, pengaduan tertentu, dan pengawasan eksternal.

Diharapkan, SPI yang dimotori oleh KPK itu dapat memberikan dampak yang menjangkau langsung ke masyarakat. "Mudah-mudahan survei yang hari ini telah diluncurkan KPK akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua," ungkap Anas.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan, kenaikan dan penurunan skor SPI sangat dipengaruhi oleh komitmen nyata dari pimpinan lembaga, baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Menurutnya, pimpinan yang memandang skor SPI hanya sebagai simbol gengsi akan melakukan apapun untuk meningkatkan skor lembaganya.

"Dalam konotasi negative, kami menemukan beberapa pengaturan dan pengkondisian responden agar skor meningkat drastis, teguran telah kami layangkan, bahkan tidak mempublikasikan skor lembaga tersebut," tuturnya.

Sementara itu, komitmen pimpi-



nan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi akan terlihat ketika skor SPI dipandang sebagai potret dari kondisi saat ini. Sehingga, rekomendasi perbaikan berbasis skor SPI akan dipandang sebagai panduan untuk perbaikan ke depan.

Johanis juga menyampaikan tren Indeks Integritas Nasional. Untuk tahun 2023 target Indeks Integritas Nasional adalah sebesar 74 persen. "Fakta bahwa indeks integritas nasional secara umum

iden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

KPK mengumumkan bahwa Indeks Integritas Nasional Tahun 2023 memperoleh nilai 70,97. Angka ini, ujar Johanis, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yakni 71,94.

"SPI 2023 menunjukkan tren penurunan. Secara sederhana dapat dimengerti sebagai semakin tingginya risiko korupsi di Indonesia. Harapan

wilayah dengan skor SPI tertinggi pada 2023, yaitu 83. Sedangkan wilayah dengan skor terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang memperoleh skor 49.

Berdasarkan kriteria kementerian/ lembaga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lembaga dengan indeks tertinggi yakni mencapai skor 85. Lembaga yang memperoleh skor SPI terendah adalah Radio Republik Indonesia (RRI). Kantor media



mengalami kecenderungan penurunan, mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah berupa perbaikan sistem tata kelola regulasi, dan komitmen harus segera diperbaiki," ujarnya.

Untuk itu, direkomendasikan beberapa hal dalam perbaikan utama salah satunya yaitu digitalisasi pelayanan publik. Dukungan disampaikan atas segala upaya Kementerian PANRB dalam percepatan transformasi digital pemerintahan.

KPK mendukung Kementerian PANRB dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Pres-

kami, SPI yang berikut tak seperti ini dan akan membaik lagi agar korupsi menurun," tuturnya.

Dia menegaskan KPK akan melanjutkan hasil survei ini untuk meningkatkan kinerja lembaga antirasuah itu dalam memberangus korupsi. "Kami akan melakukan upaya-upaya sesuai tugas dan melakukan pencegahan (korupsi) ke depannya," ujarnya.

SPI memiliki beberapa aspek yang dapat dinilai transparansi, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, trading in influence, pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi

pemerintah itu mendapatkan nilai 59.

Dalam data yang dipaparkan, KPK juga menyebut mayoritas pegawai negeri, yakni sebesar 56 persen, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Padahal sikap itu dilarang.

Area survei SPI 2023 KPK ini melibatkan 639 kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Survei ini total melibatkan 553.321 responden. Survei penilaian integritas mengombinasikan survei online dan tatap muka atau computer assisted personal interview (CAPI). Untuk metode online, KPK menyebarkan WhatsApp blast dan email blast terhadap responden terpilih dan CAPI di 131 pemda. ●

Karisma Event Nusantara 2024

HADIRKAN 110 EVENT UNGGULAN DAERAH

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali meluncurkan Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 sebagai salah satu program unggulan sebagai daya tarik wisata. Program ini diharapkan dapat mendorong minat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke berbagai daerah di Tanah Air.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan dalam program KEN tahun ini terdapat 110 event yang terdiri dari 100 event unggulan dan top 10 event.

"Jadi kalau saya mau pilih 10 destinasi untuk berwisata di Indonesia Aja, ini sudah ada event-nya yang bisa saya kunjungi dan 100 (event) untuk sepanjang tahun. Jadi kalau mau healing yang enggak bikin kantong 'kering', yang bisa menghilangkan kepala pening, datanglah ke KEN untuk refreshing," kata Sandi dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno", Senin, 22 Januari 2024.

Plh Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Events Kemenparekraf, Ni Komang Ayu Astiti, mengatakan, 110 event yang terangkum dalam KEN 2024 tersebar di seluruh provinsi Tanah Air.

"Event-event tersebut sudah terkursi dari total 252 event yang diusulkan oleh pemerintah daerah," kata Komang.

Penyelenggaraan KEN 2024 diharapkan menjadi program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu khususnya untuk pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air.

"Karenanya kami mendorong agar pemerintah daerah dapat memetakan media sosial untuk memaksimalkan promosi secara digital agar cakupannya (promosi) lebih luas. Sehingga event-event ini menjadi daya tarik wisata

kan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Total pergerakan wisatawan selama KEN 2023 sebesar 7,4 juta dengan melibatkan 11 ribu pelaku UMKM, 140 ribu pelaku seni, dan menyerap 36 ribu tenaga kerja.



ta agar kunjungan wisatawan benar-benar tertuju ke event-event ini," ujar Komang.

Ketua Pokja Strategi Promosi Event Daerah Kemenparekraf, Eni Komiarti, mengungkapkan, pada 2023, secara keseluruhan program KEN memberikan dampak positif terhadap pergera-

"KEN 2023 juga melibatkan 800 asosiasi dan komunitas. Selain itu juga memberikan kontribusi sebesar Rp199,3 miliar untuk PDB dan perputaran uang yang ada di KEN 2023 mencapai Rp12,42 triliun," ujar Eni.

Untuk peluncuran program KEN 2024 di TMII, Eni mengatakan selain

peluncuran secara resmi, Kemenparekraf juga akan menghadirkan KEN festival yang menggabungkan lima format kegiatan KEN terdiri dari budaya, karnaval, seni, musik juga kuliner.

Tingkatkan Ekonomi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meluncurkan program KEN 2024 yang bertajuk "Budaya Indonesia Panggung Dunia" di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu, 27 Januari 2024.

Sandi menginginkan 110 event berkualitas yang terangkum dalam KEN diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat.

Sandi mengatakan, KEN harus mampu mendorong peningkatan pere-

barang dan jasa (output) di Indonesia mencapai Rp212,2 miliar serta Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp198,6 miliar.

Sementara itu, nilai perputaran uang atau pergerakan ekonomi dari 7,36 juta pengunjung (lokal, domestik, maupun asing) pada acara KEN 2023 mencapai Rp12,38 triliun.

"Targetnya tahun ini terdapat peningkatan pergerakan ekonomi hingga bisa mencapai 20-25 persen dari tahun lalu. Dan harapannya juga ikut menumpang 1,2-1,5 miliar pergerakan wisnus di 2024," katanya.

Sandi mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini event-event di KEN terselenggara secara merata sepanjang tahun. Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

"Pekan depan sudah ada event di

"Zona kuliner ini paling tinggi peminatnya. Berdasarkan data, 63 persen wisatawan itu berkunjung ke suatu daerah untuk berburu kuliner. Untuk itu, di setiap KEN harus ada zona kuliner untuk memperkenalkan kuliner-kuliner terbaik di daerahnya kepada wisatawan," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi promosi rangkaian event yang tergabung KEN 2024 menjadi magnet kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

"Saya mengapresiasi penyelenggaraan 110 perhelatan dalam KEN yang secara konsisten mempromosikan keindahan destinasi wisata dan keunikan budaya bangsa kita, semoga event dapat menjadi magnet bagi wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara," ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga berharap, melalui program strategis Kemenparekraf ini, kunjungan wisatawan tak hanya melirik keindahan alam, namun juga dapat menikmati kekayaan atraksi dan budaya Tanah Air.

"Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat, maka pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia akan bangkit dan semakin maju," katanya.

Pada proses kurasi KEN 2024 yang telah dilakukan pada November-Desember 2023, ada tiga tahapan utama mencakup seleksi administrasi, konten, dan wawancara. Di tahun ini, tahapan melibatkan tim kurator yang terdiri dari lima bidang, di antaranya bidang ide dan inovasi, bidang pemasaran dan strategi komunikasi, bidang manajemen kegiatan, bidang manajemen keuangan, dan bidang analisis dampak.

Bagi wisatawan yang ingin menghadiri berbagai event di Indonesia sepanjang tahun bisa melihat informasi melalui laman event.indonesia.travel atau melalui website resmi dan akun sosial media Kemenparekraf.

KEN merupakan program strategis Kemenparekraf dalam mempromosikan destinasi pariwisata melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara serta menggerakkan wisatawan nusantara agar berwisata di Indonesia. ●



konomian daerah. Ia juga berharap KEN 2024 yang menyajikan kegiatan menarik seperti musik, budaya, seni karnaval, hingga kuliner ini bisa meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara.

"Alhamdulillah, kembali kita meluncurkan KEN 2024 yang akan menampilkan 110 event unggulan yang telah dikurasi dari 252 event usulan Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia," ujarnya.

Sandi mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, penyelenggaraan KEN 2023 telah berkontribusi terhadap peningkatan nilai produksi

Solo, Jawa Tengah, yaitu Grebeg Sudiro dan ini akan terus bergulir di tempat lain, seperti festival Cap Go Meh di Singkawang, Kalimantan Barat, dan beberapa festival yang akan diselenggarakan sepanjang tahun. Sehingga wisatawan juga bisa mudah dalam menentukan tanggal untuk hadir di acara KEN," katanya.

Sandi menekankan, tidak hanya event yang ditonjolkan, namun pemberdayaan UMKM dan kuliner-kuliner andalan daerah juga ditampilkan, sehingga kuliner-kuliner lokal bisa semakin dikenal wisatawan.

BANYAK CARA MEMBANGUN LITERASI DESA

Semangat membangun kualitas sumber daya manusia di desa masih menggebu. Kemendes PDTT memayungi pengembangan literasi warga melalui Taman Bacaan Masyarakat Desa. Berpotensi meluas ke ranah digital.

Sesuai dengan ranahnya, memang banyak cara membangun masyarakat desa. Langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar antara lain adalah meningkatkan literasi warga desa.

Menurut dia, meningkatkan literasi masyarakat desa akan mempercepat

pembangunan desa. "Salah satu media cara kita untuk memahami bahwa desa punya masalah adalah melalui literasi. Literasi untuk masyarakat desa penting sebagai ruang edukasi dalam melaksanakan pembangunan," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di acara Sosialisasi – Dialog Publik Keputusan Mendes PDTT No 3/2024 tentang Taman Bacaan Masyarakat Desa di Desa Mojosongo, Jombang, Jawa Timur, Sabtu, 27 Januari 2024.

Pengertian literasi, salah satunya, adalah kemampuan mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Halim mengemukakan, literasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa yang merupakan kebutuhan utama dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa.

Menurut Mendes, agar gerakan literasi benar-benar berjalan secara

menyeluruh di 75.265 desa di Indonesia, Kemendes PDTT mengeluarkan aturan yang menaungi terkait bacaan masyarakat desa, yakni Keputusan Mendes PDTT No 3 Tahun 2024 tentang Taman Bacaan Masyarakat Desa (TBM) yang ditandatangani Mendes PDTT pada Selasa, 9 Januari 2024.

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang literasi desa, kata dia, pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kualitas SDM dipastikan berjalan semakin cepat. "Harapan kita tentu saja untuk meningkatkan SDM dan ekonomi masyarakat desa menjadi target utama. Semakin mandiri desa itu, maka tidak lagi bicara infrastruktur. Desa mandiri fokusnya pada peningkatan SDM dan ekonomi," ujar Mendes yang biasa disapa Gus Halim ini.

Selain literasi, Gus Halim menambahkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga berperan penting dalam pembangunan



desa. Dengan begitu, kata dia, tidak ada lagi pelaksanaan pembangunan berdasarkan kepentingan elite tertentu, namun dititikberatkan pada potensi dan masalah yang ada.

“Dua hal tersebut dapat diketahui melalui literasi yang semakin kuat. Kita ingin dana desa ini betul-betul membangkitkan partisipasi masyarakat, karena partisipasi warga akan mengawal transparansi dalam pembangunan,” kata Mendes.

Tentu saja terkait pula dengan kualitas sumber daya manusia. “Urusan di desa mulai soal desa digital, beredar-nya hoaks, ujaran kebencian itu karena kurangnya literasi. Maka kata kunci literasi harus betul-betul jadi pegangan kita agar masyarakat kita semakin hari semakin cerdas,” paparnya.

Saat ini Indonesia memiliki 75.251 desa dengan status mandiri mencapai 11.456 desa. Ada korelasi positif antara kemandirian desa dengan peningkatan fasilitas literasi di desa, seperti taman bacaan masyarakat, pojok baca, perpustakaan desa, perpustakaan keliling, e-library desa,

Sejauh ini, data Kemendes PDTT mencatat, dari 75.251 desa, sebanyak 33.902 desa sudah memiliki fasilitas perpustakaan atau taman bacaan. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT Sugito menyatakan dari 33.902 desa itu sebanyak 30.177 desa di antaranya telah mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas perpustakaan atau taman bacaan yang dimiliki.

Sedangkan Kepmen Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan TBM sebagai lembaga atau unit layanan yang didirikan oleh komunitas membaca yang dikelola secara sederhana, swakarsa, dan swadana dan swasembada oleh masyarakat dengan tujuan memberikan akses pelayanan bahan bacaan kepada masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

TBM juga kerap dianggap sebagai gerakan moral yang sifatnya sosial. Alasannya, TBM merupakan salah satu sarana pendidikan nonformal yang dilaksanakan untuk pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Kepmen Desa PDTT No 3 Tahun 2024 menjadi panduan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat desa melalui taman bacaan masyarakat yang berada di desa. Kebijakan Kemendes ini juga menjadi acuan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perangkat desa, kemitraan, dan pihak lain dalam pengelolaan taman bacaan masyarakat desa untuk meningkatkan minat membaca dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kemungkinan kemitraan dalam pengembangan TBM dan sumber daya

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Operation Room, Gedung Utama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jakarta Selatan, Senin, 24 Juli 2023.

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo akan terbuka berkolaborasi dengan Kemendes PDTT dalam menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas infrastruktur digital di desa. “Kominfo memiliki sejumlah peralatan lengkap yang berkaitan dengan teknologi, Sehingga hal ini bisa menjadi



manusia desa pun terbuka ke ranah digital dengan fasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan kesediaan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Harap maklum, Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa PDTT.

“Pembangunan infrastruktur digital di desa-desa harus kita wujudkan, supaya tidak ada lagi yang tertinggal. Jangan sungkan-sungkan berkoordinasi dengan Kominfo dan akan kita support. Bilang saja langsung ke saya. Kalau bisa kita adakan, kita percepat,” ungkapnya dalam Serah Terima Jabatan dengan

acuan bagi sivitas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Menkominfo menekankan arti penting kolaborasi karena pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Menurut dia, pengalaman selama menjadi Wamendes PDTT memberikan pelajaran mengenal pembangunan Indonesia lebih luas.

Gagasan kolaborasi sudah bergulir. Boleh jadi banyak yang menunggu langkah konkret kolaborasi TBM dengan peningkatan infrastruktur digital di desa. ●

MENSOS TAK DIAJAK BAGI BANSOS

Pemerintah mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) akan tetap dilanjutkan hingga tiga bulan pertama 2024.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2024.

Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi. Namun, tidak ada Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers tersebut.

Bukan hanya saat rapat, sosok Risma tidak pernah terlihat saat Presiden Joko Widodo melakukan safari untuk membagikan bansos kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

"Pemerintah telah memutuskan melanjutkan Program Bantuan Pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kilogram dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan," kata Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa bantuan pangan yang akan disalurkan yaitu berupa beras sebanyak 10 kg untuk masing-masing pen-

erima.

Selain itu, untuk penyaluran bantuan langsung tunai, akan dilakukan untuk tiga bulan pertama terlebih dahulu, untuk periode Januari hingga Maret 2024 sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, penyaluran BLT untuk 3 bulan tersebut akan disalurkan sekaligus pada Februari 2024 sebesar

Rp600.000. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk kelanjutan penyaluran BLT untuk periode April hingga Juni 2024.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meny-

bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan.

Dia mengatakan, BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Sri Mulyani juga mengungkapkan alasan Presiden Jokowi setiap membagikan bansos tersebut tanpa melibatkan Risma yang merupakan penanggung jawab pemberian bansos.

Menurutnya, program bantuan terbagi dalam dua kategori, sehingga membedakan penanggung jawab, di mana kemensos tidak menjadi eksekutor dari semua program bantuan.

Rinciannya program bansos adalah amanat dalam UU APBN yang dibahas dan



disetujui secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Sehingga jika pemerintah menjalankan program bansos tersebut sama saja telah menggunakan uang APBN.

Sri Mulyani pun mencontohkan bansos terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan langsung Tunai (BLT) merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial, sehingga seharusnya penanggung jawab dan eksekutornya adalah kementerian tersebut.

"PKH dan Kartu Sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial. Jadi dalam hal ini, Kementerian sosial yang menjelaskan PKH dan Kartu Sembako, termasuk apakah ada tambahan atau modifikasi (program bansos) nanti Ibu Menteri Sosial yang menjelaskan," kata Sri Mulyani, Selasa, 30 Januari 2024.

Sementara untuk bantuan pangan atau beras, penanggung jawabnya adalah Bapanas atau Badan Pangan Nasional, tapi data penerima yang ditujukan untuk program tersebut harus mengacu pada data yang telah disepakati. Dalam arti ini data bisa bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Eksekutornya PKH dan Kartu Sembako adalah Kementerian Sosial, tapi kalau bantuan pangan berupa beras, eksekutornya Bapanas, tapi datanya harus sesuai dengan yang disepakati," katanya.

Pernyataan Sri Mulyani ini setali tiga uang dengan pernyataan pihak Istana Negara saat menepis isu tentang peran Menteri Sosial yang digantikan Presiden Jokowi dalam membagikan bansos pangan. Menurut pihak Istana Negara, bantuan tersebut merupakan program dari Bulog dan Badan Pangan.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bansos yang disalurkan tersebut bukan program Kementerian Sosial, tetapi menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari, 29 Januari 2024.

Di sisi lain, Kementerian Sosial dalam keterangan di Instagram resminya menerangkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan tidak lagi dalam bentuk barang. Dalam cuplikan video ada potongan video Risma yang menyebut sejak 2021, bansos tidak lagi dalam bentuk barang.

"Kemensos tidak memberikan bantuan sosial program sembako dalam bentuk barang. Semua bantuan diberikan uang tunai dan disalurkan langsung melalui rekening kepada keluarga penerima manfaat (KPM)," ungkapnya.

Kemensos mengatakan ada tiga alasan mengapa bantuan sosial tidak lagi disalurkan dengan berupa barang. Per-



"Jadi kami memang mulai 2021, kami tidak ada bentuk barang bantuan kami, bantuan kami tidak bentuk beras, itu tidak," ujar Risma dalam cuplikan video di Instagram @kemensori, Rabu, 31 Januari 2024.

Dalam video tersebut, pihak Kemensos juga menjelaskan bahwa bantuan sosial kini diberikan melalui transfer langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).

tama, dengan bentuk tunai atau uang dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Kedua, penyaluran bantuan berupa barang rawan akan kerusakan karena berbagai faktor eksternal.

"Ketiga, bansos dalam bentuk uang tunai lebih diketahui status dan proses transaksi penyalurannya sehingga bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," pungkas Kemensos. •

CUKUPI GIZI ANAK MENUJU INDONESIA EMAS

Indonesia akan mencapai usia emas pada 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia genap berusia satu abad alias 100 tahun dan ditargetkan telah menjadi negara sejahtera serta maju, setara dengan negara maju lainnya.

Untuk menuju ke arah itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut perlu generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar. Karena itu, gizi setiap anak Indonesia harus dipastikan tercukupi.

"Kalau anak-anak kita tidak sehat dan tidak pintar, tidak mungkin Indonesia bisa jadi negara maju. Pak Presiden ingin kita menjadi Indonesia emas. Kalau ingin sehat dan pintar, anak-anak kita tidak

boleh kekurangan gizi. Karena kalau kekurangan gizi, pasti tidak bisa pintar ketika besarnya," kata Menkes ketika menghadiri puncak Peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu, 28 Januari 2024.

Agar asupan gizi dan nutrisinya tercukupi,

Menkes menyampaikan

setidaknya ada tiga langkah penting yang harus dilakukan

oleh kader kesehatan di Posyandu selaku garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat

Pertama, Menkes mendorong agar kader kesehatan rutin melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan di Posyandu.

"Kedua, kalau berat dan tinggi badan tidak naik, harus langsung dirujuk ke dokter di puskesmas, untuk lihat ada masalah apa," kata Menkes.

Ketiga, anak yang mempunyai masalah gizi harus diberikan makanan pendamping ASI kaya protein hewani. Sebab, protein hewani mengandung mikronutrien yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan otak balita.

"Makanannya boleh apa saja, yang penting ada protein hewani, bisa telur, ikan, daging, supaya gizinya tidak kurang, supaya anaknya pintar, anaknya sehat," tutur Menkes.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menambahkan, dalam makanan pendamping ASI, pemberian protein hewani harus cukup. Sebab, saat anak berusia enam bulan kebutuhan nutrisinya tidak lagi bisa dicukupi dari ASI.

"Kalau bisa dua jenis dan itu setiap kali makan. Kemenkes sudah mengeluarkan banyak pedoman, banyak resep dan tips-tips yang bisa diakses di ayosehat.kemkes.go.id," kata Endang.

Asupan protein hewani juga sebaiknya tidak hanya diberikan saat anak mengonsumsi makanan berat, pada makanan snack pun harus selalu ada protein hewannya.

Endang menuturkan, untuk mengetahui efektivitas pem-



berian protein hewani pada tumbuh kembang anak, orang tua sebaiknya melakukan pemantauan setiap bulan. Apabila berat badan anak tidak naik, segera periksa ke dokter di puskesmas untuk selanjutnya diintervensi sebelum terlambat.

Sebelumnya, Endang juga mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional 2024 menjadi momentum yang baik dalam menggalang kepedulian dan komitmen bersama untuk pengendalian stunting di Indonesia.

"Hari Gizi Nasional tahun ini adalah momentum yang baik demi tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen," kata Endang, Jumat, 26 Januari 2024.

Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 24,4 persen tahun 2021, kata Endang, tapi angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu berkisar 21,6 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Oleh karena itu, masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada 2024 sebesar 14 persen.

Hasil yang cukup memprihatinkan dari survei yang sama adalah risiko terjadinya stunting meningkat sebesar 1,6 kali dari kelompok umur 6-11 bulan ke kelompok umur 12-23 bulan (13,7 persen ke 22,4 persen). Hal ini menunjukkan kegagalan dalam pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak usia 6 bulan, baik dari segi kesesuaian umur, frekuensi, jumlah, tekstur dan variasi makanan.

Merespons hal tersebut, Kementerian Kesehatan menerbitkan panduan pengendalian stunting yang disusun sebagai acuan penyelenggara di tingkat pusat dan daerah serta berbagai pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Peringatan HGN tahun ini.

Dia mengatakan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronik yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut usia yang berada di bawah minus 2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Standar Antropometri Anak.

"Upaya pencegahan stunting dimulai dari pemantauan pertumbuhan. Apabila ditemukan di Posyandu balita dengan berat badan yang tidak naik, maka harus segera diperiksa ke dokter di Puskesmas," katanya.

Menurutnya, balita yang tidak naik atau berat badan kurang dapat dicegah menjadi stunting dengan mengonsumsi protein hewani yang cukup.

"Hasil studi yang dilakukan oleh Headey et.al pada 2018 menyatakan adanya bukti kuat hubungan antara stunting dan indikator konsumsi pangan berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur dan susu atau produk

turunannya seperti keju, yoghurt, dan lainnya," katanya.

Penelitian juga menunjukkan konsumsi pangan berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi pangan berasal dari hewani tunggal.

Endang berharap kegiatan peringatan HGN kali dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan berperan aktif menggaungkan MP-ASI untuk anak usia 6-23 bulan yang kaya akan protein hewani dan pemantauan pertumbuhan anak setiap bulan.

"Apabila berat badan anak tidak naik, maka segera periksa ke dokter di puskesmas," katanya. •



UMKM DAN PEDAGANG PASAR TULANG PUNGGUNG EKONOMI NASIONAL



Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang pasar rakyat harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan masuk ke pasar digital melalui platform niaga elektronik.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan, peran digitalisasi bagi pelaku UMKM dan pedagang pasar sangat penting, sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli rumah tangga. Saat ini, pelaku UMKM telah menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Digitalisasi ini sebuah keniscayaan. Sesuai perkembangan zaman, saat ini ilmu berdagang adalah digitalisasi. Kalau kita sebagai UMKM dan pedagang tidak ikut serta, bisa ketinggalan. Kita bisa menjadi dinosaurus karena semua sudah berubah dengan cepat," ujar Zulhas saat menghadiri sosialisasi bertajuk Digitalisasi Sebagai Strategi UMKM dan Pedagang Naik Kelas di Kota Surakarta, Jawa Tengah, 31 Januari 2024.

Zulhas menyampaikan, UMKM dan pasar rakyat turut berkontribusi terhadap kinerja ekonomi 2023. Hingga triwulan III-2023, ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05 persen. Konsistensi pertumbuhan ini menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Inflasi Indonesia juga terkendali di level 2,61 persen (YoY) per Desember 2023. "Capaian ini tidak akan terwujud tanpa peran UMKM dan pasar rakyat. Memang pondasi atau tulang punggung ekonomi Indonesia itu adalah UMKM dan pasar rakyat," kata Zulhas.

Zulhas menambahkan, potensi kon-

tribusi UMKM dan pasar rakyat dalam perekonomian pun menjadi perhatian pemerintah. Bahkan ia berharap, keberpihakan pemerintah kepada UMKM dan pedagang pasar dapat mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang unggul dan mampu berwirausaha.

"Keberpihakan pemerintah kepada UMKM dan pedagang memang all out. Saya meyakini upaya pemerintah akan menjadi cikal bakal lahirnya sumber daya manusia yang unggul dan mengerti dunia usaha," ujar Zulhas.

Untuk mendukung usaha para pedagang di pasar rakyat, Kemendag pun menjalankan program pembenahan pasar rakyat. Pada periode 2015-2023, Kemendag telah membenahi secara fisik 5.352 unit pasar rakyat di Indonesia. Revitalisasi diperlukan untuk memberi tempat yang aman dan nyaman bagi UMKM dan pedagang pasar rakyat untuk mempromosikan produk unggulan daerah serta mendukung kelancaran logistik.

Selain revitalisasi fisik, revitalisasi non-fisik juga perlu untuk meningkatkan potensi pedagang dan UMKM yang berjualan di pasar rakyat. Terdapat empat aspek nonfisik yang perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan mengelola keuangan; etika berdagang; tata kelola; serta dorongan digitalisasi yang berkolaborasi dengan platform-platform niaga elektronik, kementerian, dan lembaga.

Saat ini, Kemendag telah melaksanakan empat strategi untuk mendorong UMKM dan pedagang untuk naik kelas. Keempat strategi tersebut adalah berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk mendorong metode pembayaran melalui QRIS, berkolaborasi dengan Grab Mart sebagai platform delivery on demand, berkolaborasi dengan platform niaga elektronik Dagangan dalam memperkuat suplai produk berbasis digital, serta berkolaborasi dengan Tokopedia untuk mendorong pedagang dan UMKM masuk ke dalam loka-pasar.

Berdasarkan data Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Kemendag, hingga akhir 2023, capaian penerapan digitalisasi di pasar rakyat telah menjangkau 4.926 pasar dan 276.486 pedagang pasar. Selain itu, 3.353 pasar rakyat telah menggunakan situs web pasar melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan

(SISP) dan Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR), 537 pasar rakyat memanfaatkan e-monitoring harga barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), 393 pasar rakyat menerapkan pembayaran nontunai menggunakan QRIS, 373 pasar rakyat menggunakan sistem pembayaran retribusi secara elektronik (e-retribusi), 158 pasar rakyat menggunakan layanan platform delivery on demand, dan 112 pasar rakyat telah onboard ke dalam lokapasar digital.

Perluas Pemasaran UMKM

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menyampaikan, pemerin-

kata Jerry.

Empat pilar tersebut, ungkap Jerry, memiliki peran masing-masing. Ritel modern dapat menampung produk UMKM dan membantu logistik, loka-pasar dapat membantu memasarkan produk dari UMKM agar dikenal luas, serta lembaga pembiayaan dan perbankan dapat membantu permodalan agar dapat menembus pasar ekspor.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan juga menjalin kerja sama dengan pihak perbankan nasional untuk menyalurkan pendanaan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat. Jerry menekankan, adanya bantuan permodalan diharapkan UMKM da-



tah melalui Kementerian Perdagangan mendukung perluasan akses pemasaran bagi UMKM melalui program kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Jerry pada pembukaan secara resmi Factory Outlet Cikarang Baru Trade Center di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2024.

"Konsep gerai pabrik (factory outlet) ini sangat baik. Pelaku usaha berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membantu mengembangkan gerai UMKM, khususnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Konsep kolaborasi UMKM bukan hal baru. UMKM adalah salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekosistemnya harus diperkuat dengan pilar lain, seperti lokapasar, ritel modern, dan lembaga pembiayaan,"

pat meningkatkan kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan pasar.

Melalui gerai pabrik tersebut, Pemkab Bekasi ingin menciptakan wisata industri, berupa kunjungan pabrik. Pengunjung nantinya bisa membeli cendera mata dari UMKM yang berlokasi di kawasan wisata industri. Bagi produk UMKM yang memiliki potensi ekspor, Kementerian Perdagangan dapat memberikan bantuan pelatihan dan akses ke perwakilan perdagangan di 46 negara.

"Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM siap ekspor melalui program pelatihan ekspor, program pendampingan ekspor, dan akses ke 46 perwakilan dagang di luar negeri. Perwadag siap memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha, seperti permintaan informasi pasar atau mencari buyer potensial," urai Jerry. ●



MENDENGARKAN SEMUA KELUHAN RAKYAT

Langkah nyata Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud untuk melakukan pemerataan pembangunan di Bumi Serasan Sekate tahun 2024 patut diacungi jempol. Bahkan untuk mendengarkan semua keluhan masyarakatnya Apriyadi menginap di rumah warga agar komunikasi yang disampaikan dapat mengena sasaran.

Untuk memantau perkembangan hingga ke pelosok daerah, Apriyadi Mahmud turun langsung melihat kinerja perangkat desa secara langsung. Bahkan ikut mementori mereka saat sedang melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tungkal Jaya.

"Dahulukan yang strategis, fokus yang jadi skala prioritas di desa-desa wilayah Tungkal Jaya," ungkap Apriyadi dihadapan para Kades Kecamatan Tungkal Jaya.

Menurutnya, kondisi yang mendesak saat ini yakni pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa.

"Usulkan pembangunan yang mendesak dan sangat dibutuhkan

masyarakat pedesaan," tegasnya.

Ia juga meminta agar perangkat desa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memaksimalkan struktur ekonomi masyarakat pedesaan.

"Saat ini juga sedang berproses peralihan pengguna listrik MEP ke PLN. Wilayah Tungkal Jaya juga akan dilakukan mulai tahun 2024 ini," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Tungkal Jaya Yudi Suhendra SE MSi mengucapkan terima kasih atas kehadiran langsung Pj Bupati Apriyadi Mahmud yang turun langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tungkal Jaya.

"Perangkat desa menjadi antusias dan bisa lebih mematangkan skala pri-

oritas pembangunan di wilayah Tungkal Jaya,” tandasnya.

Menginap di Rumah Warga

Kedekatan Apriyadi Mahmud dengan masyarakatnya patut diapresiasi karena tidak segan menginap di pemukiman desa agar bisa membaur bersama sekaligus menampung semua keluhan masyarakat desa.

Dimana setelah menyisir daerah pelosok di Kecamatan Tungkal Jaya dan Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko, Pj Bupati Apriyadi Mahmud memutuskan bermalam bersama warga di Dusun 4 Desa Lubuk Bintialo..

Tak ingin kehilangan momen, ramai-ramai Tokoh Masyarakat dan warga Desa Lubuk Bintialo mendatangi Pj Bupati Apriyadi Mahmud yang menginap di kediaman warga di Desa tersebut.

“Kami sangat senang pak Bupati Apriyadi mau menginap di desa kami ini, Alhamdulillah curhatan warga soal jalan rusak semoga bisa segera diperbaiki,” ungkap salah satu warga Desa Lubuk Bintialo, Asri dihadapan Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Dikatakannya, terlebih saat kondisi hujan beberapa akses jalan di Desa Lubuk Bintialo sulit dilalui karena kondisi tanah yang licin.

“Semoga ke depan bisa dituntaskan pak Bupati Apriyadi,” harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengaku, persoalan infrastruktur jalan di Muba memang diakui masih banyak yang belum layak untuk dinikmati masyarakat.

“Namun Pemkab Muba akan membenahinya, secara bertahap. Insya Allah termasuk jalan di Desa Lubuk Bintialo akan diperbaiki,” ungkap dia.

Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel itu mengucapkan terima kasih atas penyambutan warga Desa Lubuk Bintialo dan menerima dengan hangat dirinya untuk bermalam di Batanghari Leko.

“Semoga bertahap apa yang menjadi kebutuhan mendesak warga akan direalisasikan satu persatu,” pungkasnya.

Usai bermalam bersama warga di Desa Lubuk Bintialo, Pj Bupati Apriyadi Mahmud menyambangi Puskesmas Lubuk Bintialo.

Fasilitas yang masih minim serta



harus melayani kesehatan warga di tiga desa Kecamatan Batanghari Leko yakni diantaranya Desa Sako Suban, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Lubuk Bintialo membuat Apriyadi prihatin dengan kondisi Puskesmas tersebut.

“Puskesmas ini terpaksa harus melayani warga di tiga desa, saat ini fasilitasnya masih terbilang minim. Ke depan harus ditambah fasilitas perawatannya, agar warga yang berobat nyaman,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

la menambahkan, dengan fasilitas Puskesmas yang baik dan layak dapat membuat warga atau pasien yang berobat lebih baik.

“Saya cek tadi ruang IGD masih banyak yang kurang, masih banyak yang harus ditambah lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Lubuk Bintialo, drg Stepni Alpina mengatakan saat ini tercatat ada sebanyak tiga dokter yang melayani kesehatan di Puskesmas Lubuk Bintialo.

“Kemudian ada puluhan tenaga kesehatan lainnya yang turut membantu. Disini kita juga melayani warga dari Desa Sako Suban dan Desa Pangkalan Bulian yang ingin berobat,” tuturnya.

Sementara jajaran pegawai dan staf Puskesmas Lubuk Bintialo tidak menyangka akan didatangi langsung Bupati Muba ini.

“Kami sangat senang pak Bupati Apriyadi cek langsung apa yang menjadi kebutuhan kami disini, semoga dalam waktu dekat bisa terealisasi,” pungkasnya. ●

PEMILIH PEMULA PALEMBANG MAMPU MENENTUKAN PILIHAN

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengajak 1,5 juta pemilih pemula untuk tidak golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menegaskan pentingnya partisipasi aktif para pemilih pemula dengan menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS).

Dewa mengungkapkan harapannya terhadap pemilih pemula agar bijak dalam menentukan pilihan mereka.

"Saya harap 53,17 persen pemilih pemula yang memiliki peran besar dalam menentukan masa depan, dapat cerdas dalam memilih dan bersedia datang ke TPS

pada tanggal 14 Februari nanti," ujarnya.

Ratu Dewa berharap generasi muda Palembang dapat secara aktif berkontribusi dalam menentukan arah kemajuan Indonesia.

"Saya yakin pemilih pemula Kota Palembang sudah mampu menentukan pilihan yang baik untuk kemajuan Indonesia," tambahnya.

Ratu Dewa menyoroti pentingnya suara dan hak pilih dari generasi Z dalam menyukseskan pemilu yang tinggal beberapa hari lagi.

"Saya mengajak mereka untuk bersama-sama menggunakan hak suaranya pada 14 Februari mendatang

dengan mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS)

masing-masing. Saya juga mengajak mereka untuk bijak menggunakan media sosial tanpa merendahkan orang lain," ulasnya.

Selain mengajak pemilih pemula, Ratu Dewa juga memberikan pesan kepada para ketua RT dan RW di wilayah tersebut. Ia menekankan agar para ketua RT/RW tidak mempengaruhi warga untuk memilih calon legislatif atau calon presiden tertentu saat p e n -

coblosan.

Ratu Dewa mengimbau agar ketua RT/RW tidak memberikan dukungan atau arahan kepada warga untuk memilih salah satu calon.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan penilaian pribadi mereka sendiri.

Sebelumnya Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengingatkan seluruh pemilih pemula, khususnya siswa-siswi kelas XII SLTA se-Sumsel untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

"Gunakan hak pilih sebaik-baiknya karena kesan pertama kita memilih itulah yang tidak akan kita lupakan. Oleh karena itu, gunakan kesempatan pertama ini dengan sebaik-baiknya," kata Fatoni.

Fatoni menegaskan, peran generasi muda sangat penting dalam memilih pemimpin untuk masa depan bangsa, negara dan daerah.

Fatoni juga mengingatkan para pemilih agar tidak golput dan terprovokasi terhadap berita bohong (hoax) yang akan menimbulkan konflik di masyarakat.

Kemudian, Fatoni menegaskan untuk menjaga kondusifitas daerah selama tahun politik berlangsung. Dia juga berharap agar siswa-siswa SLTA dapat menjaga status zero konflik di Sumsel.

"Kita harus bisa menjadi contoh daerah yang menyukseskan Pemilu, Pilkada dengan damai dan sukses komitmen ini kita harus jaga bersama jaga kondusifitas di Sumsel ini kita pertahankan zero konflik," ucap Fatoni.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Ari Sutiadi mengingatkan generasi muda agar tidak terjerat



oleh isu hoaks yang sering beredar di media sosial.

"Media sosial saat ini sangat populer dan penyebaran berita hoaks masih terus meningkat. Namun, data hingga Januari 2024 menunjukkan penurunan jumlah hoaks menjadi 204 ribu, meskipun angka tersebut masih cukup signifikan," ujarnya.

Budi Ari menekankan bahwa partisipasi pemilih pemula memiliki dampak besar terhadap kualitas pemilu. Semakin tinggi partisipasi dan kesadaran warga dalam menggunakan hak pilihnya, maka pemilu yang diadakan pada 14 Februari mendatang akan semakin berkualitas.

"Pemilih pemula perlu cerdas dalam menggunakan hak pilihnya," tambahnya.

STRATEGI PEMILIH CERDAS

Sebagai pemilih pemula perlu mengetahui strategi agar menjadi pemilih cerdas menjelang Pemilu 2024. Di-lansir dari website resmi KPU berikut strategi menjadi pemilih cerdas.

1. Telusuri Rekam Jejak, Visi Misi, dan Program Kerja

Sebagai pemilih cerdas harus rajin menelusuri informasi rekam jejak calon pilihannya mulai dari latar belakang, pendidikan, keluarga, aktivitas sosialnya. Selanjutnya, pemilih harus memperhatikan visi misi yang dibuat. Lalu pilihlah calon pemimpin yang mempunyai program kerja yang terukur dan realistis.

2. Lawan Money Politik

Money politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan pelecehan terhadap masyarakat sebagai pemilih. Ini merupakan fenomena yang sudah sangat lazim pada masyarakat di Indonesia menjelang pemilu.

3. Jadilah Pemilih yang Berdaulat

Pemilih yang berdaulat adalah pemilih yang tanpa ada intervensi politik oleh siapapun dan apapun. Pemilu pemula diharapkan menjaga independensi sebagai pemilih pemula menjelang pemilu di Indonesia.

4. Jangan Menjadi Golongan Putih

(Golput)

Mengajak orang-orang sekitar untuk menggunakan hak suaranya serta memberikan informasi seputar pemilu 2024 dari sumber yang terpercaya. Diharapkan dengan mengajak orang-

Cerdas dalam Pemilu" yang dengan mudah diakses oleh pemilih pemula. Selain itu ada komitmen dari KPU dan Bawaslu untuk melakukan edukasi kepada pemilih Pemula untuk memberikan hak suaranya.



orang sekitar, kita tidak menjadi Golput.

5. Berpartisipasi Aktif Menjadi Pemilih Pemula

Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan pemilih pemula dalam politik sehingga pemilih dapat berpartisipasi aktif untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas.

6. Iklan di Media Massa

Harus ada penyajian iklan di media dengan tema "Generasi Pemilih

7. Sosialisasi Secara Langsung kepada Pemilih Pemula

Membuat kegiatan sosialisasi mengenai pemilih cerdas secara langsung kepada pemilih pemula. Sebagai contoh KPU Padang Pariaman membentuk Duta Demokrasi. Sebagai contoh Pemilihan Ketua Osis (Pemilos) adalah sarana penerapan praktik demokrasi dan pemilu di lingkungan sekolah.

• IRY

KENALKAN 4 JURUS KENDALIKAN INFLASI

Berbagai terobosan terus dilakukan pejabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya dalam mengendalikan inflasi di Kabupaten OKI. Bahkan Asmar Wijaya mengenalkan empat inovasi Pemkab OKI untuk pengendalian inflasi.

Jurus yang diluncurkan Pj Bupati OKI untuk mengendalikan inflasi adalah Perjaka, Bismillah, Balap Becak dan Midang. Keempat jurus ini diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten OKI.

Perjaka atau Perusahaan Menjaga Keterjangkauan Harga merupakan jurus atau langsung untuk membentuk kerjasama Pemkab OKI dengan perusahaan/swasta melalui Forum CSR agar bisa mensubsidi komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Bismillah atau Baznas Isi Subsidi melalui Amal Ibadah yaitu program penyaluran zakat, infak dari Baznas OKI untuk mensubsidi komoditas pada pasar murah.

Balap Becak yakni program bantuan langsung bertanam cabe serentak. Melalui gerakan menanam cabe yang dilakukan seluruh kecamatan dan desa yang didukung melalui dana wilayah masing-masing.

Agar program ini berhasil dan tercapai pelaksanaannya mendapat pembinaan langsung Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di setiap kecamatan.

Kemudian jurus Midang

yakni program Monitoring Harga dan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Melalui program ini dapat melakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau harga di tingkat pasar bekerjasama Dinas Perdagangan dan Dinas Komunikasi Informatika OKI.

"Kabupaten OKI ditetapkan sebagai salah satu dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) sehingga kami harus memantapkan sinergi dan inovasi pengendalian inflasi," ujar

Pj. Bupati OKI, Asmar Wijayapada Launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan (GPISS).

Dia mengatakan, kontribusi Pemkab OKI dalam gerakan

yang digelar serentak se Sumsel itu Pemkab OKI juga mengadakan pasar murah bersubsidi untuk masyarakat di Gedung Kesenian Kayuagung. Pada kesempatan itu disediakan sebanyak 8 ton beras dan 1.600 liter minyak goreng.

"Ada paket berupa beras 5 kilogram dan minyak goreng satu liter yang dijual bersubsidi. Kalau di pasar harganya senilai Rp 80.000 disini masyarakat bisa membelinya hanya dengan Rp.65.000," terang Asmar.

Melihat langkah Asmar Wijaya dalam mengatasi inflasi di Kabupaten OKI, Pj. Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengapresiasi inovasi Pemkab OKI.

"Terima kasih kepada Kabupaten OKI. Setiap inovasi agar dicatat sehingga dapat direplikasi daerah lain. Tujuannya agar program dan inovasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat", terang Agus Fatoni.

Pj. Gubernur juga mengatakan kegiatan pengendalian inflasi melalui pasar murah dilakukan rutin dan serentak setiap





hari Senin, Selasa, dan Kamis.

Agus Fatoni juga berharap kegiatan pasar murah ini mampu memberikan akses pangan murah bagi masyarakat dan sebagai upaya strategis menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

Pasar Murah 3 Kali Sepekan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara berkesinambungan dan konsisten menggelar kegiatan pasar murah. Pasar murah tersebut melibatkan perusahaan sekitar serta toko tani Indonesia Kabupaten OKI.

"Ini sudah yang ketiga kalinya untuk awal tahun 2024, setelah sebelumnya diadakan di Gedung Kesenian dan halaman kantor Dinas KPTPH. Kali ini kita pusatkan di Taman Segitiga Emas Kayuagung, mengapa digelar disini karena tempat ini cukup ramai setiap hari dikunjungi masyarakat," ujar Pj. Bupati OKI Asmar Wijaya saat meninjau kegiatan pasar murah.

Asmar menjelaskan kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik dari berbagai pihak dari lintas sektor.

"Kegiatan ini tentunya dapat terselenggara berkat kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas KPTPH, dinas perdagangan, dinas perikanan, dan juga lintas sektor

dan perusahaan seperti dari Bank Sum-sel Babel, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hingga Toko Tani," ujar Asmar.

Asmar mengatakan bahwa kegiatan ini selain bertujuan untuk menekan laju angka inflasi juga membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan yang lebih terjangkau.

"Tahun ini Kabupaten OKI menjadi salah satu lokus penentuan angka inflasi di Sumsel, kegiatan ini selain bertujuan untuk menekan angka inflasi juga bertujuan membantu masyarakat agar

mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dari pada di pasaran," ungkapnya.

Pj Bupati Asmar mengharapkan kegiatan ini dapat membantu masyarakat dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, kita harapkan masyarakat dapat terbantu serta angka inflasi khususnya di Kabupaten OKI dapat terjaga dan stabil," pungkasnya. •



ASN OGAN ILIR TIDAK NETRAL AKAN DIPECAT



Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ogan Ilir, Muh-sin Abdullah, kembali menekankan pentingnya netralitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.

Muhsin mengancam akan memberhentikan ASN yang tidak menjaga netralitas pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Saya tegaskan kepada seluruh ASN agar tetap netral. Tidak boleh memihak pada salah satu calon yang ikut dalam kompetisi, karena jika ditemukan melanggar, sanksi yang diberikan bisa mencapai pemberhentian," tegas Muhsin.

Muhsin menjelaskan bahwa ia sudah mengkomunikasikan kepada seluruh ASN di Ogan Ilir untuk berkomitmen menjaga netralitas demi kelancaran pemilu. Netralitas ASN pada pemilu 2024 sangat dipantau oleh pemerintah pusat.

"Netralitas ASN pada pemilu 2024 ini benar-benar dipantau ketat oleh pemerintah pusat, oleh karena itu, kami tidak bisa meremehkannya," ungkapnya.

Pentingnya netralitas ASN tersebut tercermin dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh lima menteri, yang mengatur Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN.

Selain itu, netralitas ASN saat pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Muhsin menyoroti Pasal 9 Ayat 2 dari undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari segala golongan dan partai politik.

Poin 7 lampiran kedua SKB juga mencatat larangan bagi ASN untuk mengunggah dukungan terhadap kandidat

tertentu ke media sosial.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi disiplin berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

"Sanksi disiplin berat mencakup penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, hingga pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)," jelas Muhsin.

Sebelumnya, seorang oknum kepala desa di Ogan Ilir yang dilaporkan terlibat dalam dugaan pelanggaran netralitas Pemilu masih dalam proses penanganan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah merespons isu terkait kepala desa yang diduga tidak netral, dengan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang.

"Sudah diproses hukum. Kami menunggu saja," Muhsin Abdullah.

Muhsin juga mengklarifikasi bahwa belum ada keputusan untuk menonaktifkan kepala desa tersebut, karena hal itu perlu menunggu kepastian hukum.

"Belum ada penonaktifan. Kami menunggu setelah ada keputusan inkrah, baru kita melihat tindak lanjutnya seperti apa. Kalau memang bersalah, bisa dinonaktifkan," jelas Muhsin.

Diketahui, seorang kepala desa di Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, dengan inisial AP, dilaporkan karena diduga melanggar netralitas sebagai aparat desa menjelang Pemilu Legislatif 2024.

Video berdurasi lebih dari 2 menit menunjukkan AP mengumpulkan warga dan diduga membahas dukungan terhadap salah satu calon legislatif.

"Infonya kepala desa di Ogan Ilir, Apa boleh kades kampanyekan salah satu caleg? Tolong Bawaslu Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir tindakannya. Kades harus netral," tulis narasi dalam video tersebut.

Rambang Kuang termasuk dalam daerah pemilihan (dapil) IV bersama Kecamatan Muara Kuang dan Lubuk Keliat. Bawaslu Ogan Ilir telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas pada Pemilu 2024 oleh kepala desa tersebut.

Ketua Divisi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Ogan Ilir, Lily

Oktayanti, menyatakan bahwa ini adalah laporan pertama terkait dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2024 yang diterima oleh lembaga tersebut.

"Laporan terkait pelanggaran netralitas Pemilu oleh terlapor berinisial AP dilayangkan ke Bawaslu Ogan Ilir," ungkap Lily.

Bawaslu Ogan Ilir akan melakukan pengkajian awal setelah menerima laporan dan kemudian mengadakan rapat pleno. Pelapor menyebutkan bahwa oknum kepala desa tersebut mengumpulkan warga pada 7 Desember 2023 lalu dan mengarahkan mereka untuk memilih salah satu calon legislatif.

"Tentunya kami akan segera menindaklanjuti laporan yang masuk sesuai

fat fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang mungkin muncul. Selain itu, pasukan cadangan, termasuk dari TNI, juga akan ikut serta dalam upaya pengamanan tersebut.

Hingga saat ini, Kapolres menyatakan bahwa belum ada pelanggaran yang terdeteksi, namun pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengawal seluruh tahapan pemilu ke depannya.

"Kami terus memantau situasi politik. Saat ini belum ada potensi kerawanan. Kami akan terus memantau perkembangan tahapan kampanye ke depan," jelasnya.

Kapolres juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, belum ada daerah di Ogan Ilir yang dianggap rawan, termasuk



bukti yang ada," tegas Lily.

Jika terbukti melanggar, oknum kepala desa dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelanggaran kampanye, dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

"Kami mengimbau rekan-rekan di ASN dan juga para kepala desa untuk menjaga netralitas sehingga Pemilu 2024 nanti dapat berlangsung dengan tertib dan damai," pesan Lily.

Sementara, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ogan Ilir, Andi Baso Rahman, mengumumkan bahwa mereka akan menempatkan 555 anggota Polres, termasuk Polsek di wilayahnya, untuk memastikan keamanan pemilu serentak tahun 2024.

Menurut Kapolres, mereka akan mendapatkan bantuan BKO (Bantuan Khusus Operasi) dari Polda, yang bersi-

uk dalam hal politik uang atau money politic.

"Untuk mencegah praktik politik uang, kami melakukan upaya preemtif dan preventif, serta memberikan himbauan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait," katanya.

Dalam konteks netralitas, Kapolres mengakui bahwa mereka telah memberikan penekanan kepada anggota Polri dan ASN agar tetap netral. Hal ini mencakup penggunaan sarana dan prasarana fasilitas negara yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Kami melakukan pengawasan khusus terhadap anggota Polri yang memiliki keluarga yang terlibat dalam kontestasi politik. Meskipun tidak ada larangan, kami memberikan himbauan dan peringatan agar mereka tidak melanggar kode etik atau aturan disiplin," pungkasnya. •IRY

ANGGOTA PTPS PALI DILARANG TERLIBAT KAMPANYE POLITIK

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo melantik anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagai simbol kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Heri Amalindo menyampaikan kesediaan anggota PTPS untuk mengawasi proses pemungutan suara Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dikatakan Heri Amalindo bahwa anggota PTPS penting berkoordinasi dengan instansi terkait ketika menghadapi permasalahan di lapangan.

"Pentingnya penyelesaian cepat masalah di lapangan dan mendorong anggota PTPS untuk berkoordinasi dengan Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan," katanya.

Ia menegaskan agar anggota PTPS tidak terlibat dalam kampanye politik, mengingat peran kritis mereka sebagai pengawas.

"Anggota PTPS harus menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsi. Tadi anda sudah disumpah, itu harus dijalankan dan pegang teguh azas Pemilu yakni Luber dan Jurdil," tegasnya.

Heri Amalinda juga berharap agar PTPS dapat bekerja secara sinergis dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan untuk menjamin keberhasilan Pemilu.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu PALI, Lestrianti, mengakui bahwa tugas PTPS tidak ringan.

"Mulai saat ini, jiwa dan raga

PTPS separuhnya milik Bawaslu. Jaga Pemilu 2024 sesuai Undang-Undang karena tugas anda tidak ringan," ujar Lestrianti.

Lestrianti juga menekankan agar PTPS bekerja penuh waktu, menjaga demokrasi, dan tidak hanya berada di TPS pada saat pemungutan suara.

"Ujung tombak demokrasi ada di bahu PTPS, jangan datang lalu pergi, tapi bekerja penuh waktu kecuali sakit, tidak ada alasan meninggalkan TPS sebelum proses Pemilu selesai," tegasnya.

Dengan menekankan bahwa

PTPS memiliki kontribusi penting, Lestrianti berharap agar PTPS dapat memastikan proses pemungutan suara berlangsung dengan jujur dan adil, serta menjaga ketenangan selama masa tenang Pemilu.

Sementara itu, Ketua Panwascam Kecamatan Talang Ubi Johan Saputra, mengatakan bahwa pelantikan dan pembekalan PTPS

ini merupakan upaya untuk mempersiapkan PTPS agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Ia juga berharap agar PTPS dapat menjadi pengawas yang profesional dan berintegritas.

Sementara, Personel Polsek Penukal Abab Polres PALI telah melaksanakan monitoring kegiatan pelantikan dan pembekalan anggota PTPS untuk Pemilu Tahun 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Sedikitnya 87 anggota PTPS telah dilantik dan diberikan pembekalan untuk menghadapi Pemilu 2024. Mereka berasal dari 13 desa di wilayah Kecamatan Penukal.

Kanit Intelkam, Aipda Rudi Hartono menyampaikan bahwa anggota PTPS yang telah dilantik akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing, dengan satu PTPS bertanggung jawab atas satu TPS.

Dengan harapan agar anggota PTPS yang baru dilantik memahami tugas dan peran mereka dengan baik, sehingga



dapat berkontribusi dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Diharapkan agar anggota PTPS yang baru dilantik dapat memahami tugas dan peran dengan baik, sehingga dapat berkontribusi dalam mensukseskan Pemilu 2024," tegasnya.

Sedangkan, Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres PALI, kembali menggelar patroli rutin sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keamanan gudang logistik KPU Kabupaten PALI yang menyimpan berbagai barang logistik untuk Pemilu 2024.

Patroli dipimpin oleh Kasat Samapta Polres PALI, AKP Hermanto A.Md., dan melibatkan 5 personel Sat Samapta. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan keamanan gudang logistik KPU serta mencegah potensi gangguan atau tindakan yang dapat merugikan kelancaran proses pemilu.

Petugas yang hadir di gudang logistik KPU Kabupaten PALI dengan cermat memeriksa sekitar dan situasi di dalam gudang. Mereka juga berkomunikasi dengan petugas keamanan gudang guna mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi keamanan.

"Patroli ini kami lakukan secara teratur dengan tujuan memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada keamanan dan integritas logistik yang tersimpan di gudang KPU," ujar AKP Hermanto.

Selama patroli, diberikan himbauan kepada petugas keamanan gudang agar tetap waspada dan menjaga keamanan gudang secara optimal. Disamping itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilu.

Inisiatif patroli ini menjadi bagian dari komitmen Polres PALI untuk menjaga stabilitas keamanan selama berlangsungnya proses pemilu.

Dengan tindakan proaktif seperti ini, diharapkan masyarakat merasa aman dan yakin bahwa pemilu akan berjalan dengan lancar dan adil.

Sebelumnya, Aparat Kepolisian Resort PALI Polda Sumsel, bentrok dengan ratusan massa aksi pendemo di depan

kantor Mapolres PALI.

Penyebab terjadinya bentrok antara kedua belah pihak, lantaran para pendemo menerobos blokade barisan polisi yang melakukan pengamanan terhadap aksi itu.

Bahkan para pendemo makin brutal dan berbuat anarkis, mereka menyandera salah satu mobil minibus dan berusaha

anarkis tersebut.

Akibat dari kejadian itu, satu dari pendemo berhasil dilumpuhkan oleh petugas Kepolisian Resort PALI, dan beberapa provokator dalam aksi itu diamankan polisi.

Akhirnya para ratusan aksi Demo itu berhasil dibubarkan oleh petugas Kepolisian Resort PALI, sehingga situasi



untuk merusak kendaraan tersebut.

Pada saat petugas Kepolisian Resort PALI menghalau mundur para pelaku, para aksi pendemo tersebut melakukan perlawanan, dan akhirnya bentrokan pun tak terelakkan.

Sempat terdengar suara tembakan peluru karet dan gas air mata dari Kepolisian Resort PALI untuk memukul mundur para ratusan massa aksi yang

terkendali dan kembali normal kembali.

Kejadian tersebut merupakan simulasi Sispamkota Dalam Rangka Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 Polres PALI.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya suhu politik yang memanas, dalam pesta demokrasi dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. •IRY

JAWA TENGAH DISERBU INVESTOR

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan 43.569 perizinan di berbagai sektor sepanjang 2023. Jumlah itu mengalami peningkatan tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 28.511 perizinan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Jawa Tengah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perizinan diproses setelah ada rekomendasi teknis dari 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov Jateng.

"Hasil penilaian pelayanan terhadap masyarakat kita di 2023 mencapai 94,"

kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, Kamis, 18 Januari 2024.

Nana mengatakan, pelayanan perizinan di Jawa Tengah pada 2023 masuk dalam kategori sangat baik. "Ini penilaian dari pusat. Ini menunjukkan pelayanan yang kita lakukan dalam kategori sangat baik," kata Nana.

Sepanjang 2023, Pemprov Jateng juga sudah melayani perizinan melalui proses digitalisasi, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) maupun Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG).

Nana meminta para OPD juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait permasalahan perizinan yang dihadapi. Menurutnya, jika ada hal-hal menyangkut ranah hukum agar segera dilaporkan secara berjenjang dan diselesaikan dengan baik.

"Kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan perizinan ke depan

lebih baik. Kita akan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, kemudian ikhlas dan bertanggung jawab," ujar Nana.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellarsari, menyebut, dari ribuan perizinan yang masuk selama 2023, paling banyak adalah sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mencapai 28.578 perizinan. Kemudian disusul kelautan dan perikanan mencapai 6.992 perizinan, dan ketenagakerjaan mencapai 1.970 perizinan. Dari seluruh perizinan yang masuk, mayoritas melalui sistem OSS-RBA dengan jumlah mencapai 40.910 perizinan.

Sakina juga mengaku optimistis kinerja investasi di Jawa Tengah pada tahun ini tidak akan terpengaruh dengan tahun politik, seiring penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak.

"Mengenai 'kekhawatiran' tahun politik, perlu kami sampaikan bahwa



pada Januari ini saja sudah menerima kunjungan (calon investor) China minggu lalu, minggu depan ada," katanya.

Kedatangan calon investor itu, kata dia, bermaksud untuk melakukan relokasi maupun pengembangan industri yang sudah ada di beberapa provinsi dengan pola penanaman modal asing (PMA).

"Mereka (calon investor) menyatakan bahwa Jateng, selain lokasinya strategis, juga memiliki daya tarik investasi. Infrastrukturnya, sarana prasarana, SDM dan pendukungnya, dan yang penting hubungan industrial yang harmonis," katanya.

Sakina pun menyempatkan berdiskusi dengan para calon investor tersebut mengenai kemungkinan adanya kekhawatiran seiring tahun politik, tetapi mereka mengaku tidak memiliki kekhawatiran.

Para calon investor, kata dia, justru menyampaikan kekhawatiran untuk berinvestasi di beberapa negara lainnya yang dinamika politiknya sering berdampak dengan perubahan regulasi, berbeda dengan di Indonesia.

"Mereka merasa, dibandingkan negara lain, Kalau di Indonesia, regulasinya boleh dikatakan 'settle' dan tidak terlalu berpengaruh. Mereka menyatakan tidak khawatir dengan tahun politik, pemilu," katanya.

Sebelumnya, DPMPTSP Jateng mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 yang mencapai Rp77,02 triliun, atau naik 12,59 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp68,41 triliun. Realisasi investasi itu juga menyerap sebanyak 280.643 tenaga kerja.

Sepanjang empat triwulan 2023, investasi sektor PMDN mencapai Rp32,98 triliun, UMKM sebesar Rp20,9 triliun. Sedangkan PMA mencatatkan investasi sebesar Rp23,14 triliun.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat Jateng menjadi daerah yang diminati oleh pemodal, di antaranya aksesibilitas, ketersediaan tenaga kerja, dan upah yang kompetitif. Untuk sektor investasi yang paling diminati PMA adalah industri padat karya, seperti barang dari kulit dan alas kaki, industri mesin, elektronik, alat kedokteran, dan industri tekstil.

Oleh karena itu, sektor PMA memang menyerap banyak tenaga kerja, seperti

apparel, tekstil, pakaian, dan garmen yang naik cukup signifikan. Sedangkan, PMDN cenderung meminati sektor transportasi, gudang, telekomunikasi, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Dari jumlah proyek investasi, Sakina menyebutkan bahwa pada 2022 total proyek PMA dan PMDN hanya 19.374 unit, sedangkan pada 2023 meningkat hingga mencapai 43.080 unit. Ia optimistis bahwa investasi Jateng akan terus tumbuh, salah satunya dibuktikan bahwa hampir setiap minggu DPMPTSP menerima kunjungan calon investor dari berbagai negara.

Saat ini, kata dia, ada 97 calon investor yang akan merelokasi perusahaan-

sampaikan semua daya tarik investasi di Jateng, baik infrastruktur, sumber daya manusia, dan sebagainya. Tapi kuncinya mereka lebih pada bagaimana akses modal, raw material, hingga ekspor," ungkapnya.

Namun, Sakina juga melihat ada beberapa daerah yang relatif susah dijangkau karena tidak ada jalur tol, tetapi justru menjadi favorit investor, seperti Kabupaten Jepara dan Rembang.

Ia menjelaskan, DPMPTSP Jateng terus berupaya mempromosikan 35 kabupaten/kota sebagai tujuan investasi, tetapi bagaimanapun juga investor yang menentukan.

Dia mengingatkan, sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana pemer-



ya ke Jateng dan saat sudah ada yang dalam perizinan. "Ada 97 calon investor merelokasi usahanya ke Jateng. Kami setiap minggu juga melayani calon investor yang akan menanamkan investasi di Jateng," imbuhnya.

Sakina menambahkan, kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) saat ini masih menjadi lokasi favorit tujuan investasi. Menurut dia, ada beberapa pertimbangan investor lebih meminati wilayah Pantura Jateng untuk berinvestasi, antara lain kemudahan akses transportasi, permodalan, penyediaan bahan baku, hingga akses untuk ekspor.

Apalagi, keberadaan jalur tol membuat beberapa wilayah di kawasan Pantura menjadi incaran investor, terutama Kabupaten Brebes hingga Kota Semarang.

"Ketika ada calon investor, pasti kami

intah kabupaten/kota bisa menyajikan kawasan peruntukan industri (KPI) untuk menarik calon investor. Brebes, kata dia, tercatat menjadi lokasi favorit investasi dengan adanya 21 pelaku usaha yang melakukan relokasi atau pengembangan usaha ke daerah tersebut.

Dengan jadi lokasi favorit investasi, ia berharap bisa membantu Brebes meningkatkan perekonomian daerah, mengingat daerah tersebut termasuk kabupaten tersebut yang memiliki kemiskinan ekstrem.

"Ketika ada kegiatan usaha kan ada penyerapan tenaga kerja yang banyak, seperti industri alas kaki, garmen, apparel. Tidak punya keterampilan apapun diterima. Namun, ada komitmen internal mereka akan dilatih," pungkasnya. ●



GAJI ASN NAIK BANSOS TERUS DIGENJOT

Menjelang Pemilihan Umum yang tinggal 14 hari lagi, berbagai program bantuan sosial dan kesehatan ke masyarakat ataupun kebijakan populis diputuskan oleh pemerintah.

Bahkan, selain secara langsung membagikan berbagai bansos dan meninjau rumah sakit di daerah tertentu, Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani peraturan pemerintah untuk menaikkan gaji pokok TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari pangkat terendah hingga tertinggi.

Kenaikan gaji pokok TNI tertuang dalam PP 6/2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP 28/2001 tentang

Peraturan Gaji Anggota TNI, serta PP 7/2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP 29/2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Petikan PP 6/2024 menyebutkan bahwa peningkatan gaji pokok anggota TNI dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Sementara, PP 7/2024 menyebut penyesuaian gaji anggota Polri juga dilakukan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Pemerintah juga telah menerbitkan PP 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 26 Januari 2024. Kenaikan gaji pokok PNS mulai dari golongan I sampai IV.

Tiga PP terkait kenaikan gaji pokok TNI/Polri dan PNS yang ditandatangani

Presiden Jokowi pada 26 Januari 2024 ini mulai berlaku pada 1 Februari 2024.

Selain meningkatkan kesejahteraan TNI/Polri dan PNS, Presiden Jokowi juga memastikan masyarakat terus mendapatkan layanan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024. Bantuan itu bakal diberikan tiga bulan sekaligus atau masing-masing Rp 600 ribu kepada 18,8 juta penduduk miskin mulai awal Februari.

Pencairan BLT Rp 200 ribu per bulan akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 untuk periode Januari-Februari-Maret 2024. Bantuan ini menggantikan BLT El Nino yang sudah disalurkan tahun lalu. Sementara itu, total anggaran untuk program BLT ini mencapai Rp11,25 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani In-



drawati, mengatakan, alasan BLT tersebut disalurkan pada tahun politik ini untuk memitigasi risiko pangan. "BLT mitigasi pangan apakah masih dibutuhkan? Saya sampaikan, inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year (yoy)," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.

Dia menegaskan, program bansos seperti BLT merupakan instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk UU. Maka, keberadaannya sudah dibahas bersama seluruh fraksi partai politik di DPR.

"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di mana sumbernya disetujui oleh DPR, penggunaannya juga disetujui DPR," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkan, bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos), mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta BLT El Nino bagi 18,6 juta KPM. Juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Dia menuturkan, mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan Terpadu Kesejahteraan So-

(DTKS), serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan



Kan itu sudah dibahas terus tentang kesejahteraan. Jadi sudah terdukung secara sistem besarnya, perekonomiannya udah baik, saya kira itu juga berpengaruh.

kemiskinan ekstrem.

Sri Mulyani mengatakan, eksekutor program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. "Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas)," ujar dia.

Disebutkan, nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, meminta agar kenaikan gaji TNI/Polri dan PNS tak dipersepsikan lekat dengan kepentingan politik. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak ada korelasinya dengan maksud politik. Pasalnya, rencana kenaikan gaji ASN telah diinisiasi sejak 2020.

"Jangan disamber-samberin (sama politik). Pak Menteri (PANRB) selalu menyampaikan bahwa ini merupakan apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh ASN. Waktu covid kan kita (ASN), TNI/Polri berkolaborasi dengan baik," tegasnya.

Dia menilai, saat ini memang jadi waktu yang pas untuk menaikkan gaji PNS, atas dasar ekonomi nasional yang membaik, peningkatan penerimaan pajak, hingga kinerja APBN yang secara keseimbangan primer masih tercatat surplus.

"Kan itu sudah dibahas terus tentang kesejahteraan. Jadi sudah terdukung secara sistem besarnya, perekonomiannya udah baik, saya kira itu juga berpengaruh," imbuh Averrouce.

Menurut dia, kebijakan untuk mendongkrak gaji para abdi negara telah dibahas panjang secara lintas kementerian/lem-



baga dengan para stakeholder terkait, semisal Kementerian Keuangan hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Itu kan proses dalam penetapan kebijakan butuh pembicaraan dan tentunya itu antar kementerian/lembaga. Kita tentunya melibatkan stakeholder kita, Kementerian Keuangan, BKN," tuturnya.

Nuansa politis

Meskipun pembagian bansos dan peningkatan gaji pokok tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, kebijakan tersebut dinilai kental bernuansa politis. "Membeli suara" warga dalam menentukan pilihan bahkan juga dinilai sebagai strategi untuk menghapus jejak kinerja dan popularitas pemimpin di daerah pemilihan (dapil) tertentu, seperti di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, seorang pemimpin bangsa itu semestinya melindungi segenap bangsa dan negara di Tanah Air serta seluruh tumpah darah di Indonesia. Bukan hanya terfokus di daerah tertentu, seperti di Jateng dan Yogyakarta, tetapi di juga Aceh, Sumatera, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara dan Papua.

"Pak Jokowi ternyata lebih asyik berada di Jateng, padahal Indonesia bukan hanya Jawa Tengah. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujar Hasto.

Menanggapi keluarnya PP yang menetapkan kenaikan gaji pokok TNI/Polri dan PNS jelang Pilpres 2024, Dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, menyebut peraturan pemerintah sejatinya memang produk politik.

"Kalaupun kenaikan gaji ini akan dimanfaatkan secara politis pada saat kampanye Pilpres,

maka keuntungan elektoralnya tidak bisa diklaim oleh salah satu pihak. Meski yang menandatangani PP itu adalah Presiden," kata Ferry.

Presiden juga tidak bisa mengklaim kenaikan gaji pokok TNI/Polri dan PNS adalah kebijakan absolutnya. Sebab, PP itu adalah kesepakatan atau produk politik bersama. "Namun demikian, harus diakui tanpa adanya klarifikasi dari media atau kalangan intelektual, maka publik akan percaya bahwa kebijakan kenaikan itu atas murni inisiatif pemerintah," tambahnya.

Untuk itu, Bawaslu harus tegas menerapkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh subyek-subyek tertentu dalam tahapan kampanye. Pasal 282 UU Pemilu menyebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, kades dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menyebut kenaikan gaji PNS di era Presiden Jokowi yang dilakukan di tahun-tahun pemilu menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik lahir dikarenakan waktu penetapan kenaikan gaji terjadi di masa pemilu. Sehingga muncul asumsi ketidaknetralan pemerintah pada pilpres ini.

"Jika dicermati memang tujuannya untuk membangun reformasi birokrasi dan kesejahteraan pegawai. Hanya saja, keputusan ini akan

menimbulkan polemik di masyarakat, utamanya dua hal yaitu waktunya dan terhadap ketidaknetralan pemerintah di Pilpres ini," tegas Efriza.

Menurutnya, kenaikan gaji PNS bisa dilakukan setelah Pemilu 2024. Karena saat ini pemerintah tengah menunggu regulasi turunan yang tengah disiapkan.

"Sebab Gaji PNS ini diturunkan menjelang Pemilu 2024 meski dalam implementasinya masih menunggu regulasi turunannya, namun memungkinkan waktunya secepatnya," tambahnya.

Intinya, kata Efriza, memang serangkaian kebijakan yang baik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dukungan parlemen untuk kepentingan masyarakat. Tetapi permasalahan hadir karena kebijakan naik gaji PNS terjadi menjelang pemilu.

Menurutnya, pemerintah sulit kedudukan dua kepentingan yang berbeda tanpa bisa melepaskan keterpengaruhannya satu dan yang lainnya, seperti antara kepentingan dari keputusan dan kebijakan pemerintah yang baik bagi



masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

"Prabowo-Gibran ini tentunya memungkinkan akan dapat sentimen positif, memungkinkan kenaikan elektabilitas, sebab pasangan ini dianggap representasi dari pemerintahan saat ini. Mereka juga mendeklarasikan melanjutkan kebijakan Jokowi saat ini. Sisi lain, Gibran adalah anak biologisnya Presiden Jokowi," ungkapnya.

Sudah barang tentu, kata Efriza, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan menggiring opini sebagai bentuk turut campurnya pemerintahan Jokowi untuk kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

Intinya, jika Jokowi melakukan politik berupa kenaikan kesejahteraan masyarakat dengan Gaji PNS, lalu kenaikan tunjangan anggaran pelinsos, maka tidak bisa diabaikan persepsi turut campurnya pemerintah untuk membantu memenangkan pasangan nomor dua.

Di sisi lain, Efriza menilai PNS memiliki hak memilih meski harus tetap netral. Hanya saja, PNS saat ini tidak bisa digerakkan oleh pemerintah, seperti zaman orde baru.

"Sehingga, kebijakan pemerintah saat ini memengaruhi kesejahteraan PNS, tapi diyakini tidak serta merta PNS akan lalu memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab faktor moral dan perilaku tidak etis dari Gibran sebagai anaknya Presiden masih menjadi polemik di Masyarakat. Ini juga menjadi catatan dan penilaian dari PNS yang akan memilih," ujarnya.

"Jadi kebijakan dan keputusan pemerintah itu baik, karena itu didukung oleh parlemen. Hanya saja waktunya menjelang pencoblosan pemilu dan endorse Jokowi terhadap pasangan Prabowo-Gibran yang juga akan memicu polemik," tandasnya.

Tak Mendesak

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut, kebijakan populis menjelang pilpres sangat kental nuansa politis dibandingkan dengan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin. Pemberian bansos, misalnya, cenderung naik signifikan menjelang pemilu dan akan



menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon di Pilpres 2024.

Menurut Bhima, pola perlindungan sosial yang diterapkan menjelang Pilpres 2024 hampir sama dengan siklus menjelang Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, yakni anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam. Pada 2014, misalnya, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp484,1 triliun, kemudian dipangkas pada 2015 menjadi Rp276,2 triliun.

"Itu anomali sekali, setelah naik tinggi saat pemilu, tahun berikutnya anjlok,"

ucap Bhima.

Pemberian bansos juga menggeser anggaran lain menjelang pemilu yang dikhawatirkan akan menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif.

"Ini waktunya dicocokkan dengan skenario apabila ada (pilpres) dua putaran. Padahal, kalau melihat tekanan ekonomi dan masa pemerintahan Jokowi, kan, harusnya bansos sampai Oktober. Jadi, pemilihan periode bansosnya saja sudah menimbulkan tanda tanya," tambah Bhima. •



POLITIK JADI PENYEIMBANG PANGGUNG DAKWAH

Calon Legislatif (Caleg) muda Kota Palembang semakin aktif menyuarakan aspirasi dengan tujuan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Seperti yang dilakukan Ahmad Almuahjir yang kini mencoba peruntungan dengan mencalonkan diri sebagai Caleg Dapil 3 Kota Palembang dengan nomor urut 4 dari Partai Demokrat.

Pemuda kelahiran 15 September 1989 ini menjadikan panggung agama sebagai inspirasi untuk memperluas syiar dan dakwah. Sehingga dengan terjun di dunia Politik, menjadi penyeimbang untuk lebih sempurna dalam mengayomi masyarakat.

"Saya memang berlatar belakang agama yang sangat kuat, jadi dengan terjun di dunia politik bisa semakin memperluas syiar dan dakwah untuk mengayomi masyarakat," ka-

tanya, saat menjadi bintang tamu podcast Infindonesia,

belum lama ini.

Tidak hanya itu, dalam pencalonan dirinya menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Palembang, Ahmad Almuahjir juga mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, tokoh agama, ulama dan masyarakat.

Pasalnya, Ahmad Almuahjir merupakan putra keempat dari ulama KH Ali Umar Thoyib yang merupakan ulama besar Palembang terkenal dengan ajaran taib Haddat dan menyebarkan Thoriqoh Ahlil Bait (Thoriqoh Alawiyah).

"Terlahir dari salah satu tokoh kharismatik di sumsel, KH Ali Umar Thoyib yang memiliki santri, pecinta,

relawan yang dididik hingga sukses

jadi saya juga mendapat dukungan yang besar untuk maju dalam pencalonan diri," bebernya.

Sehingga, secara tegas dirinya ingin bisa melanjutkan

perjuangan sang ayah yang bisa menjadi inspirasi masyarakat terutama pada kalangan menengah ke bawah.

Tidak hanya bisa menjadi inspirasi, melainkan juga bisa merangkul, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki masyarakat baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

"Utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah. Jadi meski tidak mampu di bidang finansial, tapi mampu bersaing pada bidang lain, seperti ekonomi dan kesehatan," tambahnya.

Diakui pria yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadist Malang selama 7 tahun itu, dirinya memiliki strategi yang optimis berdasarkan kemampuan dan dukungan mampu menjadi wakil yang bisa menyalurkan aspirasi.

Menjadi kader partai nasionalis bukan menjadi penghalang untuk menyalurkan ilmu agama, mengingat Partai Demokrat memiliki histori terhadap Almarhum KH Ali Umar Thoyib.

"Partai Demokrat juga memberikan kesempatan yang sangat luas, meskipun partai nasionalis tapi sangat terbuka, termasuk aspirasi masyarakat dan hal itu yang menjadi bahan pertimbangan saya bergabung dengan partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini," katanya.

Sementara berdasarkan sudut pandang dirinya, Kota Palembang merupakan kota yang sudah maju dan berkembang. Hanya saja, sebagai generasi milenial ingin ikut andil dalam pembangunan Kota Palembang lebih baik lagi.

"Palembang sudah menjadi kota yang sangat maju dan berkembang, jadi saya ingin ikut ambil bagian untuk membawa kota ini lebih baik lagi, menjadi kota yang dipandang baik nasional maupun internasional dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan," jelasnya.

Terkait Pemilihan Presiden



(Pilpres) 2024, Ahmad Almuhajir menyebut sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengharapkan Pilpres menjadi pesta rakyat yang damai dan senang tanpa ada perpecahan meski saling berseberangan.

"Sesuai arahan Ketua Umum AHY, Pilpres 2024 bisa berjalan dengan senang, aman, damai dan menjadi pesta rakyat tanpa adanya perpecahan kelompok-kelompok yang saling berseberangan,"

dukungan kepada Anies Baswedan, kini terjawab bahwa AHY tidak memiliki ambisi seperti yang dikabarkan,"ungkapnya.

Tentunya sesuai dengan harapan semua kader dan partai koalisi pendukung untuk kemenangan Prabowo Gibran satu putaran.

Secara pribadi dan kader Partai Demokrat daerah, dia menjelaskan bahwa Pilpres 2024 dianggap lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan dengan Pilpres pada 2019. Pasalnya, dalam

Koalisi Indonesia Maju, berkomitmen untuk tetap rendah hati. Menurutnya, perjalanan menuju Pilpres 2024 masih penuh tantangan, dan proses pemilu selalu sarat dengan kejutan.

"Dalam menghadapi tantangan Pilpres 2024, kita tidak boleh terlena dengan rasa nyaman atau merasa sudah menang sebelum pertempuran sebenarnya terjadi," ujar AHY.

AHY menjelaskan bahwa lembaga survei terus mencatat peningkatan ele-



tegasnya.

Dari tiga pasangan Capres Cawapres di Pilpres 2024 merupakan tokoh terbaik bangsa dan akan dipilih rakyat dan dari Partai Demokrat, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka adalah yang terbaik dan diharapkan bisa menjadi pilihan rakyat untuk memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

Bahkan, dijelaskan Ahmad Almuhajir kebijaksanaan AHY terlepas dari koalisi Anies Baswedan-Cak Imin membuat isu bahwa AHY memiliki ambisi menjadi Cawapres. Namun, AHY membuktikan bahwa tidak ada ambisi, karena setiap keputusan adalah yang terbaik.

"Sebelumnya kan isu yang berkembang bahwa AHY memiliki ambisi untuk menjadi Cawapres karena melepaskan

Pilpres 2019, masyarakat seperti terpecah belah bahkan sampai bertahun-tahun.

"Yang berbeda pilihan, belum lagi termakan isu yang tidak benar, berita hoaks. Saya lihat, harapan 2024 lebih aman dan damai, mulai dari pemilihan Caleg, kepala daerah hingga Pilpres," ungkapnya.

Karena, Pemilu adalah pesta demokrasi sehingga semua pihak harus besuka cita menyambut dan menjalani setiap tahapannya.

"Namanya juga pesta demokrasi, harus dijalankan dengan hati yang senang, damai, meskipun pilihan yang berbeda," sambungnya.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat, sebagai bagian dari

ktabilitas pasangan Prabowo-Gibran setiap harinya. Namun, AHY menekankan pesan dari Prabowo untuk tidak merasa puas atau cukup hanya dengan pencapaian tersebut, mengingat masih jauhnya waktu Pemilihan Presiden.

"Meskipun elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat, Prabowo menekankan agar kita tidak boleh merasa puas," jelasnya.

Partai Demokrat, kata AHY, akan terus aktif dalam upaya mendapatkan dukungan untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024.

"Kami akan bekerja keras secara total. Dengan waktu yang singkat, hanya tersisa 70 hari lagi, kami akan berupaya maksimal dalam setiap langkah untuk memenangkan Pilpres 2024," tambah AHY. •IRY

PERJUANGKAN KESEJAHTERAAN GURU PAUD

Keprihatinan terhadap minimnya kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palembang mengetuk hati nurani Etty Yuniarti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palembang, Dapil Palembang 1.

Sudah 17 tahun menjadi ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) kecamatan dan Kota Palembang membuat wanita yang akrab disapa Ibu Etty ini paham betul apa yang dirasakan oleh guru-guru PAUD.

Maju dalam pemilihan Caleg DPRD Kota Palembang, Dapil Palembang 1 yang meliputi wilayah IB I, IB II, Gandus dan Bukit Kecil, bukan tidak puas dengan posisi jabatannya saat ini.

Hanya saja atas dasar keprihatinan dengan kondisi guru PAUD ini yang melatarbelakangi dirinya untuk maju menjadi anggota dewan demi memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD Kota Palembang.

"Bukan berarti saya tidak puas dengan posisi saat ini, 10 tahun saya di Himpaudi Kecamatan dan 7 Tahun menjadi ketua Himpaudi Kota Palembang memahami betul kondisi yang terjadi di lapangan," katanya, saat menjadi bintang tamu Podcast Info Indonesia, Selasa 19 Desember 2023.

Tidak hanya itu, kecilnya gaji yang diterima guru PAUD tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dijalani. Guru-guru ini harus mengemban amanah yang sangat besar, menjaga anak didik dengan baik, menghabiskan banyak waktu.

Kondisi ini dirasakan tidak sebanding dengan honor yang diterima. Dijelaskan Etty, guru PAUD ini hanya menerima gaji SAJUTA atau Sabar, jujur dan taqwa.

"Jadi gaji guru PAUD ini hanya SAJUTA atau Sabar, Jujur dan Taqwa. Guru ini perlu mendapatkan kesejahteraan," katanya.

Keprihatinan lain yang dirasakan oleh wanita kelahiran 18 Juni 1963 ini adalah, tidak adanya dana insentif bagi guru PAUD Kota Palembang seperti yang pernah di janjikan oleh salah satu Wali Kota Palembang saat masa kampanye.

Sementara, guru PAUD di Kabupaten/Kota lain yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) seperti Banyuasin, Musi Banyuasin hingga Lahat, rata-rata mendapatkan dana insentif sebesar Rp 200 ribu setiap bulannya.

"Ini kan sangat memprihatinkan, kenapa daerah lain bisa mendapatkan dana insentif, sedangkan guru PAUD di

Kota Palembang tidak dapat, ini kenapa? Apa yang salah?," tegasnya.

Tidak hanya itu, wanita berhijab ini pernah menangis janji salah satu calon Wali Kota Palembang yang pada akhirnya berhasil meduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Kota Palembang terkait pengadaan dana insentif guru PAUD.

"Setelah jadi saya tanya, ya saya tagih janjinya dan apa yang dia bilang tidak ada anggaran untuk dana insentif ini. Padahal saya juga sudah membantu memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk mendukung," jelasnya.

Hal ini juga yang harus dicari tahu faktor penyebab. Pasalnya, hanya kota Palembang yang tidak mendapatkan dana insentif tersebut.

"Hal ini ingin saya selidiki," sambungnya.

Akhirnya terbesit dalam pikiran Etty, apakah dirinya harus menjadi anggota dewan terlebih dulu hingga bisa



membantu memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD Kota Palembang.

"Saya bertekad untuk membantu guru PAUD, jika ingin membantu secara materil tidak bisa, namun jika berhasil menjadi anggota dewan, saya akan mencari tahu kendala yang terjadi," jelasnya.

Sementara, saat membahas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Etty sangat meyakini bahwa pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan membawa perubahan untuk Indonesia.

Bahkan, jauh sebelum Anies Baswedan resmi mendaftarkan diri sebagai Capres RI 2024, dirinya sangat yakin bahwa didalam kepemimpinan Anies Baswedan Indonesia akan lebih baik.

"Saya optimis AMIN menang dalam pemilihan Capres 2024 nanti," katanya.

Keyakinan itu dipertegas oleh sosok Anies Baswedan yang memiliki rekam jejak yang tidak diragukan dan mempunyai intelektual yang luar biasa serta agamais.

"Seorang pemimpin yang mempunyai moral yang luar biasa bisa membawa Indonesia asli muslimnya, setelah Cak Imin mendampingi Anies Baswedan, saya merasa kuatlah Indonesia," ungkapnya.

Dengan adanya kolaborasi antara Anies Baswedan dan Cak Imin ini tentunya akan membawa perubahan sesuai dengan slogan, visi dan misi keduanya.

Meskipun dari berbagai hasil survey, pasangan nomor urut 01 ini selalu terendah, dirinya meyakini akan kemenangan AMIN.

Terlebih dari banyaknya relawan yang memberikan dukungan, dari kalangan intelektual yang bisa membuat semakin kuat.

"Soal beda pilihan hal biasa, bahkan dalam keluarga saja sering terjadi perbedaan. Jika berdebat saat ini rasanya tidak akan ada habisnya, berdebat nanti jika Anies berhasil menjadi presiden," tambahnya.

Dia memberikan contoh, bahwa hanya Anies Baswedan yang mampu memberikan perubahan terhadap DKI Jakarta saat menjabat sebagai Gubernur.

"Jakarta saja dia mampu memberikan perubahan dan perkembangan, apalagi untuk Indonesia. Pokoknya saya yakin Anies menang jadi Presiden," tegasnya.

Wanita yang selalu dekat dengan anak-anak ini mengaku yakin AMIN akan menang dalam satu putaran Pil-



pres 2024.

"Yakin menang satu putaran, jika menang satu putaran kenapa harus dua putaran," sambungnya.

Untuk mewujudkan kemenangan dalam satu putaran tersebut, diakui Etty, semua partai koalisi sedang berkerja keras karena ingin Indonesia lebih maju.

Terkait netralitas ASN dan aparat pen-

egak hukum tidak dapat sepenuhnya diyakini, mengingat saat ini orang-orang Indonesia seperti kembali di jajah. Dimana penguasa dengan mental penjajah.

"Segala sesuatu pasti ada sebab akibat, kenyataan saat ini banyak masyarakat yang menyesal dengan pilihan saat ini dan banyak bentuk ketidakpuasan masyarakat," jelasnya. • IRY

SIAP WAKAFKAN DIRI UNTUK PALEMBANG

H Permana, MMA, sosok birokrat sukses yang memulai karirnya dari bawah. Terakhir, sebelum pensiun, ia menjabat sebagai staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Sumatera Selatan, akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra Dapil 1.

Berbagai jabatan strategis pernah ia sandang pada empat gubernur Sumsel yang berbeda dan 5 periodisasi pemerintahan Provinsi Sumsel. Yakni era Gubernur Syahril Oesman, Mahyudin, Alex Noerdin, dan Herman Deru.

Hingga kini, ayah dari tiga orang putri ini merasa terpanggil untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Calon Legislatif (Pilleg) Kota Palembang.

Tidak hanya itu, Permana juga mendapat banyak dukungan dari beberapa senior Partai Gerindra seperti Mantan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya hingga Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi.

"Sejak purna tugas dari staf khusus di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2 tahun, Ogan Ili (OI) 2 tahun, bertemu dengan teman-teman hingga senior di Partai Gerindra didorong untuk mencalonkan diri," katanya.

Permana mengungkapkan bahwa saat ini dirinya akan fokus dengan pencalonan diri di DPRD Kota Palembang dan mantap mengabdikan diri.

"Mengutip kata ustad bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat

bagi manusia lain dan semoga saya bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Palembang, hal ini yang menjadi motivasi untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 1 yang meliputi wilayah Gandus, IB I, IB II dan Bukit Kecil," bebernya.

Ditegaskan Permana, hampir semua pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tentunya kesejahteraan masyarakat Kota Palembang menjadi prioritas sebagai wilayah pemilihan dirinya.

"Terlebih, Kota Palembang masih tergolong miskin, penduduk Kota Palembang mencapai 2,7 juta jiwa, jumlah masyarakat miskin mencapai 1,2 juta jiwa. Infrastruktur, pembangunan fisik dan nonfisik, hal itu yang akan dituangkan jika terpilih menjadi anggota DPRD Kota Palembang,"

katanya.

Permana juga mengungkapkan, dalam membangun Kota Palembang ini ada dua, yakni pembangunan fisik dan nonfisik.

Pembangunan fisik sebetulnya untuk akses-akses yang ada di Kota Palembang harus terkoneksi dengan baik, sedangkan pembangunan nonfisik adalah untuk menjawab permasalahan pengangguran, kemiskinan, peluang usaha, kesempatan berkerja, ekonomi kerakyatan serta UMKM.

"Jika ekonomi daerah hidup, secara otomatis tidak akan mengganggu pemerintahan karena fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator, sedangkan swasta sebagai eksekutor dan masyarakat sebagai motivator hingga penggerak," ulasnya.

Pasalnya, dalam membangun Kota Palembang tidak bisa dilakukan hanya melalui satu elemen saja, jadi harus dilakukan bersama-sama, pemerintah mempunyai peranan besar untuk memfasilitasi apa yang menjadi per-



masalah yang ada di masyarakat.

“Sebagai contoh, jika kita sakit kepala yang harus diberikan ada obat sesuai dengan keluhan sakit kepala tersebut, sehingga harus pas dan tepat sasaran,” ulasnya.

Pria kelahiran Bandung, 21 Oktober 1959 ini mengawali karir sebagai honorer pada tahun 1984 di Departemen Transmigrasi dan Perambahan Hutan RI. Ia diangkat menjadi PNS pada tahun 1986/1987.

Semasa awal-awal sebagai PNS, alumni Universitas Muliawarman dan IPB Bogor ini pernah bertugas di wilayah ujung barat Sumatera hingga Papua. Seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Timor-Timur hingga Irian Jaya dalam kurun waktu 1987-1989.

“Terjauh dan terlama saya ditugaskan di Pulau Natuna selama 4 tahun sebagai Kepala Unit Transmigrasi 1990 - 1993,” terang lelaki yang fasih berbahasa Sunda ini.

Dengan dedikasinya, karir Permana terus menanjak, ia diangkat sebagai Kepala Unit di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Riau. Kemudian, Menteri Transmigrasi Siswono menariknya ke Jakarta sebagai Kepala Seksi Pemetaan dan Sasaran Transmigrasi pada periode 1993-1995.

Perjalanan karirnya tidak berhenti di situ, ia kemudian menangani proyek lahan gambut seluas 1 juta hektare untuk 10 ribu Kepala Keluarga transmigrasi selama tiga tahun di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Atas prestasinya dalam sejarah Departemen Transmigrasi, H Permana dipromosikan sebagai Kepala Kantor Departemen (Kakandep) Kabupaten OKU di Baturaja, Sumatera Selatan, hingga tahun 2000.

Di sinilah, ia memulai karirnya sebagai birokrat daerah di Sumsel setelah adanya otonomi daerah.

“Dengan adanya otonomi daerah, saya mencoba berkarir sebagai pegawai daerah dan diangkat oleh Bupati OKU Syahrial Oesman sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama dua tahun,” ucapnya.

Permana kemudian kembali ke pusat sebagai staf khusus untuk pembuatan

Undang-Undang kepariwisataan di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI hingga 2005. Ketika mantan atasan-nya di Kabupaten OKU, Syahrial Oesman, menjadi Gubernur Sumsel, Permana kembali ke Sumsel dan menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumsel.

Pada masa Gubernur Mahyudin (gubernur transisi) selama masa pemilihan anggota DPRD hingga pemilihan langsung pertama kali pada tahun

menjadi Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan karena adanya pemisahan antara Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan selama satu tahun.

Akhirnya, ia menyelesaikan karirnya sebagai Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru.

Sebagai seorang staf ahli, Permana juga mencapai prestasi dan meraih penghargaan sebagai staf ahli terbaik



2007/2008, Permana diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Sumatera Selatan.

Jabatan ini dipegangnya selama enam tahun, hingga masa pemerintahan Gubernur Alex Noerdin dari tahun 2008.

“Melalui Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kita berhasil membawa BKPM Sumatera Selatan menjadi yang terbaik kedua nasional selama dua tahun berturut-turut, meraih Investment Award, dan menduduki peringkat tujuh sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia,” jelasnya.

Pada periode kedua kepemimpinan Alex, antara tahun 2014 hingga 2017, Permana dipercaya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berhasil meraih predikat TPID terbaik di Sumatera.

Setelah dua tahun, Permana beralih

dari Kementerian Dalam Negeri, yang diberikan oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo pada tahun 2019.

“Saya selalu berpegang pada menguasai tugas pokok dan fungsi, menjadi seorang profesional, serta mendukung kebijakan atasan. Alhamdulillah, saya terus dipercaya oleh empat Gubernur Sumatera Selatan yang berbeda,” ujarnya.

Sehingga tujuan dalam pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD Kota Palembang, Permana akan mencari solusi penyebab tingginya angka pengangguran dengan memberikan jalan keluar.

Misal dengan memberikan pembekalan pendidikan, modal usaha, pelatihan UMKM dan sebagainya.

“Keluarga awalnya tidak ada yang mendukung dalam pencalonan dan diminta untuk istirahat, setelah diberikan penjelasan, bahwa ini adalah dunia saya hingga akhirnya direstui dan hidup saya akan diwakafkan untuk Kota Palembang,” pungkasnya. •IRY

SUMBANG

Gunawan Effendi

Mau pilih sumbang yang manakah? Suara sumbang menanggapi pernyataan Presiden Jokowi boleh berkampanye atau sumbang dukungan Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat (ETAS)? Dua-duanya juga boleh.

Suara sumbang tentang pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu terkait dengan boleh atau tidak Presiden berkampanye? Jawabannya menurut Jokowi, Presiden boleh berkampanye dan memihak.

"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak. Boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Toh ia menegaskan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, wajar saja Presiden dan menteri-nya berpolitik. "Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.

Sebagian tanggapan dari pernyataan Presiden, ada yang bersifat sumbang, kurang atau tidak mendukungnya.

Tanggapan siapa yang bersifat sumbang? Mudah saja mengidentifikasinya.

Sebagian besar tanggapan sumbang itu berasal dari kubu pesaing yang mendapat dukungan atau pemihakan Presiden. Nah, karena konteks ucapan Presiden itu muncul di tengah masa kampanye Pemilu 2024, wajar-wajar saja tanggapan sumbang itu bersifat negatif. Tepatnya kampanye negatif, upaya mempengaruhi pilihan politik dengan mengemukakan kelemahan atau keburukan pesaing.

Apakah kampanye negatif itu berpengaruh atau tidak, dapat diukur melalui cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya melalui survei jajak pendapat. Biarlah para pollster (lembaga jajak pendapat) yang menyelenggarakan dan mengemukakan hasilnya.

Nah, bagaimana dengan sumbang dukungan Relawan ETAS? Ini juga kampanye yang mengibarkan nama Erick yang masih menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Toh menurut Presiden, Menteri juga boleh berkampanye. Tapi, bukan di situ letak positif kampanyenya.

Kampanye positif ETAS menunjukkan sejumlah pengusaha berskala besar mendukung salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Adalah Boy Garibaldi Thohir, kakak kandung Erick yang mengemukakannya.

Menurut Boy, sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan calon presiden pilihannya. "Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy di acara ETAS yang bertajuk "Flashback to the 80s and 90s" itu.

Di acara yang bertempat di Plaza Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 22 Januari 2024 itu, Boy yang dikenal pula sebagai Bos PT Adaro Energy Tbk pun menyebut sejumlah kelompok usaha besar dan terkemuka, juga perempuan terkaya di Indonesia.

Toh muncul klarifikasi dari beberapa pihak yang disebut oleh Boy Thohir tadi. Klarifikasi itu tentu

bermakna penjelasan mengenai sumbang dukungan yang dikemukakan Boy Thohir. Harap maklum, sumbang dukungan dari pihak pengusaha berkala bisnis besar dapat berbentuk dana yang akan diverifikasi malah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Badan Pengawas Pemilu pun akan bertugas sesuai dengan porsinya.

Implikasi lain tentu saja menyangkut pajak. Sudah menjadi tugas pokok dan fungsi aparat pajak untuk memeriksa laporan keluar-masuk dana dari entitas bisnis. Apalagi entitas bisnis berskala besar.

Alhasil, sumbang itu bisa positif atau negatif. Terserah mau memilih yang mana sesuai dengan konteksnya masing-masing. ●





ANIES MENGESANKAN PEMIMPIN BAIK HATI

Tampil dengan setelan jas resmi pada debat terakhir Capres, kandidat nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan berusaha menunjukkan kesan sebagai figur pemimpin yang melindungi rakyatnya. Bukan menyerang lawan debatnya.



Lebih dari itu, Anies tampak menampilkan kesan (impression management) yang peduli dengan segenap warga kebanyakan yang menghadapi banyak masalah sehari-hari. Itupun tampak dalam materi debat yang ia kemukakan dalam debat terakhir dari lima rangkaian debat kandidat Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024.

Dalam debat yang berlangsung

Jakarta ini juga menilai masalah tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan mudah oleh perusahaan atau kantor pemerintahan.

"Kesetaraan mesti dibangun. Kita bangun daycare. Jadinya ibu-ibu punya anak ada tempatnya," ucap Anies dalam debat yang membahas tema-tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia,

disabilitas. Maka di awal pembacaan visi misinya, Capres nomor urut 1 ini menyelipkan pesan menggunakan bahasa isyarat bagi kaum disabilitas tuna rungu di awal penyampaian visi dan misinya.

Mendapat giliran ketiga dalam pemaparan visi dan misi, Anies tampak hirau pada penyandang disabilitas, terutama tuna rungu. Ia menunjukkan jam tangan yang digunakannya pada tangan kiri. Maknanya waktu atau saat.



pada Minggu malam, 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center, kawasan Senayan, Jakarta Pusat itu, Anies menjanjikan antara lain akan membangun daycare atau tempat penitipan anak untuk memastikan perlindungan anak dan memberikan ketenangan kepada kaum ibu pekerja.

menurut dia, Langkah itu merupakan upaya memastikan kesejahteraan hingga perlindungan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Bekas Gubernur DKI

dan inklusi.

Dia juga mendorong hak kesetaraan bagi kaum perempuan agar mendapatkan upah dan hak-hak lainnya yang setara dengan kaum lelaki. "Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki," ucap Gubernur DKI Jakarta 2018-2023 ini.

Anies pun berupaya menunjukkan kepeduliannya kepada segenap warga negara tanpa mengecualikan statusnya, termasuk kelompok penyandang

Selanjutnya ia menggerakkan jari seperti mengikat sesuatu dari depan ke belakang. Dalam bahasa isyarat, gerakan menggeser tangan dari depan ke belakang berarti berubah atau perubahan. Simpulannya, dengan bahasa isyarat Anies berpesan bahwa sekarang saatnya perubahan.

Sedangkan secara lisan, Anies mengungkapkan, "Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan,

ketidakadilan, ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa luar Jawa, kaya miskin, desa kota, pendidikan umum pendidikan agama, pendidikan kejuruan dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini,” ujarnya.

Bahkan di bidang perekonomian, sambungnya, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita,

untuk berikan kesempatan kepada semua.

“Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini, ketika para pendiri itu kaum intelektual mereka memilih perjuangan politik, saya berangkat sebagai pengajar mendapat panggilan tugas di wilayah politik, kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini untuk bisa mengarah ke depan agar kembali pada format awal,” tandasnya.

Ia mengemukakan, 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Di sisi lain, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. “Bicara pendidikan, jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram, kemampuan tinggi kesempatan tidak ada, sangat frustrasi melihatnya.

Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah

kepedulian rakyat kebanyakan,” ungkap Capres yang berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar itu.

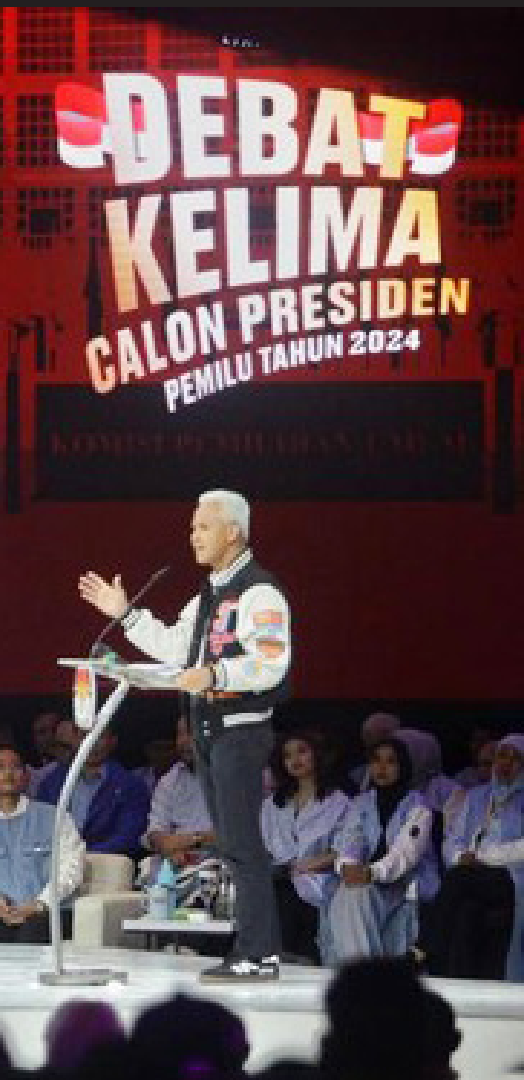
Karena itu, kata Anies, dalam perjalanan setahun terakhir, pasangan Anies-Muhaimin menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong



Bicara pendidikan, jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram, kemampuan tinggi kesempatan tidak ada, sangat frustrasi melihatnya

menginginkan perubahan, mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat poster-poster itu cemerlang, karena bukan didanai dari yang dari Jakarta. “Tapi didanai oleh keringat yang jernih hasil kerja kerasnya ini ada keinginan perubahan,” ungkapnya.

Selanjutnya ia mengemukakan target-target yang akan dicapai jika terpilih memimpin Indonesia. “Satu, kita akan memastikan hidup sehat, dan bila sakit ada pertolongan cepat, tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau, keluarga se-



ketika republik ini didirikan para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah dari kaum privileged, tapi mereka mendirikan republik ini untuk semua golongannya, ataupun keluarganya untuk semuanya, kekuasaan yang dibangun



jahtera, karena upahnya layak, dan bila membutuhkan diberikan bansos, sesuai kebutuhannya, bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi,” ujarnya.

Kemudian Anies mengemukakan visi membentuk Indonesia dengan warga negara yang bangga dengan negaranya. “Karena dijaga budaya dan etika nya dijaga, kita menginginkan persatuan, karena ditopang dengan rasa keadilan, persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan persatuan membutuhkan rasa keadilan,” kata dia.

Sedangkan misinya, mewujudkan bangsa yang cerdas, sejahtera, berbu-

hadirkan keadilan dengan seperti itu kita ada persatuan perubahan saatnya kita kerjakan, ‘katong’ bergerak untuk perubahan untuk seluruh rakyat Indonesia di mana pun berada,” tandasnya.

Terkait dengan itu, Anies pun mengemukakan, kesejahteraan pendidik, baik guru maupun dosen, menjadi kunci dari pendidikan anak bangsa yang berkualitas. Agar mereka bisa fokus mengajar. Anies mengemukakan jawaban itu menanggapi pertanyaan moderator.

Menurut dia, prinsip untuk menyejahterakan para pendidik menjadi tanggung jawab bagi siapa pun pemangku kebijakan di Indonesia. Hal itu karena pemangku kebijakan memiliki prinsip

Selain itu, Anies berjanji bakal mempercepat sertifikasi guru; mengangkat 700 guru honorer menjadi PPPK; memberi beasiswa untuk anak guru, dosen, dan tenaga kependidikan; pengurangan dosen dan peneliti; dan mengurangi beban administrasi bagi dosen. “Prinsipnya ada nilai dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, dan bebaskan dari beban yang tidak perlu,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut Anies, perlu ada percepatan pengangkatan guru honorer dan sertifikasi guru. Beban administrasi guru dan dosen juga harus dikurangi. “Selain itu, perlu juga ada beasiswa bagi anak guru dan dosen. Jan-



daya, dan bersatu. “Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip, ‘sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo’ siapa pun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada menghasilkan frustrasi,” ujarnya.

Ia pun menjanjikan pasangan Anies-Muhaimin ketika menjalankan amanah akan memegang prinsip ‘ngadek sacek-na nilas saplasna’ konsistensi ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan. “Ini komitmen, kami fokus pada pembangunan manusia Indonesia menghadirkan kesetaraan meng-

tersebut, kebijakan turunan yang dibuat akan dilaksanakan dengan mudah. “Terjemahannya adalah pertanyaan apakah tenaga pendidikan di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil dan setara,” kata Anies.

Anies menambahkan, kebijakan untuk menyejahterakan pendidik juga akan menyelesaikan masalah puluhan ribu guru honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta masalah 1,6 juta guru belum tersertifikasi dan beban administrasi. “Itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi,” kata dia.

gan sampai mendidik murid, tetapi pendidikan anak tidak tuntas,” ujar Anies.

Menanggapi jawaban Anies, baik capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, maupun capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sepakat akan pentingnya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik serta mengurangi beban administrasi dosen dan guru. “Menilai jawaban Pak Anies, bagus, relevan, dan saya setuju. Saya maklum, mungkin karena beliau mantan Menteri Pendidikan,” kata Prabowo mengomentari jawaban Anies.

Namun, menurut Prabowo, ada hal lain yang belum disebutkan Anies, yaitu

pentingnya mengkaji sistem yang berjalan dan mengaudit anggaran agar tidak ada kebocoran dana. "Ini menyangkut masalah mental dan budaya. Banyak pejabat yang harus kita audit. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik," ujarnya.

Sedangkan Ganjar mengatakan, untuk memastikan kualitas pendidikan, maka fasilitas harus diperbaiki. "Negara harus hadir menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif," ujarnya.

Ganjar juga menyebutkan masih banyak guru yang digaji Rp 300.000 per bulan. Oleh karena itu, ia menilai penting meningkatkan pendapatan guru sesuai dengan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota, serta meningkatkan kapasitas guru dan dosen.

"Di Jawa Tengah kami memiliki bimbingan teknis online dan pendampingan (BOLPEN) agar ada pengajaran bermutu. Guru akan bisa kerja baik dan harus

UKT yang saat ini memang mahal menjadi momok bagi mahasiswa. Ini terkait dengan jargon kampus merdeka yang menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anies menyatakan, kampus memang merdeka dan seharusnya menjalankan misi memerdekakan. Tapi, kata Anies, kebebasan bagi perguruan tinggi itu tidak berarti mereka bisa menaikkan biaya pendidikan sehingga menyulitkan mahasiswa.

"Kampus merdeka itu baik tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya," kata Anies.

Sedangkan dalam pernyataan penutup debat, didampingi cawapres Muhaimin Iskandar, Anies menegaskan,

perjuangannya. Ia menyebut akan melawan dan mengentaskan ketimpangan yang terjadi di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang cerdas, sejahtera, dan sehat.

"Kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rahim kepada semua merangkul," ungkapnya.

"Dengan perasaan cinta sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkatkan kesejahteraannya," sambungnya.



Negara harus hadir menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif

bebas dari persoalan administrasi," ujarnya.

Kembali ke Anies, terkait dengan kesetaraan dan keadilan dalam membangun manusia Indonesia, bekas Rektor Universitas Paramadina ini menyinggung persoalan perguruan tinggi yang menyarankan mahasiswanya menggunakan pinjaman online (Pinjol) untuk mengatasi persoalan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal. Ia mengemukakan hal itu dalam tanya-jawab kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai problem pendidikan di Indonesia.

"Belakangan kita mendengar fenomena ini, bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol," ujar Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, biaya



"negara tidak berdagang dengan rakyat."

Menurut dia, jika ia terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024, ia akan memimpin negara dengan baik dan penuh cinta kasih. Latar belakangnya adalah perjalanan mengelilingi Indonesia dalam rangka Pilpres 2024.

Kunjungan-kunjungan itu, sambungnya, merupakan perjalanan spiritual baginya dan Muhaimin. "Setiap berjabat tangan, setiap pelukan, membawa pesan. Pesan yang mereka sampaikan sebagai titik, kami ingin Indonesia yang lebih baik, kami ingin Indonesia yang lebih adil," ucap Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyinggung soal kekuasaan yang memiliki welas asih dan cinta kasih. Dua hal tersebut, kata Anies, menjadi bagian dari

Mengakhiri pernyataan penutupnya, Anies berjanji akan membereskan ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia. "Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. menguatkan yang lemah tanpa menguatkan yang kuat. Mari katong (kita) lakukan perubahan," tandasnya.

Dari lima rangkaian debat, yang terakhir ini relatif paling tenang, berbeda dengan debat-debat sebelumnya yang lebih menunjukkan saling serang bahkan dengan kosa kata asing. Namun, dalam debat terakhir, argumentasi dan nalar lebih berperan.

Pilihan Anies dan dua kandidat lainnya agaknya berkaca dari dampak debat-debat panas sebelumnya. Efek debat panas adalah sentimen negatif dari kalangan pemilih yang aktif di media sosial. ●

PRABOWO LEBIH TENANG DEMI MENANG SATU PUTARAN

Prabowo Subianto mengungkapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 memiliki rencana besar dalam visi misinya yang diberi nama strategi transformasi bangsa. Inti dari strategi ini adalah meningkatkan kemakmuran Bangsa Indonesia, terutama memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

"Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah sampai dari usia dini hingga dewasa," ungkap Prabowo saat debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu

memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju pada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan, dalam bidang kesehatan, rencananya adalah membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, serta puskesmas modern di setiap



malam, 4 Februari 2024.

Debat pamungkas ini mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan sosial dan inklusi.

Menurut Prabowo, rencana ini akan mengatasi angka kematian ibu saat melahirkan, mengatasi masalah kurang gizi pada anak, stunting, serta menghilangkan kemiskinan ekstrem. Rencana tersebut juga diharapkan dapat menyerap semua hasil panen dari para petani dan nelayan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi setidaknya sekitar 1,5-2 persen.

"Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam

desa di seluruh Indonesia. Prabowo juga berencana untuk segera mengatasi kekurangan dokter di Indonesia yang mencapai sekitar 140 ribu dokter. Upaya untuk mengatasi kekurangan ini akan dilakukan dengan menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari jumlah saat ini yang mencapai 92, mereka berencana membangun 300 fakultas kedokteran.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan akan memberikan beasiswa kepada 10 ribu lulusan SMA yang berprestasi untuk melanjutkan studi kedokteran di luar negeri. Sebanyak 10 ribu siswa lainnya akan mendapatkan beasiswa untuk belajar sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, kimia,

biologi, serta fisika.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah, 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan," lanjutnya.

Prabowo meyakini pendidikan memiliki peran strategis. Sehingga, menurutnya, perbaikan gaji guru, termasuk gaji honorer, dan peningkatan kompetensi guru adalah hal yang diperlukan. Maka, penting untuk memberikan pelatihan dan penataran kepada guru.

Selain itu, dia berpendapat perbaikan gaji juga harus dilakukan pada seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, dan penyuluh pertanian di seluruh wilayah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka dapat memberikan

Tetapi itikad kami baik. Ketiga paslon ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

Ia kemudian meminta maaf kepada paslon nomor urut 1 dan 3 dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Saya, Prabowo, bersama Gibran dan Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 dan paslon 3, seandainya dalam kampanye ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf. Kami minta maaf ke KPU kalau ada tindakan yang kurang pas," ujarnya.

Menurut Prabowo, ia mempunyai semangat untuk membangun negara, menegakkan kerukunan, persatuan, dan kekeluargaan di atas semua golongan. Ia terutama ingin menegakkan keruku-

sional, Prabowo berjanji akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya.

"Kami berjuang, bertekad, menghilangkan kemiskinan, kurang gizi, menghilangkan korupsi, dan berjuang untuk perdamaian bangsa Indonesia," katanya.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menilai penampilan Prabowo Subianto pada debat terakhir capres akan mampu memenangkan hati masyarakat Indonesia. Menurutnya, dalam debat tersebut, Prabowo dapat tampil dengan sikap negarawan sekaligus solutif dan konkret.

"Saya yakin dari debat malam ini, rakyat Indonesia lebih banyak menyukai Pak Prabowo. Beliau bicara dengan sederhana, konkret, solutif, dan tidak bertele-tele," jelas Nusron dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Februari 2024.



pelayanan terbaik kepada rakyat.

"Itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kami tidak hanya mau pembangunan, kami mau transformasi bangsa di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Demikian pemikiran kami, kami yakin, kami akan melaksanakan itu, dan akan mencapai Indonesia Emas 2045," terangnya.

Prabowo juga menggunakan kesempatan dalam segmen terakhir untuk meminta maaf kepada sejumlah pihak. "Beberapa bulan ini, kami melaksanakan kampanye penuh semangat, penuh kontestasi, penuh kata-kata keras.

nan di antara pemimpin.

"Saya tetap menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Mas Ganjar, Pak Mahfud, saudara saya. Kita berjuang untuk rakyat Indonesia," ujarnya.

Apabila Prabowo dan Gibran dari Koalisi Indonesia Maju menerima mandat menjadi pemimpin na-



"Dalam pernyataan penutup, beliau bicara dengan tulus dari hati dan memperlihatkan sisi kenegarawanan sejati. Beliau meminta maaf dan menunjukkan sikap menghargai pasangan calon lain. Ini yang akan didengar oleh hati rakyat Indonesia," imbuhnya.

Secara umum, kata dia, debat Pilpres kelima berlangsung sangat baik. Berbeda dengan debat sebelumnya, debat terakhir itu justru memberikan pelajaran politik bagi masyarakat.

"Debatnya baik, semua baik. Tidak ada serangan personal, atau pembunuhan karakter. Tidak ada hal-hal yang kita sesalkan di debat-debat yang lalu. Ini memberikan pelajaran politik kepada kita semua ke depan, bahwa debat politik bukan untuk perpecahan," kata dia.

Saat ditanyakan tentang siapa yang jadi pemenang debat, Nusron menyebutkan hal itu sebaiknya ditanyakan kepada rakyat Indonesia.

"Ini bukan siapa menang dan siapa kalah. Kita bersyukur debat berlangsung dengan sangat baik, itu adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Ada baiknya kali ini kita biarkan rakyat yang menilai. Namun kami meyakini, bahwa malam ini masyarakat Indonesia lebih

menyukai penampilan Pak Prabowo," jelasnya.

Minim Serangan

Debat terakhir Pilpres 2024 tak seperti debat-debat sebelumnya.

Debat kelima ini lebih adem ayem tanpa perdebatan yang keras. Prabowo terlihat lebih banyak sepakat dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Performa Prabowo kali ini sangat berbeda jauh dibandingkan saat tampil pada debat-debat sebelumnya.

Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB), Prof Anang Sujoko, mengatakan, dari penilaian secara komunikasi nonverbal pada debat kali ini, Prabowo terlihat lebih tegang dibandingkan kedua lawannya.

"Saya melihatnya secara komunikasi nonverbal itu calon presiden nomor urut 01 dan 03 sangat menikmati debat. Tapi calon presiden nomor urut 02 seperti ada tekanan. Terlihat dari wajahnya agak tegang dibandingkan nomor 01 dan 03 yang banyak senyum terlihat rileks," beber Anang.

Anang menyebut ada kemungkinan jika pada kesempatan kali ini Prabowo menerapkan strategi yang telah ditentukan oleh TKN. Strategi yang diterapkan Prabowo berupa banyak memilih memberikan jawaban setuju dan sepakat dengan kedua lawannya.

"Dalam kacamata komunikasi politik ada upaya-upaya untuk meredakan sebuah perdebatan yang dimungkinkan terjadi. Kemungkinan nomor urut 02 bisa terjebak,

blunder dan kalah. Yang lebih berbahaya lagi bisa memancing emosi dari nomor urut 02," terangnya.

Sementara itu, dari nomor urut 01 dan 03 dalam debat kali ini terlihat cukup sinergi dan saling melengkapi. Gaya penyampaian juga tidak berbeda jauh, keduanya saling memberikan contoh melalui pengalaman atau cerita kesuksesannya selama berada di pemerintahan.

"Terkait dengan materi yang disampaikan nomor urut 02 terlihat memiliki ciri khas memposisikan masalah pendidikan, tenaga kerja itu kehadiran negara selalu dihubungkan dana, anggaran, dan bantuan. Artinya, dengan pemilihan kata-kata itu menunjukkan jika dengan anggaran dan dana itu



Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah, 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan.

cukup menyelesaikan semua permasalahan," kata Anang.

"Sedangkan calon presiden nomor urut 01 dan calon presiden nomor urut 03, selain anggaran juga menyampaikan upaya-upaya untuk memperkuat sistem. Sistem di sini dalam artian meliputi infrastruktur dan suprafstruktur," imbuhnya.

Pengamat Politik Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai, debat kelima capres terakhir seperti antiklimaks. Sebab, masing-masing paslon sudah kehabisan amunisi, terutama untuk mengoreksi Prabowo Subianto.

"Terutama paslon 01 dan 03 yang selama ini cenderung mengoreksi 02. Semua amunisi atau bahan koreksi boleh jadi sudah tersampaikan pada



debat sebelumnya," kata Arif, Minggu, 4 Februari 2024.

Arif justru menganalisa performa capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang dinilai lebih agresif. Tujuan Ganjar, menurut dia, sebagai bagian dari strategi mengambil ceruk suara undecided voters dan swing voters yang jumlahnya di kisaran 28 persen.

"Gaya menyerang demikian tentu akan menjadi perhatian kelompok pemilih demikian, karena tipe kelompok ini cenderung kritis," kata Arif.

Menurut Arif, cara Ganjar mengoreksi pernyataan-pernyataan Prabowo sebagai 'pelanjut petahana' kemungkinan akan mendapat nilai politik. "Saya kira persetujuan PDIP dengan Jokowi sudah terbuka, terlihat dari pernyataan Megawati (soal netralitas TNI dan Polri), dan beberapa petinggi PDIP, kini ditegaskan dalam debat ini Ganjar Pranowo lebih aktif dalam mengoreksi wacana yang dilemparkan Prabowo Subianto," ujarnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, juga menganggap tiga capres menghindari sentimen negatif dari publik. Pasalnya, momen semalam adalah debat terakhir yang disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Masa kampanye pun tinggal satu pekan lagi.

"Kalau mere-

ka terlalu keras juga bakal mendapat sentimen negatif," kata Agung.

Agung melihat Anies yang berbeda di debat terakhir. Menurutnya, Anies jadi lebih santai dan tidak menyerang Prabowo secara frontal seperti di debat sebelumnya.

Agung menganggap Anies tidak lagi sekeras sebelumnya karena orang-orang di belakangnya pun memperhatikan sentimen negatif dari publik. Terlebih, saat ini elektabilitas Prabowo-Gibran masih unggul di semua hasil survei.

"Apalagi kingmaker di belakang Anies-Muhaimin ini juga mulai realistis," kata dia.

Agung melihat, kini Ganjar Pranowo yang lebih ingin melakukan perubahan ketimbang Anies. Serangan Ganjar terhadap pemerintahan saat ini dilontarkan beberapa kali dalam debat.

"Jadi saya melihatnya justru yang lebih menggariskan perlawanan perubahan ini justru jatuh Ganjar-Mahfud ketimbang Anies," ucapnya.

Akan tetapi, Prabowo lebih bisa mengontrol emosi. Serangan Ganjar seolah menjadi tidak terasa. Agung melihat Prabowo

tidak mudah terpancing dalam menyikap serangan.

Di segmen

terakhir debat, Prabowo pun mengucapkan terima kasih serta permohonan maaf kepada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo menekankan bahwa Pilpres 2024 bukan ajang untuk saling bermusuhan.

"Itu upaya rekonsiliasi. Meneduhkan. Membuat situasi nasional stabil," kata dia.

Terpisah, Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, melihat para calon presiden ingin mencegah keterbelahan di masyarakat. Oleh karena itu, tiga capres tidak terlihat saling bertukar serangan seperti di debat-debat sebelumnya.



Beberapa bulan ini, kami melaksanakan kampanye penuh semangat, penuh kontestasi, penuh kata-kata keras. Tetapi itikad kami baik

"Debat pamungkas ini seolah memberikan pesan tentang proses pendinginan (cooling down), sehingga politik pecah belah tidak berkembang jelang Pemilu 14 Februari nanti," ucap Umam.

Umam mengatakan sebenarnya ada serangan-serangan dari Anies dan Ganjar mengenai dugaan politisasi bansos, ketimpangan serta ketidakadilan. Akan tetapi, tidak terlalu terasa dan tidak sekuat debat-debat sebelumnya. Para capres justru menunjukkan sikap simpatik di debat terakhir.

"Debat kelima yang juga debat pamungkas dari rangkaian debat Pilpres 2024 ini mengisyaratkan spirit politik rekonsiliasi," kata dia. •



PENAMPILAN TENANG GANJAR BIKIN PENDUKUNG SENANG

Penampilan dan performa Ganjar Pranowo di debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) dinilai cukup memukau. Bukan itu saja Ganjar Pranowo juga tampil santai menggunakan jaket hitam putih layaknya seorang mahasiswa sehingga kesan berjiwa muda cukup kental terasa.

Dalam paparan awalnya Ganjar Pranowo mengatakan untuk membangun Indonesia yang beradab perlu tiga bagian. Pada bagian pertama yaitu soal kesehatan. Kesehatan tidak hanya bicara soal pengobatan saja tapi juga terkait pencegahan atau preventif.

Tindakan preventif ini jauh lebih dari pengobatan dengan memperhatikan dan meningkatkan olahraga, memakan makanan bergizi dan hal itu akan membantu dalam politik kesehatan. Kemudian peningkatan fasilitas kesehatan hingga tingkat pedesaan.

"Sehingga kenapa Ganjar - Mahfud membuat program satu desa satu faskes, satu nakes karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas dan masyarakat adat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama," kata Ganjar dalam paparannya dalam debat terakhir Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Setelah semua daerah mendapat pelayanan kesehatan yang merata baru kemudian meningkatkan akses budaya dan pendidikan yang lebih baik, lebih inklusi dan kurikulum yang mantap. Semua anak didik harus mendapat fasilitas pendidikan yang baik termasuk nasib guru dan dosen.

Ganjar juga mengaku mendapat amanah dari seorang perempuan dari Yogyakarta yang meminta agar penyandang disabilitas dan kaum wanita mendapat perhatian dalam pendidikan.

Melalui pendidikan yang baik lanjutnya, mereka akan mendapat kemampuan yang bisa diandalkan saat bekerja nanti.

"Ini semua bisa kita lakukan bila digitalisasi sudah kita lakukan, infrastrukturnya baik dan tersebar. Sehingga mereka mendapat media yang baik untuk mengembangkan diri," terangnya.

Untuk itu mereka juga diberi contoh mulai dari demokrasi yang baik, demokratisasi berjalan baik dan memberikan contoh dari pemimpinnya. Tidak ada konflik kepentingan seperti yang dicontohkan Mahfud MD yang memilih mundur sebagai Menko Polhukam.

Ada banyak uneg-uneg yang mereka terima terkait soal budaya, pendidikan, sosial dan lainnya dan disampaikan rakyat secara langsung ke mereka.



"Untuk itu kami menganggap tuanku adalah rakyat dan jabatan hanyalah mandat," tutur Ganjar mengakhiri paparannya.

Dalam debat tersebut ada momen yang menarik saat Ganjar mengkoreksi pertanyaan Capres 02, Prabowo Subianto. Dimana saat itu Prabowo memberikan pertanyaan pada Ganjar Pranowo terkait gagasannya untuk mengatasi persoalan gizi terkait stunting dan kemiskinan melalui program makan siang bergizi.

Ganjar menyatakan secara tegas tidak setuju jika memberi makan siang gratis untuk mengatasi stunting karena persoalan ini harus dilakukan dari masa kehamilan. Dimana untuk mengatasi stunting tersebut dimulai sejak kehamilan seorang ibu yang harus membutuhkan makanan bergizi.

Bukan memberikan makanan bergizi pada Balita karena kalau anak yang kekurangan gizi tidak bisa dikatakan stunting melainkan kurang gizi atau bisa juga busung lapar.

Koreksi ini kemudian langsung disetujui Prabowo Subianto dan menyatakan apa yang disampaikan Ganjar tersebut adalah sama yakni memberikan makanan bergizi pada anak dan ibu hamil.

Ganjar Pranowo menyampaikan kritik dari sejumlah tokoh sampai kampus terkait keresahan tentang netralitas pemerintah dalam Pilpres 2024 mestinya menjadi perhatian bagi para pejabat.

Ganjar juga mengutip pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang pernah disampaikan dalam debat capres tahun 2019 lalu. Saat itu Jokowi, kata Ganjar, menyampaikan untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki potongan diktator. Hal itu disampaikan saat pidato penutup debat.

Dalam pidatonya Ganjar dan Mahfud MD punya tiga janji penting yakni taat kepada Tuhan, patuh kepada hukum

dan keadilan serta setia kepada rakyat. Janji itu disampaikan berdasarkan hasil kunjungannya berkeliling Indonesia untuk mendengarkan aspirasi seluruh rakyat dari berbagai kalangan.

"Mereka sampaikan, saya catat dalam tiga hal. Yang pertama, bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi. Mulai dari pendidikan yang tidak inklusi. Lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang," ungkapnya didampingi Cawapres Mahfud MD.

Kemudian untuk stunting, harus betul-betul dilakukan agar bangsa ini punya investasi besar terhadap sumber daya manusia ke depan.

"Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang dan kemarahan rakyat kemudian muncul, lalu mereka menjadi apatis. Beri suara Anda kepada calon yang konsisten, yang visioner, yang mampu mendengarkan rakyat. Negarawan reformis dan tidak punya persoalan," tegasnya.

Ganjar juga meminta agar rakyat menjaga proses politik demokrasi dengan baik. Rakyat harus melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka melalui statement yang sangat terbuka atau oleh mereka menguasai sepertiga kekayaan Indonesia.

Menurutnya, rakyat merasa terluka karena mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hal ini telah menimbulkan gejolak karena kalangan kampus berbicara dan masyarakat sipil berbicara.

Sehingga jangan biarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN subur kembali di Indonesia. Caranya

dengan melakukan tindakan tegas untuk menegakkan hukum.

"Lima tahun yang lalu dalam debat capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggaran HAM. Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin," ungkapnya.

Janji Ganjar - Mahfud yang ketiga yakni jika terpilih memimpin republik ini mereka tidak akan mengecewakan rakyat. Rakyat merupakan sumber energi mereka sehingga ruang-ruang terbuka harus diakomodasi.

"Mandat rakyat adalah amanah suci buat kami dan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai sebuah era baru Indonesia. Era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan, no one left behind. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan inspirasi, menitipkan harapan kepada pundak kami berdua untuk memilih nomor tiga, Ganjar-Mahfud. Insya Allah Indonesia pasti lebih baik," tutupnya.

Pendukung Bangga

Performa baik yang ditampilkan Ganjar Pranowo membuat tim pendukungnya merasa senang sekaligus bangga. Ada suasana optimisme tinggi terlihat dan hal itu cukup mempengaruhi kebatinan mereka sebagai pendukung.

Sikap optimis itu disampaikan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud.

"Saya yakin, dari TPN juga masyarakat akan bersuara pada tanggal 14 Februari nanti. Mereka akan menggunakan hak pilihnya itu untuk condong ke nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Dan kita melihat trennya juga terus naik," kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud Ratu Dewi Nabilla



Fatma Sentika di Tangerang Selatan, Minggu (4/2/2024).

Dia mengungkapkan jika dilihat dari beberapa survei peminat pasangan Ganjar-Mahfud setiap bulannya terus mengalami peningkatan secara positif. Dimana, tren pemilih dari kelompok milenial hingga gen Z condong memilih calon presiden dari nomor urut 3.

Hal tersebut, lanjut dia, merupakan

pemula.

"Dari ketiga pasangan yang ada pasangan nomor urut 3 lebih besar dan fokus pada penanganan pengangguran," tuturnya.

Ia menilai dalam debat capres tersebut Ganjar menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan yang memiliki substansi baik dengan mencontohkan karakter yang berakhlak.



bentuk keoptimisan masyarakat khususnya kalangan anak muda dalam mempercayai kepemimpinan Ganjar-Mahfud untuk Indonesia lebih baik.

"Dari yang kita lihat itu trennya terus meningkat dari bulan Januari hingga saat ini tren itu ke Ganjar-Mahfud selalu positif. Dan banyak dari mereka (milenial dan Gen Z) antusias untuk menunggu program Ganjar-Mahfud segera dilaksanakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, keyakinan pemilih anak muda untuk mendukung Ganjar-Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu atas adanya program penyerapan 17 juta lapangan pekerjaan. Kendati, diyakini akan mendapatkan banyak dukungan dari pemilih

Ganjar juga telah membuka pembaharuan dalam debat tersebut. Dimana, gagasan dan visi, misi untuk menjawab pembahasan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM dan inklusi dapat diyakini oleh masyarakat Indonesia.

"Sayayakin, dari TPN juga masyarakat akan bersuara pada tanggal 14 Februari nanti. Mereka akan menggunakan hak pilihnya itu untuk condong ke nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Dan kita melihat trennya juga terus naik," ungkapnya.

Anti Klimaks

Meski penampilan Ganjar Pranowo

cukup baik namun banyak yang menilai debat Capres edisi terakhir tidak semenarik sebelumnya. Para kandidat lebih cenderung main aman karena takut melakukan blunder hingga bisa mempengaruhi elektabilitas mereka sendiri.

Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar - Mahfud Sumsel, Yahya Maya Sakti mengaku puas dengan performa paslon 03 namun jalannya debat tidak begitu menarik. Di sisi lain mereka yakin kalau akan terjadi dua putaran.

"Kami yakin terjadi dua putaran tapi agak kurang menarik. Ada lemparan-lemparan dari Pak Ganjar tapi tidak di smash Anies. Statement yang disampaikan juga terlihat berhati-hati," ujar Yahya.

Beberapa isu terkait sikap otoriter dan perilaku untuk tidak korupsi sempat diangkat Ganjar namun tidak respon. Bahkan beberapa penyampaian Ganjar malah tidak ada sanggahan sehingga semua terkesan main aman.

"Semuanya saling setuju sehingga saya melihat debat Capres semalam itu bukan debat. Mereka semua saling menjaga relasi atau main aman," terangnya.

"Apa lagi, kalau kita lihat closing penutup hanya capres 03 seorang yang terlihat berpengalaman, jawaban cerdas dari seorang calon presiden," tambah Yahya Maya Sakti.

Menurut Yahya, Sumsel yakin akan bisa memenangkan Ganjar, dibuktikan kedatangannya saat di Palembang yang disambut antusias masyarakat.

Sementara itu, pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar pun menyoroti salah satu paslon yang menyebut akan memastikan 29 kampus. Menurut Bagindo, gerakan tersebut sia-sia.

"Nasi sudah jadi bubur, menurut saya gerakan itu sia-sia, kenapa tidak dilakukan di bulan Oktober saat pendaftaran capres dan penetapan capres," tegas Bagindo.

Bahkan dia melihat debat Capres terakhir berlangsung antiklimaks tidak ada perdebatan sama sekali. Performa Ganjar tidak sebaik di debat ketiga.

Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya ini menilai tidak ada ide-ide segar yang ditawarkan para Capres. Sehingga diskusi berlangsung biasa saja. ●

info indonesia www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network

INFO PASANG
 NUR AISAH
 + 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
 JL. Raya Kalibata No. 8
 Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
 Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 [facebook](https://www.facebook.com/infoindonesia) @infoindonesia.id  [twitter](https://twitter.com/_infoindonesia) : @_infoindonesia

 [Instagram](https://www.instagram.com/info_indonesia) @info_indonesia.id  [YouTube](https://www.youtube.com/infoindonesiatv) : infoindonesiatv



INOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #40 FEBRUARI

2024



**1 PUTARAN
PRAGIB UNTUK
JOKOWI
3 PERIODE**